

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, saya selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyambut baik atas diterbitkannya buku Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2011.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut periode 1 (satu) tahun mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2011, yang meliputi kegiatan Operasional dan Administratif juga nantinya akan merupakan dokumen resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut .

Transportasi laut sebagai urat nadi terhadap kehidupan ekonomi dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dan sangat strategis sebagai penunjang, pendorong dan penggerak roda pertumbuhan perekonomian nasional dan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar disamping juga berperan sebagai sarana distribusi dan mobilisasi orang maupun barang secara Nasional dan Internasional.

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan transportasi laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah melakukan upaya re-strukturisasi, dengan terbitnya Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran maka diperlukan langkah penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan Strategis Nasional dan Internasional yang menuntut penyelenggaraan Pelayaran (transportasi laut) yang dalam perkembangannya mengikuti kemajuan pengetahuan dan teknologi, mengikutsertakan partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur, dan penerapan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan pemisahan fungsi regulator dengan fungsi operator. Bentuk upaya peningkatan kinerja pelayanan transportasi laut melalui Pemberdayaan Industri Pelayaran di Indonesia sesuai dengan Inpres No 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran, Pemerintah menerapkan asas *cabotage* secara konsekuen dengan merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing seturut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, yang merupakan penegasan penerapan asas *Cabotage*.

Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh sebagai sumber informasi mengenai lingkup kegiatan yang telah dilaksanakan.

Saya berharap dengan terbitnya buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing langkah kita semua dalam melaksanakan tugas untuk kemajuan transportasi dan kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

LEON MUHAMAD

No	Nama	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Lollan Andy S.P, ST, MT	Kasub. Evaluasi dan Pelaporan		
2.	Diperiksa	Eko Hadi Rumecko	Kabag. Perencanaan		
3.	Diperiksa	M. Murdiyanto, SE, M.Si	Kabag. Keuangan		
3.	Diperiksa	Sri Lestari Rahayu, SH, LLM	Kabag. Hukum		
4.	Diperiksa	Adi Karsyaf, SH, MH	Kabag. Kepegawaian dan Umum		
5.	Diperiksa	Ir. M. Haekal Dachlan	PH. Direktur LALA		
6.	Diperiksa	Kemal Heryandri	Direkrur PELPENG		
7.	Diperiksa	Capt. Yan Risuandi, M.Sc	Direktur KAPPEL		
8.	Diperiksa	Moh. Ichsan	PH. Direktur Kenavigasian		
9.	Diperiksa	Drs. Yudustar	Direktur KPLP		
10.	Diketahui	Capt. Erwi Rosmali, MM	Sesditjen Hubla		

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT NASIONAL.....	2
1. Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional.....	2
2. Misi Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional	2
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI	2
1. Tugas Pokok Direktorat Jenderal Perhubungan.....	2
2. Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	2
3. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	3
C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT.....	3
1. Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan.....	3
2. Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan.....	3
3. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.....	3
D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT.....	6
1. Tugas Pokok Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.....	6
2. Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.....	6
3. Susunan Organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.....	7
E. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT PELABUHAN DAN Pengerukan.....	8
1. Tugas Pokok Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan.....	8
2. Fungsi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan.....	8
3. Susunan Organisasi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan.....	9
F. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN.....	9
1. Tugas Pokok Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.....	9

2. Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.....	9
3. Susunan Organisasi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.....	10
G. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT KENAVIGASIAN.....	11
1. Tugas Pokok Direktorat Kenavigasian.....	11
2. Fungsi Direktorat Kenavigasian.....	11
3. Susunan Organisasi Direktorat Kenavigasian.....	11
H. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI.....	12
1. Tugas Pokok Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan.....	12
2. Fungsi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan.....	12
3. Susunan Organisasi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan.....	13

BAB II KEGIATAN POKOK

A. DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT.....	14
1. Program Kerja	14
2. Realisasi Program Kerja	14
3. Permasalahan	24
4. Upaya Mengatasi Permasalahan.....	27
B. DIREKTORAT PELABUHAN DAN Pengerukan	30
1. Program Kerja.....	30
2. Realisasi Program Kerja	31
3. Permasalahan	38
4. Upaya Mengatasi Permasalahan.....	39
C. DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN	40
1. Program Kerja.....	40
2. Realisasi Program Kerja	41
3. Permasalahan	45
4. Upaya Mengatasi Permasalahan.....	46
D. DIREKTORAT KENAVIGASIAN.....	48
1. Program Kerja.....	48
2. Realisasi Program Kerja	52
3. Permasalahan	76
4. Upaya Mengatasi Permasalahan.....	80

E.	DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI.....	90
1.	Program Kerja.....	90
2.	Realisasi Program Kerja	91
3.	Permasalahan	103
4.	Upaya Mengatasi Permasalahan.....	104

BAB III KEGIATAN ADMINISTRASI

A.	BAGIAN PERENCANAAN	106
1.	Program Kerja	106
2.	Realisasi Program Kerja	108
3.	Permasalahan	113
4.	Upaya Mengatasi Permasalahan.....	113
B.	BAGIAN KEUANGAN	115
1.	Program Kerja	115
2.	Realisasi Program Kerja	117
3.	Permasalahan	123
4.	Upaya Mengatasi Permasalahan.....	124
C.	BAGIAN HUKUM.....	126
1.	Program Kerja	126
2.	Realisasi Program Kerja	127
D.	BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM.....	141
1.	Program Kerja	141
2.	Realisasi Program Kerja	142
3.	Permasalahan	158
4.	Upaya Mengatasi Permasalahan.....	159

BAB IV PROGRAM KERJA TAHUN 2012

A.	Bagian Perencanaan.....	161
B.	Bagian Keuangan.....	163
C.	Bagian Hukum.....	164
D.	Bagian Kepegawaian dan Umum.....	166
E.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.....	168
F.	Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan.....	171

G.	Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.....	173
H.	Direktorat Kenavigasian.....	174
I.	Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.....	179

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

II.1	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut Nasional.....	15
II.2	Jumlah Armada Angkutan Laut Nasional.....	16
II.3	Jumlah dan Pangsa Muatan Dalam Negeri	17
II.4	Jumlah dan Pangsa Muatan Luar Negeri.....	18
II.5	Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut di Daerah Terpencil	20
II.6	Usulan, Anggaran Dan Realisasi Kewajiban Pelayanan Umum (Public Services Obligation/ PSO).....	22
II.7	Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Perintis TA.2008 -2011.....	23
II.8	Rekapitulasi Rekomendasi IKR yang dikeluarkan Ditjen Hubla Periode Tahun 2011	62
II.9	Data Rekapitulasi Kecelakaan Kapal	99
III-1	Survei Hidrografi/Topografi, Penyelidikan Tanah dan Desain	112
III-2	Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut.....	112
III-3	Tindak Lanjut LHP BPK-RI	120
III-4	Tindak Lanjut LHP ITJEN	120
III-5	Penanganan Disiplin PNS	144
III-6	Laporan Kasus Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	145
III-7	Laporan Pemeriksaan Ijasah Pelaut	145
III-8	Sosialisasi Disiplin PNS	146
III-9	Kenaikan Gaji Berkala	146
III-10	Pemrosesan Cuti	147
III-11	Pemberian Penghargaan kepada Pegawai	147
III-12	Mutasi Jabatan Struktural	147
III-13	Kenaikan Pangkat	148
III-14	Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional PKP	149
III-15	Pengangkatan Pertama Pejabat Fungsional PKP	149
III-16	Pejabat Fungsional PKP yang Naik Jenjang	150
III-17	Urusan Pensiun dan Umum	150
III-18	Usulan Pengangkatan PNS.....	151
III-19	DP3 Pejabat Struktur	152
III-20	Diklat Perjenjangan Struktural (Kepemimpinan).....	153
III-21	Diklat Teknis Fungsional	153
III-22	Diklat Penunjang	154
III-23	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian ijazah	155
III-24	Jumlah Surat Masuk	157
III-25	Jumlah Surat Keluar	158
III-26	Penyuluhan/Pembinaan SAP	158

DAFTAR GRAFIK

II.1	Perkembangan Perusahaan Angkutan Laut Nasional	15
II.2	Perkembangan Armada Nasional	16
II.3	Perkembangan Jumlah dan Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri	17
II.4	Perkembangan Jumlah dan Pangsa Muatan Angkutan Laut Luar Negeri	18
II.5	Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Bengkel.....	83
II.6	Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Air/ Dermaga.....	84
II.7	Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Gudang/ Lapangan Penumpukan	85
II.8	Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Gedung Bengkel.....	85
II.9	Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Asrama/ Mess.....	86
II.10	Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Angkat (crane dan forklift).....	87
II.11	Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas BBM Bengkel	88

DAFTAR GAMBAR

II-1	Komponen National Single Window	20
II-2	Jaringan Trayek Perintis Tahun 2011	21
II-3	Jaringan Trayek Angkutan Laut PT. Pelni Tahun 2011	21
II-4	Jaringan Trayek Angkutan Laut Penumpang PT. Pelni 2011.....	22
II-5	Peresmian Kapal Perintis KM. Sabuk Nusantara 30 di Tanjung Pinang Tanggal 9 Januari 2011.....	23
II-6	Pembinaan Pelayanan Pemanduan di Lokasi Batam.....	34
II-7	Pembinaan Ecoport di Adpel Gresik.....	37
II-8	Monitoring & Pengumpulan Data Pendaftaran & Kebangsaan Kapal	42
II-9	Penyegaran Marine Inspector "A" Angkatan VII	43
II-10	Penyegaran Marine Inspector "B" Angkatan V	43
II.11	Temu Teknis Bidang Kelaiklautan Kapal	44
II-12	Workshop Marpol	44
II-13	Rapat Kerja Teknis Kenavigasian di Jogjakarta.....	53
II-14	Rapat Kerja Teknis Kenavigasian di Surabaya.....	53
II-15	Pemeliharaan SBNP di Selat malaka dan Selat Singapura.....	55
II-16	Sidang TTEG ke-36 di Malaka, Malaysia	56
II-17	Diklat SBNP	57
II-18	Diklat ORU GMDSS.....	58
II-19	Diklat TTP III	58
II-20	Diklat Vessel Trafic Service (VTS) Operator	59
II-21	Diklat Teknologi Mekanik	59
II-22	Diklat ANT/ ATT Dasar.....	60
II-23	Training, Workshop On Multi-Beam Survey and Side scan Sonar	61
II-24	Rehab Menara Suar Debril di Makassar	67
II-25	Alat Survey	69
II-26	Pengadaan dan Pemasangan AIS (Aton)	70
II-27	Pengadaan Peralatan GMDSS SROP Manokwari	71
II-28	Pengadaan Peralatan Bengkel Truck Crane 5 Ton	72
II-29	Pengadaan Peralatan Bengkel Forklift 7 Ton	73
II-30	Pembangunan Dermaga Distrik Navigasi Tg. Priok Cikoneng	74
II-31	Pembangunan Kapal Pengamat Perambuan KN. Marore	75
II-32	Peta Kerawanan Wilayah Ditjen Hubla	91
II-33	Pembukaan Pelatihan ISPS Code.....	92
II-34	Panitia dan Peserta Pelatihan ISPS Code	92
II-35	Rakornis, PSC dan PSCO.....	93
II-36	Workshop Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak	93
II-37	Workshop Penyusunan Rencana Operasi Marpolex	94
II-38	Narasumber dan Peserta Pembekalan Materi Pre-Exercise	94
II-39	Latihan di Laut Operasi SAR, Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Tumpahan Minyak pada Pre- Exercise	95
II-40	Upacara Keberangkatan Tim Marpolex 2011	95
II-41	Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak	96
II-42	Sosialisasi Perlindungan Lingkungan Maritim di Semarang	97
II-43	Sosialisasi Perlindungan Lingkungan Maritim di Batam	97

II-44	Kegiatan Up-Grading PPNS	98
II-45	Narasumber dan Peserta pada Up-Grading PPNS	98
II-46	Diklat PPNS Eksekutif	99
II-47	Pengadaan Peralatan SAR	100
II-48	Pembangunan Kapal Patroli Kelas IA	101
II-49	Pembangunan Kapal Patroli Kls IB (tahap II)	101
II-50	Pengadaan Peralatan ROV (Remotely Operated Vehicle)/ Scan Sonar.....	102
II-51	Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran	102
III-1	Pengarahan Teknis Para KPA/PPK dan Satker Sementara	110
III-2	Updating Aplikasi PP-39 Tahun 2006	111
III-3	Rekonsiliasi LK Semester I di Bandung	119
III-4	Pembekalan Bendahara Penerima di Surabaya	121
III-5	Rakornis Bidang Kesekretariatan Ditjen Hubla	123
III-6	Kampanye Keselamatan Pelayaran	135
III-7	Upacara Puncak Hari Nusantara di Kota Dumai	139
III-8	Perwakilan Penerima Penghargaan Bidang Perhubungan Laut	140
III-9	Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pejabat Eselon II	143
IIII-10	Ceramah Keagamaan	152



BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mutlak untuk diwujudkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Direktorat Jenderal memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidangnya, dengan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan kementerian, pelaksanaan kebijakan kementerian, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaksanaan administrasi di bidangnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, pimpinan satuan organisasi/ kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berisi capaian kinerja selama tahun yang bersangkutan. Dengan demikian disusunlah Laporan Tahunan ini sebagai sarana untuk melaporkan pemantauan terhadap pencapaian kegiatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tahun 2011 serta program kerja tahun 2012.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan data-data informasi terkait visi dan misi, program kerja beserta realisasi kegiatan dan permasalahan beserta upaya pemecahan masalah di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2011 terkait kegiatan pemerintahan, kegiatan operasional dan kegiatan pembangunan, sedangkan tujuan penyusunan laporan tahunan adalah selain memberikan bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, juga untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya dan tersedianya program kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut baik pada masing-masing Direktorat maupun Bagian dalam tahun 2012.



A. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT NASIONAL

1. Visi Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional

Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Misi Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional

- a. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/ dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna.
- b. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara.
- c. Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan.
- d. Menyelenggarakan perlindungan maritim diperairan nusantara.
- e. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1. Tugas Pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.

2. Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan laut;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan laut;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut; dan



- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

3. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- c. Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan;
- d. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- e. Direktorat Kenavigasian; dan
- f. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

1. Tugas Pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2. Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, perumusan kebijakan, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang inventaris milik negara;
- c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, dokumentasi hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama luar negeri;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan kepegawaian; dan
- e. penyiapan pelaksanaan penelaahan, dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.



3. Susunan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri dari:

a. Bagian Perencanaan;

1) Tugas Bagian Perencanaan

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, perumusan kebijakan, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2) Fungsi Bagian Perencanaan

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, perumusan bahan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, hubungan antar lembaga, penyusunan pedoman, standar dan rencana usaha kemitraan;
- b) penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan anggaran, rancangan rencana kerja (RENJA), rencana kerja dan anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyusunan program kerja sama teknik dan pinjaman/hibah luar negeri; dan
- c) penyiapan bahan bimbingan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan koordinasi kebijakan dan penetapan tarif, penyusunan rencana dan evaluasi kinerja serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b. Bagian Keuangan

1) Tugas Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan inventarisasi barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



2) Fungsi Bagian Keuangan

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan proses pengesahan konsep dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi anggaran dan pemantauan anggaran serta penyiapan petunjuk pelaksanaan anggaran;
- b) penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca, serta tindak lanjut penyelesaian temuan dan pemantauan laporan hasil pemeriksaan aparat pengawas; dan
- c) penyiapan verifikasi, pembukuan dan perhitungan anggaran, penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi perlengkapan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan (TP) dan tuntutan ganti rugi (TGR).

c. Bagian Hukum

1) Tugas Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum serta urusan kerjasama luar negeri dan hubungan masyarakat.

2) Fungsi Bagian Hukum

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan bantuan hukum dan penyuluhan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum; dan



- c) penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan pertimbangan urusan kerjasama luar negeri dibidang perhubungan laut.

d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

1) Tugas Bagian Kepegawaian dan Umum

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.

2) Fungsi Bagian Kepegawaian dan Umum

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan karir pegawai dan pengelolaan basis data kepegawaian serta analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan dan disiplin pegawai; dan
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan dan Umum.

D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

1. Tugas Pokok Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut serta pengembangan sistem dan informasi angkutan laut.

2. Fungsi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:



- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut;
- d. penyiapan pemberian perizinan penyelenggaraan usaha pelayaran antar provinsi dan/atau internasional dan izin operasi angkutan laut khusus serta penetapan syarat bendera kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia dan persyaratan agen umum dan perwakilan perusahaan pelayaran asing;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tarif angkutan laut, angkutan laut dalam negeri dan luar negeri, angkutan laut khusus, pengembangan usaha angkutan laut dan penunjang angkutan laut, pengembangan sistem dan informasi angkutan laut; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan ketatausaha, kepegawaian, dan kerumahtangga.

3. Susunan Organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut terdiri dari:

- a. Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri;
- c. Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan Laut;
- d. Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut;
- e. Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan Laut; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.



E. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT PELABUHAN DAN Pengerukan

1. Tugas Pokok Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan.

2. Fungsi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, bimbingan pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan pelabuhan dan perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- d. penyiapan pemberian perizinan dan standardisasi penyelenggaraan pengembangan pelabuhan, perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pelabuhan, perancangan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduaan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan operasional pelabuhan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.



3. Susunan Organisasi Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan

Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Pengembangan Pelabuhan;
- b. Subdirektorat Perancangan Fasilitas Pelabuhan;
- c. Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi;
- d. Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal;
- e. Subdirektorat Bimbingan Pelayanan Jasa dan Operasional Pelabuhan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

F. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN

1. Tugas Pokok Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan kepelautan.

2. Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Fungsi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan adalah:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tank cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating and running repair*) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tank cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating and running repair*) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;



- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang rancang bangun dan kelaikan kapal, pengukuran, pendaftaran dan kebangsaan kapal, nautis, teknis dan radio kapal, pencemaran dan manajemen keselamatan kapal, pembersihan tangki kapal (*tank cleaning*), perbaikan dan pemeliharaan (*floating and running repair*) kapal, penetapan standar pengujian dan sertifikasi kepelautan;
- d. penyiapan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, kepelautan, manajemen keselamatan kapal (*ISM-Code*), surat ukur kapal dan surat tanda kebangsaan kapal dalam rangka penyelenggaraan kelaiklautan kapal dan daftar riwayat kapal (*continuous synopsis record*);
- e. penyiapan pengesahan gambar rancang bangun kapal, perhitungan stabilitas kapal, lambung timbul kapal, daftar ukur kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, program lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikat kepelautan dan panduan muatan dalam rangka pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
- f. penyiapan penerbitan surat persetujuan penggunaan/penggantian nama kapal, surat penetapan tanda panggilan (*call sign*) kapal, surat keterangan status hukum kapal dan surat keterangan penghapusan kapal dari pendaftaran;
- g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kapal, standar pengujian dan sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal dan dokumen pelaut, keselamatan kapal dan manajemen keselamatan kapal, pengukuran dan surat ukur kapal, pendaftaran dan tanda kebangsaan kapal, jaminan ganti rugi pencemaran laut oleh minyak dari kapal; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian dan kerumahtangga.

3. Susunan Organisasi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terdiri dari:

- a. Subdirektorat Kelaikan Kapal;
- b. Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
- c. Subdirektorat Nautis, Teknis dan Radio Kapal;



- d. Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal;
- e. Subdirektorat Kepelautan; dan
- f. Subbagian Tata usaha.

G. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT KENAVIGASIAN

1. Tugas Pokok Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian serta sarana dan prasarana kenavigasian.

2. Fungsi Direktorat Kenavigasian

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Kenavigasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian;
- d. penyiapan pemberian perizinan dan pelayanan dalam penyelenggaraan perambuan dan telekomunikasi pelayaran;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan, telekomunikasi pelayaran, kapal negara, dan pangkalan kenavigasian, sarana dan prasarana kenavigasian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan kerumahtangga Direktorat.

3. Susunan Organisasi Direktorat Kenavigasian

Direktorat Kenavigasian terdiri dari:

- a. Subdirektorat Perambuan;



- b. Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran;
- c. Subdirektorat Kapal Negara Kenavigasian;
- d. Subdirektorat Pangkalan Kenavigasian;
- e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

H. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

1. Tugas Pokok Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana laut dan pantai.

2. Fungsi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penjagaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;



- d. penyiapan pelaksanaan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- e. penyiapan pembinaan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta penyusunan dan pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, pemberian perijinan;
- f. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

3. Susunan Organisasi Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Direktorat Kesatuan Panjagaan Laut dan Pantai terdiri dari:

- a. Subdirektorat Patroli dan Pengamanan;
- b. Subdirektorat Pengawasan Keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Subdirektorat Tertib Pelayaran;
- d. Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air;
- e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.



BAB II KEGIATAN POKOK

A. DIREKTORAT LALU LINTAS ANGKUTAN LAUT

1. Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan dan Operasional

- 1) Penerbitan Surat Izin Usaha dan Operasi;
- 2) Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2005;
- 3) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor PP.22 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2010;
- 4) Peningkatan kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor dengan *National Single Window*;
- 5) Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut di Daerah Terpencil;
- 6) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Services Obligation/ PSO*) Bidang Angkutan Laut;

b. Kegiatan Pembangunan

Pembangunan kapal perintis

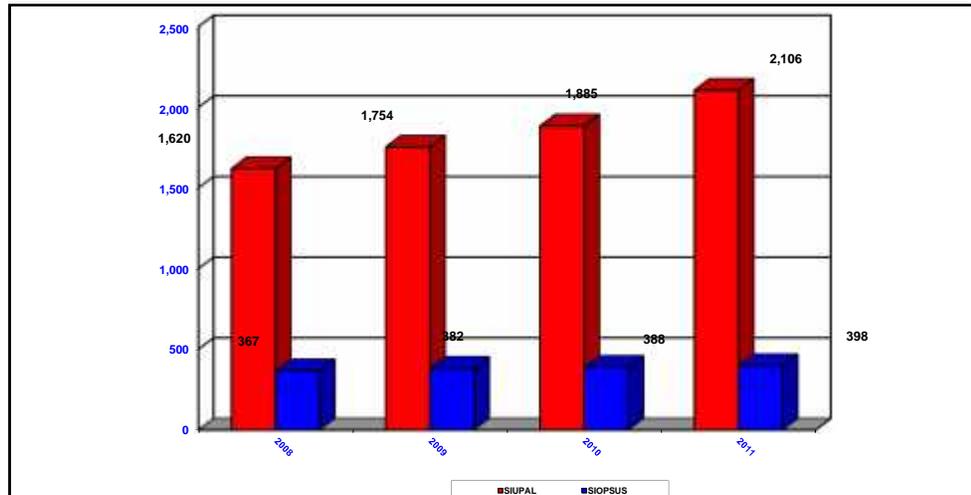
2. Realisasi Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan dan Operasional

- 1) Penerbitan Surat Izin Usaha dan Operasi
Perkembangan perusahaan pelayaran nasional dapat terlihat dari jumlah penerbitan surat izin usaha dan operasi bagi angkutan laut dan angkutan laut khusus sebagaimana terlihat pada grafik dan tabel berikut:



PERKEMBANGAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL (SIUPAL & SIOPSUS)



SIUPAL : Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
SIOPSUS : Surat Izin Operasional Perusahaan Angkutan Laut

Grafik II-1. Perkembangan Perusahaan Angkutan Laut Nasional

Tabel II-1. Data Jumlah Perusahaan Angkutan Laut Nasional

NO.	JENIS PERUSAHAAN	JUMLAH PERUSAHAAN			
		2008	2009	2010	2011
1	ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)	1,620	1,754	1,885	2,106
2	ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)	367	382	388	398
	TOTAL	1,987	2,136	2,273	2,504

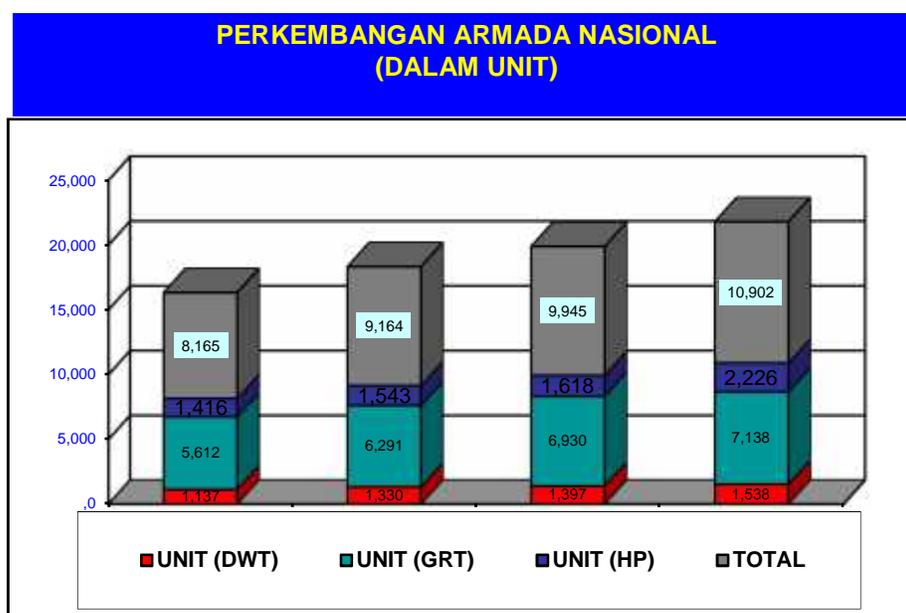
Sumber: Dit. LALA Ditjen Hubla 2011

2) Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2005

Dalam rangka pelaksanaan Inpres No 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran maka Pemerintah menerapkan *asas cabotage* secara konsekuen dengan merumuskan kebijakan serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna memberdayakan industri pelayaran nasional.



Posisi 2011 total armada sebanyak 10.902 unit kapal, bila dibandingkan dengan tahun 2010 yang total armadanya sebanyak 9.945 unit kapal, **maka terjadi peningkatan jumlah armada sebanyak 957 unit kapal (atau sebesar 9,62%)**, dimana sebagian besar merupakan pengalihan bendera kapal milik perusahaan pelayaran nasional dari bendera asing ke bendera Indonesia serta adanya pembangunan kapal baru dan pengadaan kapal bekas dari luar negeri.



Sumber : Dit. LALA Ditjen Hubla 2011

Grafik II-2. Perkembangan Armada Nasional

Tabel II-2 Data Jumlah Armada Angkutan Laut Nasional

NO.	SATUAN KAPASITAS	JUMLAH ARMADA (UNIT)			
		2008	2009	2010	2011
1	Dead Weight Tonnage (DWT)	1,137	1,330	1,397	1,538
2	Gross Tonnage (GT)	5,612	6,291	6,930	7,138
3	Horse Power (HP)	1,416	1,543	1,618	2,226
	TOTAL	8,165	9,164	9,945	10,902

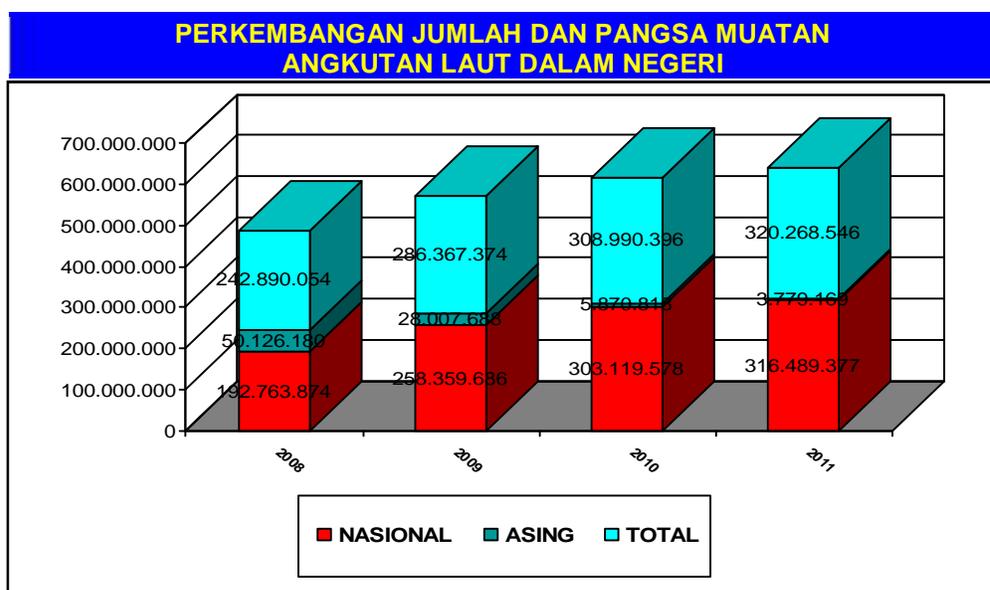
Sumber : Dit. LALA Ditjen Hubla 2011



Peningkatan pangsa muatan pelayaran nasional meliputi:

a) Angkutan laut dalam negeri

Pangsa muatan armada nasional pada tahun 2010 sebesar 98,1% (atau sebesar 303,11 juta ton) dari jumlah muatan sebesar 308,99 juta ton dan terus meningkat pangsa muatan armada nasional pada tahun 2011 menjadi 98,82% (atau sebesar 316,48 juta ton dari jumlah muatan sebesar 320,26 juta ton).



Sumber : Dit. LALA Ditjen Hubla 2011

Grafik II-3. Perkembangan Jumlah dan Pangsa Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri

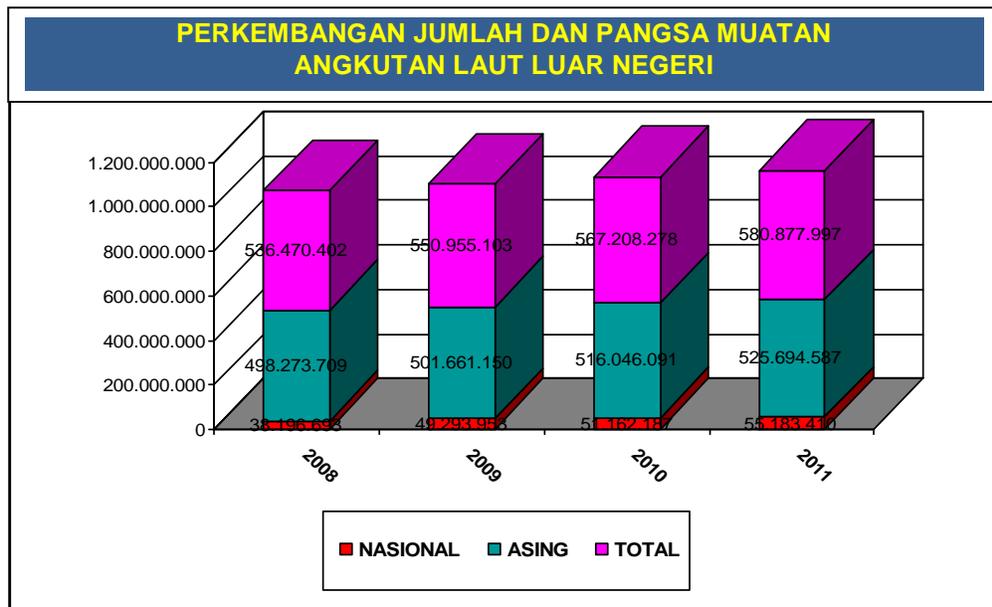
Tabel II-3. Jumlah dan Pangsa Muatan Dalam Negeri

NO	ARMADA	JUMLAH DAN PANGSA MUATAN							
		2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
1	NASIONAL	192.763.874	79,4	258.359.686	90,2	303.119.578	98,1	316.489.377	98,8
2	ASING	50.126.180	20,6	28.007.688	9,8	5.870.818	1,9	3.779.169	1,18
	TOTAL	242.890.054		286.367.374		308.990.396		320.268.546	



b) Angkutan Laut Luar Negeri

Pangsa muatan armada nasional pada tahun 2010 sebesar 9,02% (atau sebesar 51,16 juta ton) dari jumlah muatan sebesar 567,20 juta ton dan terus meningkat pangsa muatan armada nasional pada tahun 2011 menjadi 9.50% (atau sebesar 55,18 juta ton dari total muatan 580,87 juta ton).



Sumber : Dit. LALA Ditjen Hubla 2011

Grafik II-4. Perkembangan Jumlah dan Pangsa Muatan Luar Negeri

Tabel II-4. Jumlah dan Pangsa Muatan Luar Negeri

NO	ARMADA	JUMLAH DAN PANGSA MUATAN							
		2008	%	2009	%	2010	%	2011	%
1	NASIONAL	38.196.693	7,12	49.293.953	8,95	51.162.187	9,02	55.183.410	9,50
2	ASING	498.273.709	92,88	501.661.150	91,05	516.046.091	90,98	525.694.587	90,50
	TOTAL	536.470.402		550.955.103		567.208.278		580.877.997	

Sumber : Dit. LALA Ditjen Hubla 2011



- 3) Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor PP.22 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2010.

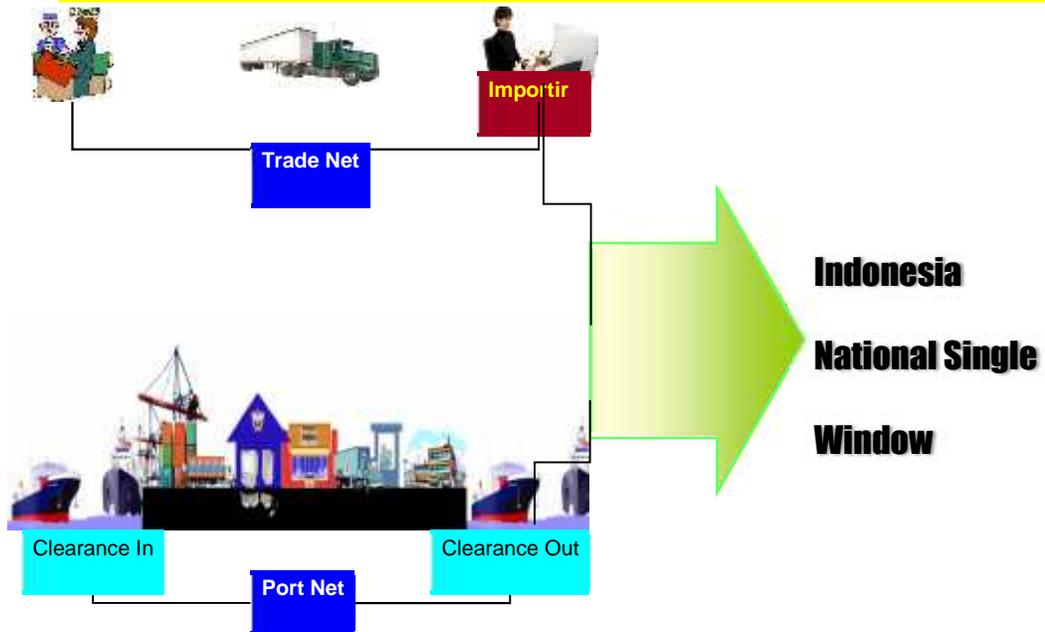
Dalam rangka pelaksanaan asas *cabotage* khususnya untuk muatan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir migas dikeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan antara Pelabuhan di Dalam Negeri khusus Kapal-Kapal *Offshore* untuk muatan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir migas dalam pengoperasiannya, dapat menggunakan kapal berbendera asing hanya sampai dengan 7 Mei 2011.

Namun dengan Peraturan Pemerintah Nomor PP.22 Tahun 2011 sebagai Revisi Amanat Peraturan Pemerintah Nomor PP. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan dan mengingat sampai dengan batas waktu 7 Mei 2011 belum tersedianya kapal-kapal *offshore* jenis tertentu berbendera Indonesia, maka diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.48 Tahun 2011 tentang kapal Asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia.

- 4) Peningkatan kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor dalam rangka meningkatkan kelancaran arus barang ekspor dan impor maka Pemerintah melaksanakan pembangunan dan pengembangan *National Single Window* (NSW) di Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:
 - (a) Penyusunan *Blueprint* dan *Roadmap* Pengembangan Sistem Inaportnet;
 - (b) Monitoring dan Evaluasi;
 - (c) Sosialisasi *Blueprint* di 4 (empat) lokasi, yaitu: Surabaya, Jakarta, Medan dan Semarang.



KOMPONEN NATIONAL SINGLE WINDOW



Sumber : Dit. LALA Ditjen Hubla 2011

Gambar II-1. Komponen National Single Window

5) Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut di Daerah Terpencil

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi laut ke daerah-daerah terpencil, sampai dengan tahun 2011 angkutan laut perintis telah melayani:

Tabel II-5. Peningkatan Pelayanan Transportasi Laut di Daerah Terpencil

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Alokasi Dana	Rp. 279 Milyar
2.	Jumlah Trayek, Pelabuhan Pangkal dan Pelabuhan Singgah	61 Trayek, 61 pelabuhan Pangkal dan 472 pelabuhan Singgah
3.	Wilayah provinsi dan Penempatan Kapal : - Kawasan Barat Indonesia (KBI) - Kawasan Timur Indonesia (KTI)	8 Provinsi (NAD, Sumbar, Bengkulu, Kepri, Kalbar, Kalteng, Kalsel & Jatim) dan 11 Kapal 11 Provinsi (Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua & Irija) dan 50 Kapal



Jaringan Trayek Perintis Tahun 2011



Sumber : Dit. LALA Ditjen Hubla 2011

Gambar II-2. Jaringan Trayek Perintis Tahun 2011

Jaringan Trayek Angkutan Laut PT. Pelnindo Tahun 2011



Sumber: Dit. LALA Ditjen Hubla 2011

Gambar II-3. Jaringan Trayek Angkutan Laut PT. Pelnindo Tahun 2011



Sumber: Dit. LALA Ditjen Hubla 2011

Gambar II-4. Jaringan Trayek Angkutan Laut Penumpang PT. Pelni

6) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Services Obligation/PSO*) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi.

Untuk melaksanakan kewajiban pelayanan umum *Public Services Obligation/PSO*) Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Tahun 2011 PT. PELNI telah mengusulkan dan mengalokasikan dana sebesar Rp. 900,8 Milyar dengan melayani sebanyak 95 pelabuhan singgah.

Tabel II-6. Usulan, Anggaran Dan Realisasi Kewajiban Pelayanan Umum (PUBLIC SERVICES OBLIGATION/ PSO)

(dalam milyar rupiah)

NO	TAHUN	USULAN	DISETUJUI			REALISASI
			APBN	APBN-P	TOTAL	
1	2008	986	850	-	850	790
2	2009	837	600	-	600	600
3	2010	869	600	-	600	600
4	2011	900,8	872	-	872	800

Sumber : Dit. LALA Ditjen Hubla 2011



b. Bidang Pembangunan

Pembangunan kapal Perintis lanjutan (*multiyears* 2010-2011) masing-masing 1 unit kapal type 500 DWT dan 1 unit kapal type 750 DWT (kondisi 100%) dan 3 unit kapal type 1.200 GT (kondisi 100%).



Sumber : Dit. LALA Ditjen Hubla 2011

Gambar II-5. Peresmian Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 30 di Tanjung Pinang Tanggal 9 Januari 2012

Dengan telah dibangunnya kapal perintis maka posisi pelayanan angkutan laut perintis adalah sebagai berikut :

Tabel II-7. Realisasi Pelaksanaan Pelayaran Perintis

REALISASI PELAKSANAAN PELAYARAN PERINTIS TA. 2008 S.D TA. 2011					
NO.	URAIAN	PERIODE			
		TA. 2008	TA. 2009	TA. 2010	TA. 2011
1.	DANA DIPA	Rp 206.740.000.000	Rp.266.597.680.000	Rp 273.987.309.000	Rp 280.565.604.000
	- REALISASI	Rp 193.135.771.691	Rp 265.800.144.000	Rp 256.775.117.384	Rp 228.961.900.780
	- SISA DIPA	Rp 740.000.000	Rp 797.536	Rp 17.212.191.606	Rp 51.603.703.220
2.	KAPAL	56 Kpl = 32.100 DWT	58 Kpl = 33.350DWT	60 Kpl = 34.350 DWT	61 Kpl = 33.200 DWT
3.	PELABUHAN				
	- PANGKAL	29	30	30	30
	- SINGGAH	418	423	424	433
4.	FREKUENSI	1.358 Voy	1.290 Voy	1.415 Voy	1.420 Voy
5.	PENEMPATAN KAPAL				
	- KAWASAN BRT IND	11 Kpl (19,6%)	11 Kpl (19%)	11 Kpl (18%)	11 Kpl (18%)
	- KAWASAN TIMUR IND	45 Kpl (80,4%)	47 Kpl (81%)	49 Kpl (82%)	50 Kpl (82%)



REALISASI PELAKSANAAN PELAYARAN PERINTIS TA. 2008 S.D TA. 2011					
NO.	URAIAN	PERIODE			
		TA. 2008	TA. 2009	TA. 2010	TA. 2011
6.	PELAKSANA :				
	- KAPAL NEGARA	20	22	23	25
	- KAPAL SWASTA	36	36	37	35
7.	Hr.OpS REALISASI TARGET (%)	19.500 hr : 20.440 hr : (95,40%)	20.000 hr : 20.500 hr : (97,56%)	17.638 hr : 21.900 hr : (95,34%)	20.203 hr : 22.265 hr : (90,74%)
8.	HARI KEKOSONGAN	940 hr	815 hr	1.362 hr	2.062 hr
	- NOR	150 hr	115 hr	162 hr	1.262 hr
	- KERUSAKAN	790 hr	700 hr	1.200 hr	800 hr
9.	REALISASI ANGKUTAN				
	- BARANG (TON)	203.175	250.321	275.353	276.612
	- PENUMPANG (ORG)	460.148	554.067	609.000	629.847
10.	PENDAPATAN	Rp 14.812.496.575	Rp 15.800.000.000	Rp 17.300.000.000	Rp 19.103.390.129
	- BARANG (TON)	Rp 6.088.062.252	Rp 7.800.000.000	Rp 8.500.000.000	Rp 9.022.915.861
	- PENUMPANG (ORG)	Rp 8.724.434.323	Rp 8.000.000.000	Rp 8.800.000.000	Rp 10.080.474.268
11.	DAYA SERAP				
	- FISIK	96.10%	97.45%	95.34%	82.00%
	- KEUANGAN	93.10%	99.56%	94.03%	81.61%

3. Permasalahan

a. Pelaksanaan Asas *Cabotage* :

- 1) Belum optimalnya dukungan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya dalam memberikan pinjaman/kredit bagi pengembangan dan peremajaan armada niaga nasional relatif terbatas dikarenakan belum terwujudnya secara efektif kontrak jangka panjang antara pemilik barang dengan perusahaan pelayaran nasional yang akan digunakan sebagai jaminan mendapatkan pendanaan dari perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya.



- 2) Insentif pajak yang masih kurang bagi pemberdayaan industri pelayaran dan industri perkapalan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No.5/2005 dan UU No.17/ 2008.
- 3) Kurangnya kesiapan industri galangan kapal nasional untuk membangun kapal-kapal baru yang dibutuhkan dan masih banyaknya mekanisme Impor Kapal Bekas sebagai berikut:
 - a) Pembatasan umur kapal (pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian);
 - b) Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - c) Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN).
- 4) Belum dimilikinya Kapal-kapal *offshore* jenis tertentu yang umumnya berteknologi tinggi dan membutuhkan modal yang besar untuk pengadaannya oleh perusahaan angkutan laut nasional/ belum tersedia kapal berbendera Indonesia (antara lain: 3D *seismic vessel*, *drilling*, *pipe/cable laying ship* dan *jack up rig*, dll).

b. Pelaksanaan National Single Window (NSW)

- 1) Belum adanya regulasi berupa Peraturan Menteri atau lebih tinggi yang berisi kewajiban bagi user dan instansi terkait untuk menggunakan *Inaportnet*.
- 2) Belum ada Unit Kerja yang Khusus menangani *Inaportnet* di Kantor Pusat maupun di Kantor Otoritas Pelabuhan/ Adpel.
- 3) Adanya perubahan struktur organisasi di pelabuhan yang sebelumnya Kantor Adpel sekarang menjadi Kantor Syahbandar dan Kantor Otoritas Pelabuhan.
- 4) Belum memadainya Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dengan latar belakang pendidikan Teknologi Informasi (TI) yang di tempatkan di Kantor



Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak, dan Adpel Tanjung Emas (melakukan *maintenance*, *backup system*, dll).

- 5) Pengelolaan data center di kantor pusat masih bersifat Ad-hoc, belum ada pihak yang ditunjuk resmi untuk mengelola *data center* tersebut. Hal ini disebabkan jumlah SDM yang terbatas dan belum ada kebijakan yang mengatur terkait pengelolaan data center tersebut.
- 6) Pembayaran sewa *leased line*/ jaringan untuk ke-4 pelabuhan yang wajib dibayarkan tiap tahun agar tidak terputus/ terkoneksi yang dapat mengakibatkan kelancaran pelayanan kapal di pelabuhan menjadi tersendat (belum masuk ke anggaran rutin yang dibayarkan secara *multiyears*).
- 7) Beberapa daerah mengalami gangguan listrik (sering terjadi listrik padam, daya listrik kurang).

c. Pelaksanaan Angkutan Laut Perintis

- 1) Belum optimalnya kegiatan operasional angkutan laut perintis dikarenakan terjadinya kekosongan hari operasional (tidak mencapai 365 hari) dengan penyebab sebagai berikut: *Notice Of Readiness* (NOR) tidak tepat 1 Januari (NOR terlambat) dan kerusakan kapal.
- 2) Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan laut, diperlukan kapal-kapal perintis dengan tipe coaster yang sesuai untuk angkutan penumpang dan barang.
- 3) Ketepatan terhadap trayek sering tidak terpenuhi sehingga pengguna jasa pelayanan perintis mengalami kesulitan dalam mensinkronisasikan kegiatannya. Hal ini disebabkan oleh *force majeure* dan kondisi kapal.



4. Upaya Mengatasi Permasalahan

a. Pelaksanaan Asas *Cabotage*

- 1) Menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi industri pelayaran nasional untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dan memfasilitasi terwujudnya kontrak jangka panjang antara pemilik barang dengan perusahaan pelayaran nasional sebagai jaminan mendapatkan pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan/pembiayaan lainnya;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dukungan fasilitas perpajakan yang berpihak terhadap pengembangan usaha perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan galangan nasional;
- 3) Melakukan upaya koordinasi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pangsa muatan pelayaran nasional untuk angkutan laut luar negeri, antara lain mengupayakan perubahan *term of trade* untuk komoditi-komoditi tertentu secara bertahap untuk angkutan laut ekspor dan impor setelah pemberlakuan azas *cabotage* untuk angkutan laut dalam negeri berhasil dilaksanakan;
- 4) Mengintensifkan koordinasi dan sosialisasi peraturan pelaksanaan asas *Cabotage* kepada perbankan/ kreditur dan pemilik muatan/*end-users* serta *stakeholders* lainnya khususnya **untuk penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi** sampai batas akhir pemberlakuan azas *cabotage* sepenuhnya pada tahun 2015.

b. Pelaksanaan *National Single Window (NSW)*

- 1) Diperlukan regulasi setidaknya berupa Peraturan Menteri yang mengatur penggunaan sistem *Inaportnet*, Peraturan Menteri Perhubungan harus mengacu kepada Perpres No.10 Tahun 2008 terkait penggunaan *Portal INSW* yang saat ini sedang direvisi dan diharapkan dapat di koordinasikan oleh Biro Hukum;



- 2) Perlu dibentuk Unit Kerja Pengelola, baik di Kantor Pusat Ditjen Hubla maupun di kantor UPT, OP dan Adpel yang dapat menyusun dan menentukan arah kebijakan pengembangan serta secara langsung menangani/mengelola sistem *Inaportnet* dalam rangka mendukung penerapan *National Single Window (NSW)* di Indonesia. Sesjen Kemenhub/ Ditjen Hubla/ Ditjen Hubud membentuk Unit Pengelola *Inaportnet* baik di kantor Pusat maupun di UPT Pembentukan Unit Pengelola dilakukan secara bertahap dimana pada tahap awal akan dibentuk Gugus Tugas *Ad-Hoc (Task Force)* yang akan bekerjasama dengan konsultan/mitra (*Outsourcing*);
- 3) Perlu segera dilakukan pembahasan mengenai SISPRO dan SLA sistem *Inaportnet* karena adanya perubahan struktur organisasi, diusulkan untuk dibuatkan SK Menhub terhadap penggunaan Sistem *Inaportnet* kedepan. Diharapkan dapat di koordinasikan oleh Bagian Hukum dan Ditlala serta Kantor OP/ Adpel dan Pelindo;
- 4) Perlu adanya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk operator khususnya dengan latar belakang pendidikan Teknologi Informasi (TI) yang ditempatkan di Dit Lala, Kantor OP Tanjung Priok, Belawan, Tanjung Perak dan Adpel Tanjung Emas;
- 5) Kebutuhan akan kebijakan yang mengatur masalah pengelolaan ruang data center beserta pihak yang bertanggung jawab atas *data center* tersebut. Perlunya revitalisasi ruang *data center* dengan mengacu pada standar internasional;
- 6) Perlu dibicarakan/ dikoordinasikan mengenai pembayaran sewa *leased line/ jaringan* untuk ke 4 (empat) pelabuhan yang wajib dibayarkan tiap tahun agar tidak terputus/ terkoneksi yang dapat mengakibatkan kelancaran pelayanan kapal di pelabuhan menjadi tersendat. Untuk itu diusulkan dapat dianggarkan tiap tahun dengan mekanisme pembayaran secara *multiyears* yang



dimasukkan dalam anggaran rutin kantor pusat melalui Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- 7) Perlu adanya generator (genset) untuk menunjang infrastruktur di 4 (empat) pelabuhan dimaksud yang sering terkendala dengan *supply* listrik, sehingga peralatan yang telah diadakan tidak mudah rusak dan jaringan sistem *Inaportnet* tidak terganggu dengan kendala *supply* listrik di pelabuhan tersebut. Perlu disediakan anggaran rutin untuk kebutuhan di kantor Otoritas Pelabuhan dan Adpel.

c. Angkutan Laut Perintis

- 1) Melaksanakan pelelangan tidak mengikat mendahului terbitnya DIPA serta memberikan pembekalan secara berkelanjutan kepada pengelola kegiatan angkutan laut perintis sehingga diharapkan keterlambatan *Notice Of Readiness* (NOR) akibat permasalahan dalam proses pelelangan dapat dihindari;
- 2) Membangun beberapa kapal perintis dengan tipe dan jenis yang sesuai untuk angkutan penumpang dan barang sesuai dengan kebutuhan daerah;
- 3) Meningkatkan pengawasan melalui kegiatan monitoring angkutan laut perintis baik dengan cara survei ke lapangan maupun *tracking system* sehingga diperoleh informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal ketidak capaian trayek pelayaran perintis.



B. DIREKTORAT PELABUHAN DAN Pengerukan

1. Program Kerja

a. Kegiatan pemerintahan dan Operasional

- 1) Pemutakhiran data Rencana Induk Pelabuhan Tahun 2011;
- 2) Penyusunan Draft Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan TKN (Tatanan Kepelabuhanan Nasional);
- 3) Evaluasi Rencana Induk Pelabuhan;
- 4) Menetapkan Standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan;
- 5) Menetapkan Standar harga satuan kerja keruk;
- 6) Memproses Izin Penetapan lokasi terminal khusus;
- 7) Monitoring pembangunan fasilitas pelabuhan;
- 8) Memproses dan merekomendasikan desain pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan;
- 9) Menyiapkan rekomendasi/ persetujuan izin kerja keruk dan/atau reklamasi
- 10) Menyiapkan persetujuan gambar desain alur dan RKS pekerjaan pengerukan;
- 11) Penetapan Perairan Pandu di Lokasi UPT/Kanpel;
- 12) Evaluasi hasil penilikan kecelakaan kapal akibat pemanduan;
- 13) Pembinaan Pelayanan Pemanduan di Perairan Pandu;
- 14) Penyuluhan petugas pandu dalam rangka pemanduan dan penundaan Kapal;
- 15) Evaluasi pelayanan sarana dan prasarana pemanduan;
- 16) Mengevaluasi kinerja pelayanan operasional pelabuhan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia;
- 17) Pembinaan teknis operasional unit penyelenggara pelabuhan;
- 18) Penetapan operasional kegiatan 24 jam untuk pelabuhan khusus;
- 19) Evaluasi kegiatan pelabuhan pada Terminal Khusus;



- 20) Mengevaluasi usulan penetapan kemampuan fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang secara konvensional menjadi fasilitas pelabuhan untuk melayani peti kemas, curah cair dan curah kering;
- 21) Melakukan evaluasi sistem dan prosedur pelayanan kapal, barang dan penumpang sebagai tindak lanjut dari KM 21 Tahun 2007;
- 22) Evaluasi kegiatan pelabuhan pada terminal khusus Tahun Anggaran 2011;
- 23) Evaluasi permohonan izin pengoperasian Tersus/TUKS;
- 24) Evaluasi permohonan izin pengelolaan BUP;
- 25) Monitoring pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang dilaksanakan oleh BUMN/ Swasta berdasarkan SIKK dan SIKR;
- 26) Monitoring dan pengendalian teknis pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan.

b. Kegiatan Pembangunan

- 1) Studi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP);
- 2) Pembinaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang berwawasan lingkungan (*ecoport*);
- 3) Pembinaan updating data operasional;
- 4) Pembinaan UPP dalam rangka data base kepelabuhanan;
- 5) Pembinaan data dan informasi kepelabuhanan;
- 6) Pelaksanaan Studi di bidang SID Sedimentasi dan SID alur pelayaran/ kolam pelabuhan.

2. Realisasi Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan dan Operasional

- 1) Telah dilaksanakan pemutakhiran data pelabuhan TA. 2011 yang direncanakan sebanyak 7 (tujuh) lokasi, namun hanya dapat terealisasi 5 (lima) lokasi pelabuhan yaitu Pelabuhan Tanjung Laut, Namlea, Tahuna,



Banggai, Manggar sedangkan 2 lokasi yang tidak terealisasi yaitu: Pelabuhan Tanah Grogot dan Pelabuhan Batu Licin.

- 2) Penyusunan Draft Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan TKN (Tatanan Kepelabuhanan Nasional) sedang dalam persiapan proses finalisasi dan sosialisasi kepada *Stakeholder* serta Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota.
- 3) Rencana Induk Pelabuhan yang telah ditetapkan sebanyak 24 (dua Puluh empat) lokasi yaitu Dumai, Kuala Enok, Bengkulu, Pangkal Balam, Anggrek, Tg. Priok, Tg. Perak, Makasar, Palembang, Linau, Bojonegara, Tenau Kupang, Batu Licin, Lhoktuan, Samarinda, Maloy/Sangkulirang, Bitung, Batam, Teluk Bayur, Jambi Muara Sabak, Jambi Kuala tungkal, Jambi Talang Duku, Panjang, Palopo.
- 4) Telah dibuat Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/38/18/DJPL-11.
- 5) Telah terealisasi standar harga satuan kerja keruk dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Biaya Kementerian Perhubungan Nomor **PM.83 Tahun 2011 tanggal 7 Oktober 2011**.
- 6) Memproses izin penetapan lokasi terminal khusus terdapat 79 lokasi, dan telah diterima 64 permohonan ijin penetapan lokasi tersus selama tahun 2011. Dari jumlah tersebut telah diterbitkan 36 rekomendasi Dirjen Hubla untuk ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Sementara sisanya belum dapat diproses lanjut karena belum melengkapi seluruh persyaratan sesuai PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri.



- 7) Monitoring pembangunan fasilitas pelabuhan telah terealisasi 16 lokasi antara lain: Satker Panurukan, Adpel Bitung, UPP Kotabunan, UPP Brondong, UPP Labuha, UPP Laiwui, Satker Pulang Pisau, Satker Palahari, UPP Daruba, UPP Buli, Adpel Pare-pare, UPP Polewali, UPP Langara, UPP Kolaka, Satker Budong-budong dan Adpel Ambon.
- 8) Terealisasi desain pembangunan fasilitas pelabuhan dan rehabilitasi yang dibiayai dana reguler sebanyak 206 (dua ratus enam) lokasi.
- 9) Telah diterbitkan rekomendasi/ persetujuan izin kerja keruk dan/atau reklamasi terhadap 17 (tujuh belas) pemohon yang terdiri dari 15 (lima belas) perusahaan dan 2 (dua) Adpel yaitu Gresik dan Probolinggo.
- 10) Telah diproses persetujuan gambar desain dan RKS pekerjaan alur untuk 18 (delapan belas) lokasi pelabuhan yaitu: Talang Dukuh, Palembang, Batang, Juwana, Brondong, Benoa, Labuhan Lombok, Pulang Pisau, Sampit, Pontianak, Samarinda, Tanjung Redeb, Jenepono, Tahuna, Manado, Namlea, Ternate, Teminabuan.
- 11) Telah dilaksanakan Peninjauan Penetapan Perairan Pandu di Lokasi UPT/ Kanpel pada 5 (lima) lokasi yaitu: Sungai Nyamuk, Kolonedale, Pomalaa, Malili, Pomako.
- 12) Evaluasi hasil penilaian kecelakaan kapal akibat pemanduan terealisasi 10 (sepuluh) lokasi yang telah mendapatkan izin pelimpahan pelaksanaan dan pengelolaan pemanduan yaitu: Merak, Tanjung Perak, Palembang, Bitung, Samarinda, Jayapura, Jambi, Tanjung Priok, Panjang, dan Pekanbaru.
- 13) Pembinaan Pelayanan Pemanduan di Perairan Pandu terealisasi pada 10 (sepuluh) lokasi Pelayanan Pemanduan yang telah mendapatkan izin pelimpahan pelaksanaan dan pengelolaan pemanduan antara lain Pulau



Bunyu, Tanjung Santan, Nusa Penida, Lhoktuan, Tanah Grogot, Tarempa, Brondong, Tanjung Laut, Batam dan Pulau Sambu.



Sumber : Dit. PELPENG Ditjen Hubla 2011

Gambar : Il-6. Pembinaan Pelayanan Pemanduan di Lokasi Batam

- 14) Penyuluhan petugas pandu dalam rangka pemanduan dan penundaan Kapal telah dilaksanakan di 10 (sepuluh) lokasi Pelayanan Pemanduan Tersus yang telah mendapatkan izin pelimpahan pelaksanaan dan pengelolaan pemanduannya antara lain Kalbut, Palembang, Sungai Pakning, Kuala Tanjung, Pangkalan Susu, Bintuni, Muara Sabak, Kuala Samboja, Muntok dan Banten.
- 15) Evaluasi pelayanan sarana dan prasarana pemanduan telah dilaksanakan pada 10 (sepuluh) lokasi pelayanan pemanduan BUP yang telah mendapatkan izin pelimpahan pelaksanaan dan pengelolaan pemanduannya yaitu: Belawan, Tanjung Uban, Palembang, Teluk Bayur, Pontianak, Kendari, Mekar Putih, Tarakan, Sampit, Biringkassi.
- 16) Mengevaluasi kinerja pelayanan operasional pelabuhan pada pelabuhan yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Pelabuhan Indonesia telah dilaksanakan pada 13 (tigabelas) lokasi oleh PT. Pelindo I (Persero) cabang Belawan, Pekan baru, Dumai. PT. Pelindo II (Persero) cabang Palembang, Pontianak, Teluk Bayur. PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Perak,



Banjarmasin, Tanjung Emas. PT. Pelindo IV (Persero) cabang Makassar, Bitung, Ambon, Jayapura.

- 17) Telah dilaksanakan Pembinaan teknis operasional unit penyelenggara pelabuhan pada 15 (lima belas) lokasi pelabuhan antara lain : Likupang, Bau-Bau, Selayar, Parigi, Labuhan Uki, Belang-Belang, Siwa, Belang, Bringkassi, Teminabuan, Tobelo, Waisarisa, Tulehu, Nabire, Pomako.
- 18) Telah dilaksanakan usulan penetapan pelabuhan untuk operasional kegiatan 24 jam untuk pelabuhan khusus yaitu: PT. Trubaindo Coal Mining, PT. Kideco Jaya Agung, PT. Trans Pasific, PT. Pribumi Cipta Megah, PT. Pertamina cabang Brondong dan PT. Marinda Grahamineral.
- 19) Evaluasi kegiatan pelabuhan pada Terminal Khusus telah dilaksanakan sebanyak 9 (Sembilan) lokasi pelabuhan yaitu : Kota Agung, Kalbut, Kintap, Seibuku, Tanjung Santan, Tanah Grogot, Tahuna, Laiwui, Buli.
- 20) Mengevaluasi usulan penetapan kemampuan fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang secara konvensional menjadi fasilitas pelabuhan untuk melayani peti kemas, curah cair dan curah kering.

Pelabuhan yang melayani fasilitas curah kering ada 2 perusahaan yaitu: PT. Pelindo II cabang Panjang dan PT. Pelindo II cabang Bengkulu, sedangkan untuk pelabuhan yang melayani fasilitas peti kemas dan curah cair tidak ada yang perusahaan yang mengajukan permohonan.
- 21) Melakukan evaluasi sistem dan prosedur pelayanan kapal, barang dan penumpang sebagai tindak lanjut dari KM 21 Tahun 2007, yang telah terealisasi terdiri dari 12 (dua belas) lokasi Pelabuhan yaitu: Kuala Gaung, Dabo Singkep, Langara, Pomalaa, Luwuk, Kolonodale, Anggrek, Tahuna, Labuhan Bajo, Amamapare, Nabire, Buli.



- 22) Evaluasi kegiatan pelabuhan pada terminal khusus Tahun Anggaran 2011 telah dilaksanakan pada 9 (sembilan) lokasi pelabuhan antara lain : Kota Agung, Kalbut, Kintap, Sei Buku, Tanjung Santan, Tanah Grogot, Tahuna, Laiwui, Buli.
- 23) Evaluasi permohonan izin pengoperasian Tersus/TUKS:
 - a) Terdapat 60 (enam puluh) perusahaan yang mengajukan permohonan izin pengoperasian tersus, dan yang telah mendapatkan izin pengoperasian ada 5 (lima) pemohon, sedangkan yang masih dalam proses penetapan ada 25 (dua puluh lima) pemohon dan 30 (tiga puluh) permohonannya dikembalikan untuk dilengkapi persyaratannya;
 - b) Terdapat 92 (sembilan puluh dua) perusahaan yang mengajukan permohonan izin pengelolaan TUKS, yang telah mendapatkan izin pengelolaan ada 8 pemohon, sedangkan yang masih dalam proses penetapan ada 27 (dua puluh tujuh) pemohon dan 57 (lima puluh tujuh) permohonannya dikembalikan untuk dilengkapi persyaratannya;
- 24) Telah dilakukan evaluasi dengan hasil: terdapat 75 (tujuh puluh lima) perusahaan yang mendapatkan izin permohonan pengelolaan BUP.
- 25) Monitoring pekerjaan pengerukan dan reklamasi yang dilaksanakan oleh BUMN/Swasta berdasarkan SIKK dan SIKR telah dilaksanakan pada 10 (sepuluh) lokasi diantaranya yaitu :
 - a) Jawa Timur – PT. Dok Pantai Lamongan, PT. Trimuda Adipradana;
 - b) Kep. Riau Batam – PT. Batam Sentralindo, PT. Nipon Steel Batam Offshore Service, PT. Saipem Indonesia;
 - c) Lampung – PT. Teluk Wisata Lamongan, PT. Kurnia Agro Industri;
 - d) Kaltim – PT. Istana Putra Agung, PT. Surya Saksi Darma K;
 - e) Bengkulu – PT. Injatama.
- 26) Monitoring dan pengendalian teknis pengerukan alur pelayaran/kolam pelabuhan telah selesai dilaksanakan untuk 18 (delapan belas) lokasi pelabuhan yaitu Talang duku, Palembang, Juwana, Batang, Brondong,



Benoa, Lombok, Pontianak, Sampit, Pulang Pisau, Samarinda, Jenepono, Namlea, Ternate, Teminabuan, Tanjung Redep, Adpel Manado, Tahuna.

b. Bidang Pembangunan

- (1) Studi penyusunan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) pada tahun 2011 terealisasi 7 (tujuh) lokasi yaitu: Pelabuhan Selat Panjang, Larantuka, Nipah Panjang, Tanjung Intan, Garongkong, Waingapu dan Nunukan.
- (2) Pembinaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan pelabuhan yang berwawasan lingkungan (*ecoport*) berupa sosialisasi *Ecoport* yang dilaksanakan pada 5 (lima) lokasi yaitu Pelabuhan Tanah Grogot, Selayar, Rembang, Adpel Gresik serta Adpel Tanjung Intan.



Sumber : Dit. PELPENG Ditjen Hubla 2011

Gambar II-7. Pembinaan Ecoport di Adpel Gresik

- (3) Pembinaan updating data operasional direalisasikan pada 8 (delapan) lokasi, meliputi Tanjung Emas, Benoa, Tanjung Perak, Palembang, Teluk Bayur, Balikpapan, Banjarmasin dan Dumai.
- (4) Pembinaan UPP dalam rangka data base kepelabuhanan terealisasi 7 (tujuh) lokasi yaitu Pelabuhan Pamanukan, Rembang, Bau-Bau, Batam, Kalbut, Tulehu dan Nusa Penida.
- (5) Pembinaan data dan informasi kepelabuhanan terealisasi 18 (delapan belas) lokasi pelabuhan yaitu: Pelabuhan Namlea, Lembar, Banjarmasin, Dumai, Makassar, Bitung, Jayapura, Tanjung Emas, Pantoloan, Tanjung Intan,



Malahayati, Ternate, Pontianak, Belawan, Ende, Sorong, Awarange, dan Tual.

- (6) Telah dilaksanakan **SID Sedimentasi** di 4 (empat) lokasi yaitu Samarinda, Pontianak, Palembang dan Sampit.

Sedangkan untuk **SID alur pelayaran/kolam pelabuhan** telah dilaksanakan pada 7 (tujuh) lokasi antara lain : Bima, Merauke, Kaimana, Atapupu, Susoh, Paloh dan Kolonedale.

3. Permasalahan

- a. Rencana Induk Pelabuhan Batu Licin ditetapkan pada tahun 2007 sehingga belum diperlukan pemutakhiran data rencana induk pelabuhan, sedangkan untuk pelabuhan Tanah Grogot terdapat surat dari Kementerian Kehutanan mengenai adanya kawasan konservasi di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan Tanah Grogot sehingga pemutakhiran data terkait rencana induk pelabuhan Tanah Grogot belum dilaksanakan.
- b. Direncanakan desain pembangunan fasilitas pelabuhan dan yang dibiayai Dana Reguler sebanyak 209 (dua ratus sembilan) lokasi pelabuhan, diantaranya 206 (dua ratus enam) lokasi yang telah terealisasi sedangkan 3 lokasi tidak terealisasi yaitu Muko-Muko, Serasan, dan Seluan karena permasalahan sanggah banding, kekurangan dana pembangunan serta kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait.
- c. Untuk permohonan perijinan terlalu lama waktu untuk memproses karena dari pihak pemohon tidak segera melengkapi kekurangan persyaratan.
- d. Dalam penyusunan standar dan pedoman teknis menghadapi permasalahan kekurangan SDM yang kompeten.
- e. Dalam satu tahun anggaran, dana yang tersedia untuk kegiatan serah terima hasil pembangunan fasilitas pelabuhan tidak dapat mengakomodir dan harus melibatkan berbagai pihak.



4. Upaya Mengatasi Permasalahan

- a. Dalam mengevaluasi dan peninjauan harus terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar tidak terjadi kerancuan data;
- b. Mengevaluasi secara cermat Rencana Anggaran Biaya Pembangunan dan memberi masukan dalam pembahasan, sehingga pembangunan dapat selesai dengan cepat dan proses pelelangan harus sesuai dengan Pepres Nomor 35 Tahun 2011 selanjutnya pada proses perencanaan dan pengalokasian anggaran direncanakan dan dilaksanakan secara matang dan terukur serta saling kerjasama antara pihak terkait;
- c. Pihak pemproses mengkoordinasi pihak pemohon untuk segera melengkapi kekurangan persyaratan yang dimaksud;
- d. Dalam penyusunan standar dan pedoman teknis, selanjutnya dianggarkan pada TA 2012 untuk disusun oleh konsultan atau pembentukan tim;
- e. Menyusun Rencana Anggaran Biaya dengan tepat untuk terealiasinya serah terima di setiap lokasi dan melibatkan pihak terkait agar dapat terealisasi dan terakomodir.



C. DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN

1. Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan dan Operasional

- 1) Mengusulkan RPM tentang Garis muat kapal.
- 2) Mengusulkan RPM tentang pengesahan gambar kapal dan pengawasan pembangunan kapal.
- 3) Mengusulkan RPM tentang pemuatan kapal.
- 4) Mengusulkan kegiatan pembinaan penilaian kondisi teknis kapal Marine Surveyor.
- 5) Monitoring pembahasan RPM tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.
- 6) Monitoring Revisi RPM tentang Pengukuran Kapal.
- 7) Monitoring draft RPP tentang Hipotek Kapal.
- 8) Monitoring dan pengumpulan data pendaftaran dan kebangsaan kapal.
- 9) Mengusulkan kegiatan pembinaan teknis pengukuran kapal.
- 10) Mengusulkan kegiatan pembinaan teknis pendaftaran dan kebangsaan kapal.
- 11) Mengusulkan kegiatan pembinaan pemberlakuan sertifikat kapal non konvensional.
- 12) Mengusulkan pembahasan RPM tentang Keselamatan Kapal.
- 13) Mengusulkan penyegaran peningkatan kualitas tenaga Marine Inspector "A".
- 14) Mengusulkan penyegaran peningkatan kualitas tenaga Marine Inspector "B".
- 15) Melaksanakan uji petik kelaiklautan kapal.
- 16) Melanjutkan pembahasan draft RPM Pencegahan Pencemaran dari Kapal dan RPM Manajemen Keselamatan Kapal.
- 17) Melanjutkan rencana ratifikasi Annex III s/d VI MARPOL 73/78.



- 18) Mengusulkan kegiatan temu teknis kelaiklautan kapal.
- 19) Mengusulkan kegiatan Workshop Marpol 73/78.
- 20) Melanjutkan pembahasan konsep Peraturan Pemerintah tentang kepelautan dan fasilitas kesehatan penumpang.
- 21) Finalisasi PP tentang Implementasi *Seafarer's Identification Document* (SID) dan sebagai bahan implementasi SID.
- 22) Melanjutkan pembahasan revisi Kepmenhub nomor 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal niaga.
- 23) Menyusun ratifikasi MLC 2006 (ratifikasi peraturan-peraturan ILO) bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 24) Mengusulkan Audit Lembaga Diklat Kepelautan.
- 25) Mengusulkan pembinaan Sea-Trial dan perhitungan garis muat kapal.
- 26) Melaksanakan evaluasi laporan PNBPU PUP jasa Perkapalan dari UPT.
- 27) Mengusulkan pembinaan PNBPU PUP di UPT.

2. Realisasi Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan dan Operasional

- 1) Telah di bahas draft RPM tentang Garis muat kapal.
- 2) Telah di bahas draft RPM tentang pengesahan gambar kapal.
- 3) Telah di bahas draft RPM tentang pemuatan kapal.
- 4) Telah dilaksanakan pembinaan penilaian kondisi teknis kapal Marine Surveyor pada 8 lokasi yaitu Bengkulu, Jambi, Panjang, Cirebon, Labuhan, Cilacap, Pontianak dan Ketapang.
- 5) Telah selesai dilaksanakan pembahasan Draft RPM tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal di Biro Hukum Kementerian Perhubungan.



- 6) Draft RPM tentang Pengukuran Kapal telah selesai dibahas ditingkat Ditjen Hubla dan saat ini dalam proses pembahasan di Biro Hukum Kementerian Perhubungan.
- 7) Ikut serta dalam pembahasan draft RUU tentang hipotek kapal di Kementerian Hukum dan HAM.
- 8) Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Pengumpulan Data Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal di Wisma Primkokarmar, Cipayung, Bogor pada tanggal 28 s.d 30 November 2011 yang diikuti oleh 20 lokasi/UPT.



Sumber : Dit. KAPPEL Ditjen Hubla 2011

Gambar II-8. Monitoring & Pengumpulan Data Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

- 9) Telah dilaksanakan pembinaan teknis Pengukuran Kapal di 18 lokasi/UPT yang mempunyai kewenangan pengukuran kapal yaitu Bengkulu, Biak, Bima, Kendari, Kupang, Sabang, Dumai, Teluk Bayur, Panjang, Cirebon, Gresik, Sampit, Tegal, Banyuwangi, Pekanbaru, Tarakan, Indramayu dan Jayapura.
- 10) Telah dilaksanakan pembinaan teknis Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal di 8 lokasi/UPT yang mempunyai kewenangan sebagai tempat yang ditunjuk untuk melakukan Pendaftaran Kapal yaitu Bena, Ternate, Banjarmasin, Belawan, Sorong, Kupang, Kendari dan Batam.



- 11) Telah dilaksanakan konsolidasi pemberlakuan sertifikat kapal non konvensional di Makasar.
- 12) Monitoring pembahasan RPM tentang Keselamatan Kapal
- 13) Telah dilaksanakan penyegaran peningkatan kualitas tenaga Marine Inspector "A" dalam rangka pengukuhan Angkatan VII pada tanggal 25 s.d 29 April 2011 di Hotel Grand Menteng Jakarta.



Sumber : Dit. KAPPEL Ditjen Hubla 2011

Gambar II-9. Penyegaran Marine Inspector "A" angkatan VII

- 14) Telah dilaksanakan penyegaran peningkatan kualitas tenaga Marine Inspector "B" dalam rangka pengukuhan Angkatan V pada tanggal 23 s.d 27 Mei 2011 di Hotel Losari Roxy Jakarta.



Sumber : Dit. KAPPEL Ditjen Hubla 2011

Gambar II-10. Penyegaran Marine Inspector "B" Angkatan V

- 15) Telah dilaksanakan uji petik kelaiklautan kapal di Sampit, Kumai, Batam dan Pare-Pare.



- 16) Telah dilaksanakan pembahasan Draft RPM Pencegahan Pencemaran dari Kapal dan RPM Manajemen Keselamatan Kapal dan masih berlanjut.
- 17) Telah dilaksanakan rapat persiapan ratifikasi MARPOL Annex III s.d VI antar Kementerian dan saat ini menunggu diterbitkannya Kepres tentang Ratifikasi Annex III s/d VI Marpol 73/78.
- 18) Telah dilaksanakan temu teknis bidang kelaiklautan kapal bertempat di Hotel Ibis Tamarin Jakarta pada tanggal 21 s.d 22 Juli 2011.



Sumber : Dit. KAPPEL Ditjen Hubla 2011

Gambar II-11. Temu Teknis Bidang Kelaiklautan Kapal

- 19) Telah dilaksanakan workshop MARPOL 73/78 pada tanggal 2 s.d 4 November 2011 bertempat di Hotel Ibis Jakarta.



Sumber : Dit. KAPPEL Ditjen Hubla 2011

Gambar II-12. Workshop MARPOL



- 20) Melanjutkan pembahasan konsep Peraturan Pemerintah tentang kepelautan dan fasilitas kesehatan penumpang.
- 21) Monitoring proses implementasi *Seafarer's Identification Document* (SID).
- 22) Melanjutkan pembahasan revisi Kepmenhub nomor 70 tahun 1998 tentang pengawakan kapal niaga.
- 23) Melanjutkan penyusunan ratifikasi MLC 2006 (ratifikasi peraturan-peraturan ILO) bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- 24) Telah dilaksanakan Audit Lembaga Diklat Kepelautan di 4 lokasi yaitu AKPELNI Semarang, PIP Makasar, AMI Medan dan BIWI Maritime Bali.
- 25) Telah dilaksanakan pembinaan Sea-Trial dan perhitungan garis muat kapal yang dilaksanakan di 14 lokasi yaitu, Bitung, Ambon, Batam, Samarinda, Palembang, Pontianak, Bangka Belitung, Belawan, Tegal, Lembar, Makasar, Ternate, Merauke dan Sorong.
- 26) Telah dilakukan evaluasi PNBPU PUP jasa Perkapalan dari UPT.
- 27) Telah dilaksanakan pembinaan PNBPU PUP pada 10 UPT yaitu Gresik, Kuala Tanjung, Rengat, Pulau Baai, Pantoloan, Pulau Sambu, Anyer Lor dan Bau-Bau.

3. Permasalahan

- a. Berdasarkan hasil pembinaan teknis pengukuran kapal di 18 lokasi/ UPT masih terdapat ketidakseragaman pemahaman berkaitan dengan aspek Pengukuran Kapal, antara lain tertib administrasi dan penataan arsip/dokumen.
- b. Berdasarkan hasil pembinaan teknis pendaftaran kapal di 8 lokasi/UPT masih terdapat ketidakseragaman pemahaman berkaitan dengan aspek Pendaftaran Kapal, antara lain tertib administrasi dan penataan arsip/dokumen.



- c. Tingkat pemenuhan kewajiban *docking* kapal masih belum optimal, hal ini disebabkan karena *dock space* yang ada sangat terbatas.
- d. Pada beberapa perpanjangan sertifikat diajukan tanpa mendapatkan nota dinas (kewenangan) dari Kantor Pusat.
- e. Laporan pemeriksaan *docking* dan laporan perpanjangan sertifikat tidak disampaikan ke DJPL Cq. Ditkapel.
- f. Ratifikasi Annex III s/d VI Marpol 73/78 terkendala prosedur dari Kementerian Luar Negeri mengenai tatacara ratifikasi peraturan internasional.
- g. Pemahaman sistem manajemen keselamatan kapal di perusahaan (DOC/*Document Of Compliance*) dan kapal (SMC/*Safety Management Certificate*) masih belum optimal karena kurangnya pemahaman ISM CODE oleh Audit Internal Perusahaan.
- h. Pengesahan/ *approval* Program Diklat untuk Lembaga Diklat Kepelautan. Lembaga Diklat yang ada di seluruh Indonesia sejumlah 28, yang terdiri dari 8 UPT dari Badan PPSDM Perhubungan dan 20 (dua puluh) Diklat Non Badan PPSDM Perhubungan.
- i. Sumber Daya Manusia untuk pengawasan terhadap lembaga diklat kepelautan yang sudah diapprove belum mencukupi.

4. Upaya Mengatasi Permasalahan

- a. Mengusulkan untuk melanjutkan kegiatan pembinaan teknis Pengukuran Kapal dalam rangka keseragaman pemahaman berkaitan dengan aspek Pengukuran Kapal, tertib administrasi dan penataan arsip/dokumen.
- b. Mengusulkan untuk melanjutkan kegiatan pembinaan teknis Pendaftaran Kapal dalam rangka keseragaman pemahaman berkaitan dengan aspek Pendaftaran Kapal, tertib administrasi dan penataan arsip/dokumen.
- c. Dalam hal tingkat pemenuhan kewajiban *docking* kapal masih belum optimal, disebabkan karena *dock space* yang ada sangat terbatas dilakukan



- penundaan docking terhadap kapal yang masih laik laut setelah dilakukan pemeriksaan serta Klasnya masih bisa dipertahankan.
- d. Dalam hal perpanjangan sertifikat tanpa mendapatkan nota dinas (kewenangan) dari Kantor Pusat diberikan teguran kepada UPT Adpel/UPP yang tidak melaksanakan penyelenggaraan perpanjangan sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Telah diterbitkan Mapel pemberitahuan kepada Adpel/UPP agar Marine Inspector yang melakukan pemeriksaan kapal yang melaksanakan dock dalam rangka perpanjangan sertifikat untuk mengirimkan laporan hasil pemeriksaan ke Ditjen Hubla Cq. Ditkapel.
 - f. Usulan ratifikasi Annex III s.d VI diupayakan dilanjutkan dengan pembahasan antar kementerian.
 - g. Akan dilakukan Bimbingan Teknis Implementasi ISM CODE terhadap Internal Auditor Perusahaan untuk meningkatkan pemahaman tentang aplikasi system manajemen keselamatan.
 - h. Untuk pemenuhan Lembaga Diklat Kepelautan yang sesuai STCW 1995, maka telah diambil langkah-langkah dengan memberikan sosialisasi dan motivasi meningkatkan mutu Lembaga Diklat serta disarankan bagi lembaga diklat tersebut agar bekerjasama dengan lembaga diklat yang telah diapprove atau dengan instansi yang memiliki peralatan sesuai ketentuan.
 - i. Telah diadakan pelatihan 4 personil pengawasan diklat dan masih diperlukan lagi pelatihan bagi staf yang ada, baik di Kantor Pusat maupun UPT Adpel pada lokasi yang terdapat Lembaga Diklat Kepelautan.



D. DIREKTORAT KENAVIGASIAN

1. Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan dan Operasional

- 1) Menyelenggarakan Rapat Kerja Teknis Kenavigasian dengan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Kenavigasian.
- 2) Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Kenavigasian Tahun 2012.
- 3) Menyusun Laporan Tahunan Direktorat Kenavigasian Tahun Anggaran 2011.
- 4) Menyusun program kegiatan Direktorat Kenavigasian yang diusulkan melalui RKA-K/L 2012.
- 5) Mengevaluasi usulan RKA-K/L yang diajukan Distrik Navigasi untuk Tahun Anggaran 2012 dan menyusun skala prioritas APBN-P.
- 6) Menyusun tanggapan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan BPKP pada Distrik Navigasi dan Direktorat Kenavigasian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Menyiapkan target Tahun 2012 dan memonitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/ Uang Rambu, Jasa Fasilitas Sewa Galangan, Jasa Telekomunikasi-Pelayaran, serta Jasa Pengujian Kesehatan dan Penilaian Lingkungan Kerja Pelayaran Tahun 2011.
- 8) Melaksanakan Serah Terima hasil kegiatan DIPA Kantor Pusat dan UPT Distrik Navigasi untuk digunakan dalam tugas-tugas operasional sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 9) Menyiapkan data/ statistik sarana dan prasarana Kenavigasian.



- 10) Menyusun petunjuk Operasional/ prosedur kerja VTS (Vessel Traffic System).
- 11) Melaksanakan pemeliharaan SBNP di Selat Malaka dan Selat Singapura di bawah kerangka kerjasama Cooperative Mechanism antara 3 negara pantai yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia.
- 12) Mengikuti sidang-sidang telekomunikasi di dalam dan luar negeri.
- 13) Mendata, mengevaluasi dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pengadaan/pemeliharaan/penghapusan barang IKMN fasilitas pangkalan Kenavigasian.
- 14) Melakukan pembinaan teknis dibidang pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan SBNP baik pada Distrik Navigasi maupun pihak ketiga di wilayah kerja Distrik Navigasi.
- 15) Menghimpun, mengevaluasi tingkat keandalan dan kecukupan SBNP pada setiap Unit Pelaksana Teknis/ Distrik Navigasi.
- 16) Melakukan pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui:
 - (a) Diklat Surveyor;
 - (b) Diklat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP);
 - (c) Diklat VTS Operator Full Basic bantuan AMSA;
 - (d) Diklat Operator Radio Umum (ORU) GMDSS;
 - (e) Diklat Teknisi Telekomunikasi Pelayaran (TTP) III;
 - (f) Diklat Vessel Traffic Service (VTS) Operator;
 - (g) Diklat Teknologi Mekanik Jurusan Perbengkelan;
 - (h) Diklat Ahli Nautika Tingkat (ANT) Dasar dan Ahli Teknik Tingkat (ATT) Dasar.
- 17) Mengusulkan adanya jabatan fungsional bengkel kenavigasian.
- 18) Mengikuti Workshop On Multi – Beam Survey and Side Scan Sonar.
- 19) Penerbitan Persetujuan Prinsip Pemasangan SBNP pihak ke-3.



- 20) Pelayanan Maklumat Pelayaran bahaya navigasi untuk kegiatan di perairan.
- 21) Updating buku Daftar Suar Indonesia (DSI) untuk penyiapan bahan pencetakan edisi berikutnya.
- 22) Mengevaluasi & mengawasi hasil usaha Kuasa Perhitungan Jasa Telkompel.
- 23) Memproses Rekomendasi Izin Komunikasi Radio (IKR) SROK dan SROP.
- 24) Mengusulkan tunjangan Uang Lauk Pauk (ULP) kepada petugas operasional Ditjen Hubla.
- 25) Monitoring operasional kegiatan Bengkel Kenavigasian dan pengawasan pemakaian bahan baku dan bahan bakar.
- 26) Melakukan monitoring dan mengevaluasi pembangunan dermaga kenavigasian.
- 27) Melaksanakan supervisi dan monitoring pembangunan dan pemasangan SBNP milik Ditjen Hubla/ Non Ditjen Hubla.
- 28) Monitoring fasilitas keselamatan pelayaran pada kegiatan pembangunan pelabuhan laut maupun pengelolaan pipa/kabel laut yang terletak pada wilayah perbatasan maupun wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 29) Monitoring kondisi Kapal Negara Kenavigasian.
- 30) Menempatkan posisi (ploting) dan mengoreksi peta laut berdasarkan informasi dari instansi terkait maupun dari Notices To Mariners (NTM) atau Berita Pelaut Indonesia (BPI).
- 31) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan DISHIDROS TNI-AL tentang pemutakhiran data peta laut.
- 32) Memonitor perkembangan teknologi terbaru SBNP dan informasi-informasi terkini lainnya pada situs www.iala.aism.org dan www.imo.org.



- 33) Relokasi Kapal Negara Kenavigasian.
- 34) Pemasangan Perangkat Alat Navigasi Elektronik (Ecdis) pada 2 (dua) unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas I.
- 35) Mengevaluasi laporan bulanan SROP Ditjen Hubla dan SROP Non Ditjen Hubla meliputi: Operasional, Teknis/ Peralatan dan SDM, menganalisa, mengevaluasi laporan pengawasan operasional SROP dan laporan kerusakan perangkat radio di Stasiun Radio Pantai.
- 36) Membuat data pelanggaran peraturan radio ITU Genewa melalui laporan SROP Kelas I.
- 37) Menyusun bahan *List of Coast Station* dan *List of Ships Station*.

b. Bidang Pembangunan

- 1) Pembangunan, Rehabilitasi dan *Replacement* Fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebagai berikut:
 - a) Pembangunan Menara Suar;
 - b) Pembangunan Rambu Suar;
 - c) Rehab Rambu Suar;
 - d) Rehab Menara Suar;
 - e) Replace Menara Suar;
 - f) Replace Rambu Suar.
- 2) Pengadaan Alat Survey.
- 3) Pengadaan dan Pemasangan Automatic Identification System Aid To Navigation (AIS AtoN) Direktorat Kenavigasian untuk Distrik Navigasi.
- 4) Pembangunan gedung Stasiun Radio Pantai.
- 5) Menyiapkan Pengadaan dan Pemasangan Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) SROP Manokwari dan Batam.



- 6) Menyiapkan Pembangunan Gedung VTS di Makassar, Pembangunan Vessel Traffic Service (VTS) di Malacca and Singapore Strait Phase II, Pembangunan VTS Northern Part.
- 7) Menyiapkan Pelaksanaan Project Phase IV, Pelaksanaan MEH Project, Pelaksanaan INDOSREP Project dan pelaksanaan Ship Reporting System (SRS) Project.
- 8) Pengadaan peralatan bengkel Direktorat Kenavigasian untuk Distrik Navigasi.
- 9) Pembangunan Dermaga Kapal Kenavigasian.
- 10) Menyusun dan mengusulkan pengadaan kapal baru dan scrapping Kapal Negara Kenavigasian dengan rencana induk dan kebutuhan operasional pada Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 11) Rehab / Docking Kapal Negara Kenavigasian.
- 12) Penyusunan aplikasi data base dalam Inventarisasi aset tanah (GIS).
- 13) Penyusunan System Inventory Bengkel Kenavigasian.

2. Realisasi Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan dan Operasional

- 1) Telah diselenggarakan Rapat Kerja Teknis Kenavigasian yang dilaksanakan di :
 - a) Batam-Kepulauan Riau, pada tanggal 10 s.d 11 Pebruari 2011, dengan tema **“Mewujudkan SDM Kenavigasian Masa Depan”** diikuti oleh seluruh Kepala UPT Distrik Navigasi;
 - b) Yogyakarta, pada tanggal 2 s.d 4 Mei 2011, Upgrading Kepala Kelompok Teknis Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhbungan Tahun 2011, dengan tema **“Upaya Peningkatan Kinerja Melalui Keterpaduan Pemahaman,**



Wawasan dan Ketrampilan Teknis Kenavigasian Dalam Rangka Menunjang Keselamatan Pelayaran”;



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-13. Rapat Kerja Teknis Kenavigasian di Yogyakarta

- c) Surabaya-Jawa Timur, pada tanggal 7 s.d 8 Desember 2011, dengan tema “**Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pelayaran**” seluruh Kepala UPT Distrik Navigasi.



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-14. Rapat Kerja Kenavigasian di Surabaya

- 2) Telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Penetapan Kinerja Kenavigasian Tahun 2012.



- 3) Telah disusun Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan, Ditjen Hubla, dan Direktorat Kenavigasian Tahun Anggaran 2011.
- 4) Telah disusun program kegiatan Direktorat Kenavigasian yang diusulkan melalui RKA-K/L 2012.
- 5) Telah dikoreksi, dievaluasi dan disusun skala prioritas usulan RKA-K/L yang diajukan Distrik Navigasi untuk Tahun Anggaran 2012 dan usulan APBNP.
- 6) Telah dibuat tanggapan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen), Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan BPKP pada Distrik Navigasi dan Direktorat Kenavigasian sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Telah dibuat target tahun 2012 dan telah dimonitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP)/ Uang Rambu, Jasa Sewa Fasilitas Galangan, Jasa Telekomunikasi-Pelayaran, serta Jasa Pengujian Kesehatan dan Penilaian Lingkungan Kerja Pelayaran Tahun 2011.
- 8) Telah dilaksanakan Serah Terima dan pembuatan Berita Acara Serah Terima Operasional hasil kegiatan DIPA kantor pusat dan UPT untuk digunakan dalam tugas-tugas operasional.
- 9) Telah disusun data/ statistik sarana dan prasarana Kenavigasian.
- 10) Telah disusun Standard Operating Procedure (SOP) VTS Batam atas bantuan Australian Maritime Safety Authority (AMSA) dan saat ini sedang dalam proses pengesahan oleh Dirjen Hubla.
- 11) Telah dilaksanakan pemeliharaan dan perawatan rutin Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura bersama Tim dari *Aids to Navigation Fund (ANF)* di bawah kerangka kerjasama *Cooperative Mechanism* antara 3 negara pantai yaitu Indonesia, Singapura dan Malaysia.



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-15. Pemeliharaan SBNP di Selat Malaka dan Selat Singapura

12) Telah mengikuti sidang-sidang di luar negeri sebagai berikut:



- a) Sidang Asia-Pasifik Telekomunikasi ke-4 di Hongkong;
- b) Sidang Asia-Pasifik Telekomunikasi ke-5 di Busan Korea;
- c) Sidang Cooperation Forum (CK) ke-4, tanggal 10 Oktober – 11 Oktober 2011 di Malaka, Malaysia;
- d) *Project Coordination Committee* (PCC) ke-4, tanggal 12 Oktober 2011 di Malaka, Malaysia;
- e) Sidang TTEG (*Tripatite Technical Experts Group*) ke-36 di Malaka, Malaysia dan;
- f) *Aids to Navigation Fun* (ANF) ke-7, tanggal 17 Oktober – 18 Oktober 2011 di Malaka, Malaysia.



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-16. Sidang TTEG ke-36 di Malaka, Malaysia



- 13) Telah didata, dievaluasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pengadaan/ pemeliharaan/ penghapusan barang IKMN fasilitas pangkalan Kenavigasian.
- 14) Telah dilakukan pembinaan teknis dibidang pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan SBNP baik pada Distrik Navigasi maupun pihak ketiga di wilayah kerja Distrik Navigasi.
- 15) Telah dihimpun dan dievaluasi tingkat keandalan serta kecukupan SBNP pada setiap Unit Pelaksana Teknis/ Distrik Navigasi.
- 16) Telah dilaksanakan diklat :
 - a) Diklat Surveyor periode Tahun 2011, diselenggarakan tanggal 27 Oktober sd. 7 Desember 2011 di DISHIDROS TNI AL, peserta diklat 30 orang DIPA Kantor Pusat;
 - b) Diklat SBNP periode Tahun 2011, dilaksanakan tanggal 2 Nopember sd. 22 Nopember 2011 di Fakultas Teknik UI Depok, peserta diklat 25 orang DIPA Kantor Pusat;



Sumber Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-17. Diklat SBNP



- c) Diklat VTS Operator Full Basic atas bantuan AMSA sebanyak 8 (delapan) peserta;
- d) Diklat Operator Umum (ORU) GMDSS, diselenggarakan tanggal 31 Oktober – 29 Nopember 2011 di Lembaga Bina Sena Jakarta, peserta diklat 30 (tiga puluh) orang, DIPA Kantor Pusat;



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-18. Diklat ORU GMDSS

- e) Diklat Teknisi Telekomunikasi Pelayaran (TTP) III, diselenggarakan tanggal 7 Nopember – 1 Desember 2011 di P2M UI Jakarta, peserta diklat 30 (tiga puluh) orang, DIPA Kantor Pusat;



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-19. Diklat TTP III



- f) Diklat *Pre Basic Operator Vessel Traffic Service (VTS)*, diselenggarakan tanggal 9 Nopember – 22 Nopember 2011 di Lembaga Bharuna Bhakti Utama Surabaya, peserta diklat sebanyak 25 orang, DIPA Kantor Pusat;



Sumber Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-20. Diklat Vessel Traffic Service (VTS) Operator

- g) Diklat Teknologi Mekanik di P2M Fakultas Teknik Universitas Indonesia, tanggal 10 Nopember – 29 Nopember 2011 peserta diklat sebanyak 20 (dua puluh) orang, DIPA Kantor Pusat;



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-21. Diklat Teknologi Mekanik



- h) Diklat Ahli Nautika Tingkat (ANT) Dasar / Ahli Teknika Tingkat (ATT) Dasar, diselenggarakan tanggal 21 Nopember – 30 Desember 2011 di BP2IP Surabaya DIPA Kantor Pusat dengan peserta :
- Diklat ANT peserta diklat sebanyak 30 orang dan
 - Diklat ATT peserta diklat sebanyak 30 orang.



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-22. Diklat ANT/ATT Dasar TA. 2011

- 17) Telah diusulkan jabatan fungsional bengkel kenavigasian untuk diproses lanjut di tingkat Kementerian Perhubungan.



- 18) Telah mengirimkan personil untuk mengikuti *Training, Workshop On Multi-Beam Survey and Side Scan Sonar*, tanggal 11 Oktober – 14 Oktober 2011 di Singapura.



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-23. Training, Workshop On Multi-Beam Survey and Side Scan Sonar



- 19) Telah diterbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pemasangan SBNP kepada pihak ke-3 yang mengajukan permohonan ke Direktorat Kenavigasian.
- 20) Telah diproses Pelayanan Maklumat Pelayaran bahaya navigasi untuk kegiatan di perairan.
- 21) Telah di-update buku Daftar Suar Indonesia (DSI) dan telah disiapkan bahan untuk proses pencetakan edisi berikutnya sebagai bahan operasional di Unit Pelaksana Teknis Direktorat Kenavigasian dan pihak-pihak yang membutuhkannya.
- 22) Telah dievaluasi dan dihitung Penerimaan Jasa Telekomunikasi Pelayaran untuk Tahun Anggaran **2011** dengan hasil penerimaan sebesar **Rp. 207.342.507,-** yang disetorkan ke Kas Negara.
- 23) Rekapitulasi Rekomendasi Izin Komunikasi Radio (IKR) baru dan perpanjangan yang dikeluarkan Ditjen Hubla Periode Tahun 2011 sebanyak 2.968 Rekomendasi.

Tabel II-8. Rekapitulasi Rekomendasi IKR Yang Dikeluarkan Ditjen Hubla Periode Tahun 2011

No	Jenis Permohonan	Rekomendasi		Jumlah
		Baru	Perpanjangan	
1.	Kapal GMDSS	271	675	946
2.	Kapal Non GMDSS	460	939	1.399
3.	Kapal Ikan	175	170	345
4.	SROP DJPL	-	11	11
5.	SROP Non DJPL	27	240	267
	JUMLAH	933	2.035	2.968



- 24) Telah diusulkan tunjangan Uang Lauk Pauk (ULP) untuk petugas operasional Ditjen Hubla dan saat ini masih dalam proses.
- 25) Telah dilaksanakan monitoring operasional kegiatan Bengkel Kenavigasian dan pengawasan pemakaian bahan baku dan bahan bakar.
- 26) Telah dimonitoring pembangunan sarana dan prasarana kenavigasian sebagai masukan data untuk bahan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana dermaga kenavigasian pada 8 (delapan) lokasi Distrik Navigasi yaitu Distrik Navigasi Kelas II Kupang (lanjutan tahap akhir), Distrik Navigasi Kelas III Sibolga (lanjutan), Distrik Navigasi Kelas I Sorong (lanjutan), Distrik Navigasi Kelas III Tarakan, Distrik Navigasi Kelas II Bena, Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin, Distrik Navigasi Kelas III Pontianak dan Distrik Navigasi Kelas I Tg. Priok di Cikoneng.
- 27) Telah dilaksanakan supervisi pembangunan dan pemasangan SBNP milik Ditjen Hubla/ Non Ditjen Hubla dan telah dimonitor pembangunan SBNP milik Ditjen Hubla/ Non Ditjen Hubla.
- 28) Telah dilaksanakan monitoring fasilitas keselamatan pelayaran pada kegiatan pembangunan pelabuhan laut maupun pengelolaan pipa/kabel laut pada wilayah perbatasan maupun wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 29) Telah dilaksanakan monitoring kondisi Kapal Negara Kenavigasian, pembinaan teknis dan Supervisi pada beberapa Distrik Navigasi yaitu :
 - a) Distrik Navigasi Kelas I Tg. Pinang;
 - b) Distrik Navigasi Kelas I Samarinda;
 - c) Distrik Navigasi Kelas I Palembang;
 - d) Distrik Navigasi Kelas I Bitung;
 - e) Distrik Navigasi Kelas I Makassar;
 - f) Distrik Navigasi Kelas I Ambon;



- g) Distrik Navigasi Kelas I Dumai;
 - h) Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur;
 - i) Distrik Navigasi Kelas II Banjarmasin;
 - j) Distrik Navigasi Kelas III Tarakan;
 - k) Distrik Navigasi Kelas III Kendari;
 - l) Distrik Navigasi Kelas III Merauke;
 - m) Distrik Navigasi Kelas III Sibolga.
- 30) Telah dilakukan plotting dan telah dikoreksi peta laut berdasarkan informasi dari instansi terkait maupun dari Notices To Mariners (NTM) atau Berita Pelaut Indonesia (BPI).
- 31) Telah dilaksanakan koordinasi dengan instansi terkait antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan DISHIDROS TNI-AL tentang pemutakhiran data peta laut.
- 32) Telah dimonitor perkembangan teknologi terbaru SBNP dan informasi-informasi terkini lainnya pada situs www.iala.aism.org dan www.imo.org.
- 33) Telah dilaksanakan Relokasi Kapal Negara Kenavigasian yaitu :
- a) KN. MANDALIKA, Tipe Kapal Bantu Perambuan Kelas I, dari Distrik Navigasi Kelas I Surabaya ke Distrik Navigasi Kelas III Sibolga;
 - b) KN. DATA D-047, Tipe Kapal Bantu Perambuan Kelas III, dari Distrik Navigasi Kelas I Palembang ke Distrik Navigasi Kelas III Tual.
- 34) Telah dilaksanakan pemasangan Perangkat Alat Navigasi Electronik (Ecdis) pada 2 (dua) unit Kapal Negara Kenavigasian Kelas I (KN. Kumba dan KN. Alnilam).
- 35) Telah dievaluasi laporan bulanan SROP Ditjen Hubla dan SROP Non Ditjen Hubla meliputi: Operasional, Teknis/Peralatan dan SDM, telah



dianalisa dan telah dievaluasi laporan pengawasan operasional SROP dan laporan kerusakan perangkat radio di Stasiun Radio Pantai.

36) Telah diproses dibuat data pelanggaran peraturan radio ITU Genewa melalui laporan SROP Kelas I dan harus dilakukan teguran atau dilaporkan ke Subdit Telekomunikasi Pelayaran Direktorat Kenavigasian melalui Kantor Distrik Navigasi/ UPT terkait setempat untuk ditindak lanjut (dikenakan sanksi administrasi/ teguran) dengan tindakan :

a) Pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun Radio Pantai/ Kapal yang berkebangsaan asing, diberikan surat teguran yang disampaikan kepada Ditjen Postel untuk diteruskan ke Administrasi yang bersangkutan.

Pelanggaran kapal berkebangsaan asing tahun 2011 : **nihil**;

b) Stasiun Darat (Non-Stasiun Radio Pantai) dan atau stasiun radio lain yang melanggar tetapi belum jelas identitasnya, dilaporkan ke Ditjen Postel guna diminta bantuannya untuk memonitor kembali dan untuk tindakan selanjutnya.

c) Pelanggaran yang dilakukan oleh Stasiun Radio Pantai Non-Ditjenhubla/ Kapal Indonesia, Ditjen Hubla langsung mengambil tindakan penyelesaiannya dengan membuat teguran kepada operator yang bersangkutan melalui pemilik SROP/ Kapal yang bersangkutan. Disamping itu dibuat juga surat ke Kadit Binfrek / Ditjen Postel dengan melampirkan hasil monitoring sebagai koordinasi untuk mendapatkan aksi lebih lanjut , mengingat bahwa pengambilan tindakan / sanksi terhadap pelanggaran adalah wewenang penuh Ditjen Postel.

37) Telah disusun bahan *List of Coast Station* dan *List of Ships Station*.



b. Kegiatan Pembangunan

- 1) Telah dilaksanakan Pembangunan, Rehabilitasi dan *Replacement* Fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yaitu :
 - a) Pembangunan Menara Suar di Pulau Nipah Tanjung Pinang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan surat ijin pengalihan lahan dan surat ijin pembangunan dari KemenkumHAM sampai saat ini belum terbit;
 - b) Pembangunan Rambu Suar sebanyak 21 (dua puluh satu) unit terdapat di :
 - (1) Disnav Kelas II Sabang 1 (satu) unit lokasi di 15 M darat P. Terluar;
 - (2) Disnav Kelas I Tg. Pinang 1 (satu) paket lokasi di 30 M darat P. Terluar;
 - (3) Disnav Kelas III Cilacap 1 (satu) paket lokasi di laut 15 M Kr. Gajah-Garut;
 - (4) Distrik Navigasi Kelas I Surabaya 1 (satu) unit lokasi di 30 M Darat di Banyuwangi;
 - (5) Disnav Kelas I Samarinda 2 (dua) paket berlokasi di depan 7 M laut Ma. Pegah dan di belakang 12 M laut Ma. Pegah;
 - (6) Disnav Kelas I Makassar 3 (tiga) unit lokasi di Jeneponto, Tg. Rangas, Bonerate Selayar;
 - (7) Disnav Kelas III Kendari 2 (dua) unit berlokasi di 10 M laut Kr. Barat Kaledupa dan di 10 M laut Pel. Mandati;
 - (8) Disnav Kelas I Ambon 3 (tiga) unit lokasi di 20 M darat Kr. Bais dan di laut 20 M Namlea, pembangunan lampu di pelabuhan Geser 20 M darat;
 - (9) Disnav Kelas I Bitung 1 (satu) unit berlokasi di Gunung Wenang (pembangunan tahap III selesai);



- (10) Disnav Kelas III Tual terdapat 6 (enam) unit terletak pada 30 M darat P. Terluar berlokasi di Arakula dan Karawela, Penambulai dan Kultubal Utara, Karang & Batu Goyang.
- c) Rehab Rambu Suar sebanyak 2 (dua) unit terdapat di Distrik Navigasi Kelas II Benoa berlokasi di depan alur pelabuhan Benoa tinggi 5,25 M, dan di belakang alur pelabuhan Benoa tinggi 12 M;
- d) Rehab Menara Suar sebanyak 1 (satu) unit terdapat di Distrik Navigasi Kelas I Makassar berlokasi di Debril;



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-24. Rehab Menara Suar Debril di Makassar

- e) Replace Menara Suar sebanyak 5 (lima) unit berlokasi di :



- (1) Disnav Kelas I Belawan 2 (dua) unit berlokasi di Jambu Aye NAD dan di Ujung Tamiang;
 - (2) Disnav Kelas III Teluk Bayur 1 (satu) unit berlokasi di P. Karsik Pariaman;
 - (3) Disnav Kelas I Tg. Priok 1 (satu) paket berlokasi di P. Tempurung;
 - (4) Disnav Kelas II Banjarmasin 1 (satu) paket berlokasi di Tanjung Putting.
- f) Replace Rambu Suar sebanyak 30 (tiga puluh) terdapat di :
- (1) Disnav Kelas I Belawan 1 (satu) paket berlokasi di 18 M Laut Kuala Langsa NAD;
 - (2) Disnav Kelas I Dumai 2 (dua) unit berlokasi di 10 M laut Tg. Ayung dan 10 M laut Gs. Pasir DSI. 574;
 - (3) Disnav Kelas II Teluk Bayur 7 (tujuh) unit berlokasi di 10 M Marlborough, 10 M Gs. Sirandah, 30 M P. Nyamuk, 30 M P. Roran, 10 M P. Silau, 10 M Bukit Siuban dan 10 M P. Pokai ;
 - (4) Disnav Kelas I Palembang 5 (lima) unit berlokasi di Federik Hendrik 10 M, Tg. Bunga 20 M, Kr. Meang 10 M, Kr. Gosong dan Kr. Reali DSI. 1954;
 - (5) Disnav Kelas II Semarang 1 (satu) paket berlokasi di 10 M Laut Karang Jeruk-Tegal;
 - (6) Disnav Kelas III Pontianak 1 (satu) paket berlokasi di 12 M darat P. Leman Budi DSI.2080;
 - (7) Disnav Kelas I Bitung 2 (dua) unit berlokasi di 10 M darat Tagulandang dan 10 M darat Bunta;
 - (8) Disnav Kelas III Kendari 2 (dua) unit berlokasi di 10 M laut Sekali dan 10 M laut Menui;



- (9) Disnav Kelas I Ambon 2(dua) unit berlokasi di 10 M laut Kr. Kailolo DSI.5937 dan 10 M laut Tg. Galala DSI. 5952;
 - (10) Disnav Kelas II Jayapura 4 (empat) unit berlokasi di 30 M darat P. Nimfor, 10 M Laut Mambewewe, 30 M darat Tg. Warari dan 20 M darat Tg. Woka;
 - (11) Disnav Kelas I Sorong 3 (tiga) paket berlokasi di Pelabuhan Merike Dock, Pelabuhan Klademark I dan Pelabuhan Klademark III.
- 2) Telah dilaksanakan pengadaan Alat Survey yang difungsikan sebagai alat survey untuk kegiatan dilaut dalam memantulkan frekuensi timbal balik dalam 1 (satu) koordinat dan untuk mendapatkan bentuk dasar laut dan benda-benda/ kerangka kapal maupun disisi darat sebagai alat GPS yang dipergunakan untuk mendapatkan titik koordinat laut atau lokasi suatu benda, sebanyak 3 unit yang ditempatkan di Disnav Tual, Disnav Merauke, Disnav Kupang, DIPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat TA. 2011.



Sumber Dit.Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-25. Alat Survey



- 3) Telah dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan AIS (AtoN) Direktorat Kenavigasian sebanyak 13 unit, untuk Distrik Navigasi Kelas I Belawan 5 lokasi dan Distrik Navigasi Kelas I Surabaya 8 lokasi, DIPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat TA. 2011.



Sumber Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-26. Pengadaan dan Pemasangan AIS (Aton)

- 4) Telah dilaksanakan pembangunan gedung Stasiun Radio Pantai sebanyak 6 (enam) unit berlokasi di :
- Distrik Navigasi Kelas III Sibolga 1 (satu) paket berlokasi di Teluk Dalam;
 - Distrik Navigasi Kelas I Dumai 1 (satu) paket berlokasi di Selincing;
 - Distrik Navigasi Kelas II Semarang 3 (tiga) paket berlokasi di Jepara, Rembang dan Juwana;



- d) Distrik Navigasi Kelas I Bitung 1 (satu) paket berlokasi di Manado.
- 5) Telah dilaksanakan Pemasangan *Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)* pada SROP Manokwari dan Batam, DIPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat TA. 2011.



Sumber Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-27. Pengadaan Peralatan GMDSS SROP Manokwari

- 6) Telah dilaksanakan Pembangunan Gedung VTS di Makassar, Pembangunan *Vessel Traffic Service (VTS)* di Malacca and Singapore Strait Phase II Grant JICA sampai pada tahap pelelangan/ tender di Jepang, Pembangunan VTS Northern Part sampai pada tahap pelelangan/ tender, DIPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat Tahun Anggaran 2011.
- 7) Telah dilaksanakan pemasangan peralatan GMDSS pada SROP-SROP DJPL melalui *Maritime Telecommunication System Development Project*



Phase IV bantuan JICA untuk memenuhi Master Plan IMO Tahun 1992, pelaksanaan Civil Work untuk MEH Project di Tg. Medang dan Hiyu Kecil telah selesai dibangun, telah dilaksanakan Ship Reporting System (SRS) Project (INDOSREP) sebanyak 20 (dua puluh) lokasi yaitu Sibolga, Palembang, Cirebon, Kupang, Tarakan, Pare-pare, Kendari, Ambon, Ternate, Sorong, Jayapura, Merauke, Jakarta, Surabaya, Bena, Pontianak, Banjarmasin, Bitung, VTS Selat Sunda Strait dan VTS Selat Lombok sampai pada tahap *Factory Acceptance Test (FAT)*.

- 8) Telah dilaksanakan pengadaan peralatan bengkel DIPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat TA. 2011.
 - a) *Truck Crane* sebanyak 2 (dua) unit, untuk lokasi Tanjung Pinang dan Dumai;



Sumber Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-28. Pengadaan Peralatan Bengkel Truck Crane 5 Ton



b) *Forklift* sebanyak 1 (satu) unit, untuk lokasi Ambon;



Sumber Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 20111

Gambar II-29. Pengadaan Peralatan Bengkel Forklift 7 Ton

- c) High Pressure Water Jet sebanyak 1 (satu) unit, untuk lokasi Jayapura.
- 9) Telah dilaksanakan pembangunan Dermaga Kapal Kenavigasian sebanyak 8 (delapan) paket terdapat di :
- (1) Disnav Kelas I Tg. Priok berlokasi di Cikoneng, sebanyak 1 (satu) paket;
 - (2) Disnav Kelas III Pontianak sebanyak 1 (satu) paket;
 - (3) Disnav Kelas II Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket;
 - (4) Disnav Kelas III Tarakan sebanyak 1 (satu) paket;
 - (5) Disnav Kelas II Benoa sebanyak 1 (satu) paket;
 - (6) Disnav kelas III Sibolga (pembangunan lanjutan);
 - (7) Disnav kelas III Kupang (pembangunan lanjutan);
 - (8) Disnav kelas I Sorong (pembangunan lanjutan tahap akhir).



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II-30. Pembangunan Dermaga Distrik Navigasi Tg. Priok-Cikoneng

- 10) Telah dilaksanakan pembangunan 1 (satu) unit Kapal Negara Kenavigasian Type Kapal Inspection Boat (Kapal Pengamat Perambuan) Kelas III, KN. Marore dan telah di pangkalkan di Distrik Navigasi Kelas I Dumai, DIPA Satker Pengembangan Kenavigasian Pusat.



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Gambar II.31. Pembangunan Kapal Pengamat Perambuan KN. Marore

- 11) Telah dilaksanakan Rehabilitasi/ Docking Kapal Navigasi di :
 - a) Distrik Navigasi Kelas II Sabang, KN. Antares;
 - b) Distrik Navigasi Kelas I Belawan, KN. Arcturus;
 - c) Distrik Navigasi Kelas I Dumai, KN. Pari dan KN. Suar-006;
 - d) Distrik Navigasi Kelas I Tg. Pinang, KN. Mitra IV;
 - e) Distrik Navigasi Kelas II Teluk Bayur, KN. Muci;
 - f) Distrik Navigasi Kelas II Semarang, KN. Suar II dan KN. B-126;
 - g) Distrik Navigasi Kelas III Cilacap, KN. Suar-007;
 - h) Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, KN. Prajapati dan KN. AE-029;
 - i) Distrik Navigasi Kelas I Bitung, KN. Merak;
 - j) Distrik Navigasi Kelas II Kupang, KN. Mina;
 - k) Distrik Navigasi Kelas II Jayapura, KN. Aldebaran;
 - l) Distrik Navigasi Kelas I Sorong, KN. Pradawana;
 - m) Distrik Navigasi Kelas III Merauke, KN. Merpati.
- 12) Telah disusun Aplikasi GIS dalam Inventarisasi Asset dan tujuan adanya GIS untuk mempermudah Inventarisasi asset tanah dan bangunan dengan tampilan visual diseluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Kenavigasian secara tepat dan sistematis.



13) Telah dilaksanakan penyusunan System Inventory Bengkel Kenavigasian dan tujuan dari studi ini adalah penerapan sistem inventory bengkel berbasis komputerisasi yang merupakan suatu keharusan dalam rangka peningkatan kinerja bengkel kenavigasian, Pengelolaan Inventory bengkel akan lebih efisien karena keluar masuk material, suku cadang dan sumber daya lainnya akan didokumentasi secara detail dengan sistem pelaporan yang lebih sistimatis. Disamping itu mapping kebutuhan dalam perencanaan operasional bengkel kenavigasian akan lebih akurat yang pada gilirannya akan berdampak kepada peningkatan kinerja operasional bengkel.

3. Permasalahan

- a. Turunnya anggaran, khususnya revisi DIPA tidak tepat pada waktunya (terlambat) mengakibatkan pelaksanaan/ program kegiatan tidak dapat berjalan sesuai rencana.
- b. Beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kenavigasian tidak secara berkala melaporkan daya serap kegiatan yang ada di unit kerjanya, hal ini mengakibatkan rendahnya realisasi daya serap secara keseluruhan (seluruh UPT Kenavigasian).
- c. Penyusunan SK Dirjen Hubla untuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Permenhub No. PM. 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran, belum terealisasi.
- d. Usulan tunjangan Uang Lauk Pauk selama ini terlampau kecil nilainya.
- e. Belum seluruh perwira kapal memenuhi standar kualifikasi sesuai Surat Keputusan Dirjen Hubla No. KP.11/42/16-84 tanggal 3 Desember 1984 dan Surat Keputusan Dirjen Hubla No. PY.68/1/7-93 tentang Pengaturan kembali Formasi Awak Kapal Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Program pendidikan untuk peningkatan kualifikasi belum



dilaksanakan dengan optimal akibat keterbatasan dan terkendala dengan terbatasnya kesempatan dan biaya, sehingga program pembinaan berjalan lamban. Disisi lain pelaut tidak mampu membiayai sendiri karena biaya diklat mahal.

- f. Belum terselenggaranya Tupoksi Direktorat Kenavigasian di bidang Kapal Negara Kenavigasian akibat lemahnya pelaksanaan ketentuan KM. 30 Tahun 2006 serta Juknisnya yang antara lain mengatur tentang mekanisme dan prosedur perencanaan Operasional Kapal Negara, pengusulan Anggaran di bidang Kapal Negara Kenavigasian, rencana perbaikan Kapal Negara Kenavigasian dan pelaporannya.
- g. Belum ditetapkannya Petunjuk Teknis Bengkel Kenavigasian menjadi kendala terhadap operasional bengkel di daerah terutama dalam menetapkan tingkat kebutuhan peralatan bengkel minimal pada masing-masing Distrik Navigasi, serta penyusunan formasi dan penempatan tenaga bengkel.
- h. Sering terjadi tabrak lari, pencurian dan pengrusakan terhadap SBNP yang terpasang dan sulitnya untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku tabrak lari, pencurian dan pengrusakan terhadap komponen peralatan SBNP yang hilang dan rusak tersebut.
- i. Masih terdapat beberapa SBNP milik non DJPL yang di bangun tanpa mengajukan rekomendasi ke Ditjen Hubla cq. Direktorat Kenavigasian. Hal ini menyebabkan masih ada beberapa SBNP milik Non DJPL yang belum di berikan nomor DSI, karena tidak adanya laporan ke Direktorat Kenavigasian dan alokasi anggaran masih minim, sedangkan pemilik kurang bertanggung jawab terhadap SBNP yang menjadi asetnya.
- j. Sebagian SROP-SROP masih menggunakan peralatan lama diatas 10 (sepuluh) tahun, dan untuk mendapatkan suku cadang peralatan dipasaran sangat sulit dan terbatas, sehingga operasional SROP tidak maksimal. Jumlah personil SROP yang memiliki sertifikasi keahlian bidang radio juga



masih sangat terbatas, yang mengakibatkan adanya penurunan kontinuitas kemampuan peralatan, suku cadang peralatan dan kualitas personil SROP sangat berpengaruh kepada keberlangsungan operasional SROP dalam menyelenggarakan fungsi keamanan dan keselamatan pelayaran.

- k. Penerapan Mapel No. 41/PHBL-08 tanggal 15 April 2008 belum diberlakukan secara penuh dan menyeluruh terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia berukuran 300 GT keatas yang melakukan pelayaran internasional, kapal-kapal barang berukuran 500 GT keatas yang melakukan pelayaran domestik, dan kapal-kapal penumpang tanpa memandang ukuran, paling lambat 1 Juli 2008 harus dilengkapi dengan pesawat *Automatic Identification System (AIS)*, belum dilaksanakan sehingga SROP-SROP yang sudah dilengkapi sarana perangkat VTS dan AIS belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kapal-kapal. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pengoperasian perangkat VTS dan AIS yang ada di SROP-SROP dan dapat mengurangi peran Telekomunikasi Pelayaran dalam mendukung terwujudnya keselamatan pelayaran.
- l. Tidak meratanya penyebaran Awak Kapal Negara pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Kenavigasian dimana pada UPT tertentu terdapat kekurangan jumlah maupun kualifikasi awak kapal, sementara pada UPT Direktorat Kenavigasian lainnya terdapat kelebihan jumlah maupun kualifikasi Awak Kapal Negara. Mutasi Awak Kapal Negara Kenavigasian sulit dilaksanakan karena menyangkut biaya pemindahan serta fasilitas perumahan.
- m. Kurangnya SDM yang memiliki Ijazah Pelaut di lingkungan kenavigasian yang antara lain diakibatkan oleh semakin rendahnya minat untuk menjadi awak Kapal Negara Kenavigasian khususnya untuk rating bawah di duga terkait dengan rendahnya Tunjangan Berlayar pada Kapal Negara.



- n. Tingginya faktor resiko operasional Kapal Negara Kenavigasian khususnya kapal-kapal yang telah berusia melampaui batas usia teknis yang layak namun tetap dioperasikan sehubungan dengan kebutuhan operasional kenavigasian dilapangan.
- o. Rehabilitasi galangan kenavigasian belum dilaksanakan mengingat galangan memiliki potensi yang sangat baik terhadap pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), disamping untuk pemeliharaan Kapal Negara Kenavigasian.
- p. Inventarisir aset fasilitas pangkalan kenavigasian belum dapat dilaksanakan secara penuh karena kendala laporan/data dari beberapa Distrik Navigasi yang tidak lengkap.
- q. Minimnya anggaran untuk pembangunan, rehabilitasi/ replacement sehingga laju tingkat pertumbuhan kecukupan dan keandalan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berjalan lambat.
- r. Kurang tersedianya sarana pendukung seperti kapal, atau kendaraan lain untuk menunjang dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan SBNP.
- s. Pembangunan Menara Suar di Pulau Nipa Tanjung Pinang dibatalkan, menunggu surat izin penggunaan lahan dari Menhankam.
- t. Peralatan sensor pada MEH *Project* belum terpasang dikarenakan masih tertahan di Singapura menunggu *Special Commitment Letter* dari *World Bank*.
- u. Distrik Navigasi yang dalam tahap pembangunan dermaga khusus kenavigasian pada Disnav Sorong, Tarakan, Pontianak, Bena, Sibolga dan Banjarmasin, serta peralatan kerja bengkel dan galangan yang dimiliki saat ini belum memadai sesuai kebutuhan.
- v. Masih ada beberapa Distrik belum memiliki peralatan angkat seperti forklift dan crane.



- w. Belum semua Distrik Navigasi mempunyai gudang sendiri, sehingga sampai saat ini penyimpanan barang inventaris dan spare part/bahan baku, untuk sementara masih memanfaatkan salah satu ruangan gedung kantor sehingga kurang menguntungkan dari segi kebersihan lingkungan kerja kantor;
- x. Permasalahan sertifikasi, masalah aset tanah dan bangunan belum ditata dengan pengelolaan secara terpadu yang mengakibatkan sebagian besar tanah asset yang dimiliki Distrik Navigasi belum memiliki sertifikat tanah, sehingga sebagian dari tanah-tanah tersebut banyak yang diserobot oleh masyarakat setempat dan bahkan mengklaim sebagai hak miliknya.
- y. Rendahnya kapasitas Operasional Kapal Negara Kenavigasian akibat kondisi Teknis Armada Kapal Negara Kenavigasian yang secara umum telah berusia diatas usia teknis yang layak dimana program peremajaan Armada Kapal Negara Kenavigasian (penghapusan dan pembangunan baru) sebagaimana di programkan dalam *Master Plane JICA* Tahun 2002 belum dapat diimplementasikan secara penuh akibat keterbatasan anggaran.

4. Upaya Mengatasi Permasalahan

- a. Jika ada rencana revisi DIPA, agar diajukan sedini mungkin sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan waktu yang memungkinkan.
- b. Telah diinformasikan dengan pengiriman kawat tentang berita acara serah terima setiap tahunnya kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Kenavigasian untuk mengirimkan secara berkala daya serap kegiatan yang ada di unit kerjanya, agar daya serap dapat terealisasi secara keseluruhan (seluruh UPT Kenavigasian).
- c. Telah diusulkan kembali penyusunan SK Dirjen Hubla untuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Permenhub No. PM. 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran.



- d. Usulan kenaikan pemberian tunjangan Uang Lauk Pauk kepada petugas operasional telah diproses dan telah dipresentasikan di Kementerian Keuangan, menunggu persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dimasukkan ke Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013.
- e. Mengevaluasi Standar Formasi Pengawakan Kapal Negara sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Hubla No. PY.68/1/7-93 tentang Pengaturan Kembali Formasi Awak Kapal Direktorat Kenavigasian, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- f. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan mengenai sistem Prosedur/ Mekanisme sesuai KM. 30 Tahun 2006 dan Petunjuk Teknisnya.
- g. Perlu ditetapkan dan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama Bagian Hukum untuk Petunjuk Teknis Bengkel Kenavigasian agar tidak menjadi kendala terhadap operasional bengkel di daerah terutama dalam menetapkan tingkat kebutuhan peralatan bengkel minimal pada masing-masing Distrik Navigasi, serta penyusunan formasi dan penempatan tenaga bengkel.
- h. Agar lebih sering diadakan sosialisasi di bidang Kenavigasian khususnya peran dan fungsi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terhadap masyarakat dan pengguna SBNP, tentang pentingnya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk keselamatan pelayaran sehingga tidak terjadi lagi pencurian, tabrak lari dan pengrusakan terhadap SBNP yang terpasang.
- i. Dihimbau kepada setiap Badan Usaha yang akan membangun SBNP agar mengajukan Rekomendasi Ijin Pembangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran ke Ditjen Hubla cq. Direktorat Kenavigasian agar dapat diberikan nomor DSI dan agar dibuatkan anggaran untuk memonitor pelaksanaanya sehingga pemilik bertanggung jawab terhadap SBNP yang menjadi asetnya.
- j. SROP-SROP yang masih menggunakan peralatan lama diatas 10 (sepuluh) tahun, agar diusulkan untuk mengganti peralatan komunikasi radio dengan peralatan yang baru, sehingga operasional SROP dapat berjalan secara



- maksimal. Pengadaan diklat keahlian di bidang radio agar ditingkatkan hingga jumlah personil SROP yang memiliki sertifikasi keahlian bidang radio dapat mencukupi sesuai dengan kebutuhan, sehingga penyelenggaraan fungsi keamanan dan keselamatan pelayaran dapat berjalan dengan lancar.
- k. Penerapan Mapel No. 41/PHBL-08 tanggal 15 April 2008 agar diberlakukan secara penuh dan menyeluruh terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia berukuran 300 GT keatas yang melakukan pelayaran internasional, kapal-kapal barang berukuran 500 GT keatas yang melakukan pelayaran domestik, dan kapal-kapal penumpang tanpa memandang ukuran, paling lambat 1 Juli 2008 harus dilengkapi dengan pesawat Automatic Identification System (AIS), harus dilaksanakan sehingga SROP-SROP yang sudah dilengkapi sarana perangkat VTS dan AIS dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kapal-kapal, sehingga pengoperasian perangkat VTS dan AIS yang ada di SROP-SROP dapat mendukung peran Telekomunikasi Pelayaran dalam terwujudnya keselamatan pelayaran.
 - l. Mengevaluasi Standar Formasi Pengawakan Kapal Negara sebagaimana diatur dalam PY. 68/1/7-93, agar penyebaran Awak Kapal Negara pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Kenavigasian dapat merata sehingga tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan jumlah maupun kualifikasi Awak Kapal Negara dan di usulkan untuk biaya pemindahan serta fasilitas perumahan, agar mutasi Awak Kapal Negara Kenavigasian dapat dilaksanakan.
 - m. Mengusulkan Diklat peningkatan Ijazah Pelaut serta pemutakhiran Ijazah Pelaut Kapal Negara Kenavigasian dan diusulkan kenaikan untuk Tunjangan Berlayar pada Kapal Negara.
 - n. Mengusulkan penghapusan Kapal Negara Kenavigasian yang dinilai tidak layak operasi dengan memperhatikan kebutuhan operasional kenavigasian serta kemampuan pengadaan kapal baru sebagai pengganti mengusulkan



anggaran pemeliharaan Kapal Negara Kenavigasian dengan mempertimbangkan kondisi teknis, operasional dan jadwal docking.

- o. Agar diusulkan dan dibuatkan anggaran untuk rehabilitasi galangan kenavigasian, mengingat galangan memiliki potensi yang sangat baik terhadap pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), disamping untuk pemeliharaan Kapal Negara Kenavigasian.
- p. Untuk menginventarisir aset fasilitas pangkalan kenavigasian yang belum dapat dilaksanakan secara penuh, dihimbau kepada beberapa Distrik Navigasi yang mengirimkan laporan/data tidak lengkap, agar menyampaikan laporan/data secara lengkap, sehingga tingkat pertumbuhan aset fasilitas pangkalan kenavigasian dapat dilihat dengan jelas dari grafik pertumbuhan;

1) Fasilitas Alat Bengkel

Laju pertumbuhan anggaran untuk pengadaan alat bengkel dan pemeliharaan mengalami peningkatan anggaran. Realisasi anggaran pada TA 2011 sebesar Rp. 1.444.233.000,- masih belum mencukupi operasional bengkel dalam rangka melaksanakan pemeliharaan, perbaikan dan perawatan SBNP dan sarana lainnya. Grafik pertumbuhan anggaran pemeliharaan fasilitas alat bengkel seperti terlihat berikut :



Sumber Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Grafik II-5 Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Bengkel



2) Fasilitas Bangunan Air/ Dermaga

Anggaran untuk Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Air/Dermaga untuk tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 863.395.000,- mengalami penurunan dari tahun anggaran 2010. Adapun pertumbuhan anggaran pemeliharaan Bangunan Air/Dermaga sebagaimana terlihat dalam grafik sebagai berikut :



Sumber Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Grafik II-6. Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Air/ Dermaga

3) Fasilitas Bangunan Gudang/Lapangan Penumpukan

Bangunan gudang sebagai tempat penyimpanan peralatan dan suku cadang SBNP serta fasilitas lain harus dapat menjamin keamanan baik secara teknis maupun non teknis, untuk itu perlu ditunjang dengan pemeliharaan gudang yang baik. Akan tetapi realisasi anggaran pada tahun anggaran 2011 mengalami penurunan anggaran dari tahun anggaran 2010, anggaran tersebut sebesar Rp. 377.604.000,-. Adapun grafik pertumbuhan anggaran pemeliharaan fasilitas gudang seperti terlihat dalam grafik berikut:



Sumber Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Grafik II-7 Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Gudang/Lapangan Penumpukan

4) Fasilitas Gedung Bengkel

Realisasi anggaran fasilitas Gedung Bengkel mengalami peningkatan pada anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 1.065.980.000,-. Adapun grafik pertumbuhan anggaran fasilitas gedung dan BBM sebagai berikut :



Sumber Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Grafik II-8 Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Bangunan Gedung Bengkel



5) Fasilitas Asrama/ Mess dan Kantor

Realisasi anggaran pemeliharaan fasilitas Asrama/Mess pada tahun anggaran 2011 yaitu sebesar Rp. 2.087.085.000,- dan mengalami kenaikan anggaran dari tahun 2010, dimana kondisi tersebut belum mencukupi.

Namun anggaran tersebut masih jauh untuk pemeliharaan sehingga dapat berakibat menurunnya kualitas dan kegunaan sarana tersebut sebagian mess/perumahan dinas sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, baik kepenghuniannya yang bukan ditempati oleh orang yang berhak, maupun kondisi lingkungan dan kesesuaian dengan tata ruang. Grafik pertumbuhan anggaran pemeliharaan fasilitas Asrama/Mess seperti terlihat berikut ini :



Sumber: Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Grafik II-9. Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Asrama/ Mess



6) Fasilitas Peralatan Angkat (*Crane & Forklift*)

Untuk mempertahankan kondisi teknis fasilitas peralatan angkat harus ditunjang dengan pemeliharaan yang baik, maka untuk itu diperlukan anggaran pemeliharaan yang memadai. Adapun realisasi anggaran pada tahun anggaran 2011 mengalami penurunan dari tahun anggaran 2010, dengan nilai yang terealisasi sebesar Rp. 23.750.000,-. Untuk setiap tahun anggaran seperti terlihat dalam grafik dibawah ini :



Sumber Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Grafik II-10 Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Angkat (Crane & Forklift)

7) Fasilitas BBM Bengkel

Realisasi anggaran fasilitas BBM Bengkel pada tahun anggaran 2011 mengalami penurunan dari tahun anggaran 2010. Adapun nilai anggaran yang terealisasi untuk tahun anggaran 2011 tersebut sebesar Rp. 2.586.633.000,- Adapun grafik pertumbuhan anggaran BBM Bengkel sebagai berikut :



Sumber : Dit. Kenavigasian Ditjen Hubla 2011

Grafik II-11 Pertumbuhan Anggaran Pemeliharaan Fasilitas BBM Bengkel

- q. Untuk di masa yang akan datang, skala prioritas agar benar-benar dipertajam, dan diprioritaskan untuk pembangunan SBNP baru dan rehabilitasi sarana dan prasarana kenavigasian, sehingga laju tingkat pertumbuhan keandalan dan kecukupan SBNP sesuai dengan standar yang direkomendasikan oleh IALA.
- r. Perlu disediakan sarana pendukung seperti kapal, atau kendaraan lain untuk menunjang dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan SBNP.
- s. Pembangunan Menara Suar di Pulau Nipa Tanjung Pinang akan diusulkan kembali pada DIPA Tahun Anggaran 2012.
- t. Dalam pemasangan peralatan sensor pada MEH Project agar dapat dilaksanakan, maka akan dilakukan amandment untuk memperpanjang waktu penyelesaian dan mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penerbitan *Special Commitment Letter* dari *World Bank*, untuk efektivitas L/C.
- u. Diusulkan pengadaan anggaran untuk pembangunan lanjutan dermaga khusus di Distrik Navigasi yang belum memiliki dermaga khusus (Disnav Tarakan, Pontianak, Bena, Sibolga, Tg. Priok di Cikoneng, Banjarmasin, dan



Sorong), dan pengadaan peralatan kerja bengkel dan galangan sesuai kebutuhan.

- v. Guna mendukung kerja pelampung suar, untuk beberapa Distrik yang belum memiliki peralatan angkat, agar dibuatkan usulan dan anggaran dalam pengadaan peralatan angkat seperti forklip dan crane di Distrik Navigasi yang belum memiliki, diantaranya : Distrik Navigasi Sabang, Belawan, Sibolga, Teluk Bayur, Palembang, Bitung, Semarang, Cilacap, Banjarmasin, Samarinda, Tarakan, Pontianak dan Merauke.
- w. Agar dibuatkan anggaran untuk pembangunan gudang sebagai tempat penyimpanan peralatan dan suku cadang SBNP untuk Distrik Navigasi yang belum memiliki gudang penyimpanan, sehingga tidak lagi memanfaatkan salah satu ruangan gedung kantor sehingga kebersihan lingkungan kerja kantor dapat terjaga dan terpelihara.
- x. Adapun solusinya dengan penataan dan pengelolaan secara terpadu yang dimulai dari inventarisasi, penelitian aspek legal dan penilaian, serta pemanfaatan, dan kesemua tahapan ini didukung dengan teknologi informasi berbasis GIS (*Geographic Information System*) dan agar dibuatkan anggaran untuk pengurusan sertifikat, tanah aset yang dimiliki Distrik Navigasi.
- y. Mengusulkan Anggaran Pembangunan kapal baru baik melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Rupiah Murni (RM), maupun melalui pembiayaan pinjaman luar negeri (*Loan*).



E. DIREKTORAT KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

1. Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan dan Operasional

- 1) Pembuatan peta kerawanan wilayah Ditjen Hubla.
- 2) Peningkatan keterampilan personil KPLP dalam penerapan ISPS Code.
- 3) Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Kesyahbandaran, Post State Control (PSC) dan Port State Control Officer (PSCO).
- 4) Asistensi terhadap musibah pelayaran dengan Penanggulangan Tumpahan Minyak di laut, penyelamatan jiwa di laut, pemadaman kebakaran di kapal.
- 5) Melaksanakan kegiatan latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Tiga Negara (Indonesia, Philippine, Jepang).
- 6) Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan darurat tumpahan minyak di laut, pada wilayah Barat dan Tengah.
- 7) Pelaksanaan Kegiatan Up-Grading PPNS.
- 8) Pelatihan pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Eksekutif pola 100 Jam Pelajaran.
- 9) Menyusun Rekapitulasi Kecelakaan Kapal terkait dengan musibah pelayaran yang terjadi pada kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2011.

b. Bidang Pembangunan

- 1) Pengadaan peralatan SAR Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 2) Lanjutan pembangunan kapal patroli sebagai berikut:
 - a) Kapal Patroli Kelas IA (tahap II) sebanyak 1 unit;

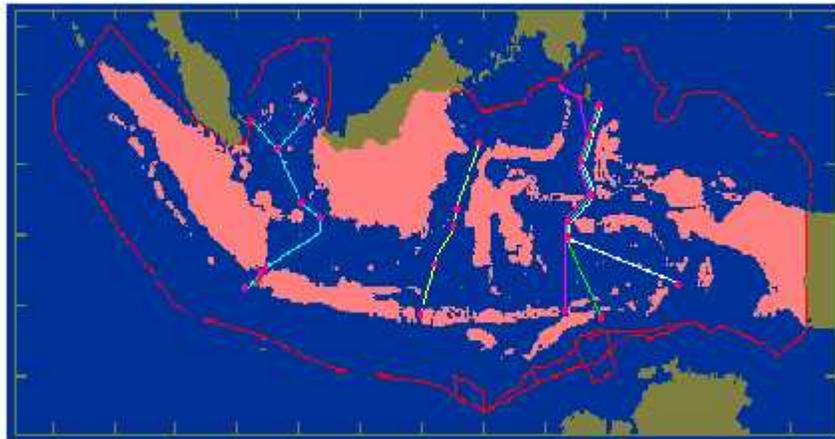


- b) Kapal Patroli Kls IB (tahap II) sebanyak 1 unit;
- c) Pembangunan Kapal Patroli Kelas I B (Tahap I) sebanyak 2 (dua) unit.
- 3) Pengadaan Peralatan ROV (Remotely Operated Vehicles).
- 4) Pengadaan peralatan Pemadaman Kebakaran.

2. Realisasi Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan dan Operasional

- 1) Telah dibuat peta kerawanan wilayah Ditjen Hubla.



JENIS KERAWANAN:

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. RAWAN KECELAKAAN KAPAL2. RAWAN PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT OLEH MINYAK3. RAWAN PEROMPAKAN DI LAUT DAN PANTAI | <ol style="list-style-type: none">4. RAWAN PELANGGARAN PERATURAN (ILEGAL)5. RAWAN PENYELUDUPAN, IMIGRAN GELAP, TKI GELAP6. RAWAN KONFLIK SOSIAL7. RAWAN PENCURIAN IKAN OLEH KAPAL ASING |
|--|--|

Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-32. Peta Kerawanan wilayah Ditjen Hubla

- 2) Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan keterampilan personil KPLP pada penerapan ISPS Code, yang dilaksanakan di Wisma PHI, Cempaka Putih Jakarta Pusat, tanggal 21 s/d 25 November 2011 dan diikuti oleh 35 peserta dari UPT Ditjen Hubla.



Sumber Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar : II-33 Pembukaan Pelatihan ISPS Code



Sumber Dit KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar : II-34 Panitia dan Peserta Pelatihan ISPS Code

- 3) Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Kesyahbandaran, Post State Control (PSC) dan Port State Control Officer (PSCO) bertempat di Hotel Mega Matra, Jl. Matraman Raya, Jakarta pada tanggal 14 s/d 18 November 2011, diikuti oleh 80 orang peserta terdiri dari UPT Ditjen Hubla;



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-35. RAKORNIS, PSC dan PSCO

- 4) Telah dilaksanakan Asistensi terhadap musibah pelayaran dengan Penanggulangan Tumpahan Minyak di laut, penyelamatan jiwa di laut, pemadaman kebakaran di kapal, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) *Workshop* Tuntutan Ganti Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak di Laut telah dilaksanakan tanggal 21 - 23 Maret 2011 di Hotel Nalendra, Bitung dan diikuti oleh 50 orang peserta;



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-36. Workshop Tuntutan Ganti Rugi Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak



- b) *Workshop* Penyusunan Rencana Operasi *Marpolex* 2011 telah dilaksanakan tanggal 5 - 6 April 2011 di Hotel Nalendra Bitung dan diikuti oleh 50 orang peserta;



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-37. Workshop Penyusunan Rencana Operasi Marpolex

- c) *Pre-Exercise* (Peningkatan Keterampilan) berupa Pembekalan Materi (Teori di Kelas), *Table Top Exercise* telah dilaksanakan tanggal 25 – 28 April 2011 di Hotel Nalendra Bitung, diikuti oleh 50 orang peserta dan Latihan Penanggulangan Pencemaran di Perairan Pelabuhan Bitung tanggal 28 April 2011 dan diikuti oleh 271 orang peserta dengan melibatkan instansi terkait (Bea Cukai, Balai Karantina, Polri/KPPP);



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-38. Narasumber & Peserta Pembekalan Materi Pre- Exercise



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-39. Latihan di Laut Operasi SAR, Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Tumpahan Minyak pada Pre-Exercise

- d) Upacara Keberangkatan Tim dan Unsur RI dalam rangka Marpolex 2011 di Manila Bay, Philippine yang dipimpin oleh Direktur KPLP pada tanggal 29 April 2011 di Bitung.



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-40. Upacara Keberangkatan Tim Marpolex 2011



- 5) Telah dilaksanakan kegiatan latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Tiga Negara (Indonesia, Philippine, Jepang) berupa Marpolex 2011 di Manila Bay Philippine tanggal 3-6 Mei 2011, diikuti oleh 216 orang peserta dari 3 (tiga) Negara yaitu Indonesia, Philippine dan Jepang.



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-41. Latihan Penanggulangan Tumpahan Minyak

- 6) Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah 21 tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2006 tentang Penanggulangan darurat tumpahan minyak di laut, pada wilayah Barat dan Tengah antara lain sebagai berikut:



- a) Untuk wilayah Tengah, dilaksanakan pada tanggal 11-12 Oktober 2011 bertempat di Kantor Administrator Pelabuhan Semarang, yang diikuti oleh 50 orang peserta;



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-42. Sosialisasi Perlindungan Lingkungan Maritim di Semarang

- b) Untuk Wilayah Barat, dilaksanakan pada tanggal 18-19 Oktober 2011 bertempat di Kantor Pelabuhan Batam dan diikuti oleh 50 orang peserta.



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-43. Sosialisasi Perlindungan Lingkungan Maritim di Batam



- 7) Telah dilaksanakan Kegiatan Up-Grading PPNS, yang dilaksanakan di Hotel Jayakarta, Jl. Hayam Wuruk 126 Jakarta, tanggal 25 s/d 28 Juli 2011, yang diikuti oleh 50 peserta dari UPT Ditjen Hubla.



Sumber Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-44. Up-Grading PPNS



Sumber Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-45. Nara Sumber dan Peserta pada UP- Grading PPNS

- 8) Telah dilaksanakan Pelatihan pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Eksekutif pola 100 Jam Pelajaran dilaksanakan pada bulan 25 Oktober s/d 23 November 2011, diikuti oleh 30 orang, peserta, bertempat di Pusat Pendidikan Reserse Kriminal (LEMDIK POLRI) Mega



Mendung, dengan tema “Penegak Hukum Yang Menjunjung Tinggi Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan”.



Sumber Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-46. Diklat PPNS Eksekutif

- 9) Telah disusun Rekapitulasi Kecelakaan Kapal terkait dengan musibah pelayaran yang terjadi pada kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2011 sebanyak 188 musibah pelayaran dengan jenis musibah meliputi terbakar, kandas dan tenggelam, bocor, tubrukan, dan lain-lain.

Tabel II-9. Data Rekapitulasi Kecelakaan Kapal

NO	JENIS KECELAKAAN	TAHUN		
		2009	2010	2011
A	KEJADIAN			
1	TENGGELAM	41	49	63
2	KEBAKARAN	26	18	33
3	TUBRUKAN	16	17	14
4	KANDAS/HANYUT	19	35	37
5	LAIN-LAIN	22	32	41
	JUMLAH	124	151	188
B	KORBAN JIWA			
	MENINGGAL	247	198	343
C	FAKTOR PENYEBAB			
1	MANUSIA	52	43	31
2	ALAM	41	84	107
3	TEKNIS DAN LAIN-LAIN	31	21	50
	JUMLAH	124	148	188

Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011



b. Bidang Pembangunan

- 1) Telah dilaksanakan Pengadaan peralatan SAR sebanyak 39 set yang telah diserahkan kepada 39 (tiga puluh Sembilan) UPT Ditjen Hubla.



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-47. Pengadaan Peralatan SAR

- 2) Telah dilaksanakan lanjutan pembangunan kapal patroli, sebagai berikut:
 - a) Kapal Patroli Kelas IA (tahap II) sebanyak 1 unit yang dikerjakan oleh galangan kapal PT. Nexus Engineering Indonesia (NEI) di Batam dan direncanakan selesai pada tahun 2012;



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-48. Pembangunan Kapal Patroli Kelas IA

- b) Kapal Patroli Kls IB (tahap II) sebanyak 1 unit yang dikerjakan oleh galangan kapal PT. Dumas Shipyard di Surabaya, dan direncanakan selesai pada Tahun 2012;



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-49. Pembangunan Kapal Patroli Kls IB (tahap II)

- c) Pembangunan Kapal Patroli Kelas I B (Tahap I) sebanyak 2 (dua) unit yang dikerjakan oleh galangan kapal PT. Daya Radar Utama di Jakarta.



- 3) Telah dilaksanakan pengadaan peralatan ROV (*Remotely Operated Vehicles*) sebanyak 2 unit, alat ini berfungsi untuk survei kondisi lokasi kecelakaan kapal di laut dan membantu proses evakuasi, yang telah diserahkan kepada Direktorat KPLP dan Kantor Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok.



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-50. Pengadaan Peralatan ROV (Remotely Operated Vehicle) / Scan Sonar

- 4) Telah dilaksanakan pengadaan peralatan pemadaman kebakaran *automatic type capsul* sebanyak 2.375 buah yang telah diberikan kepada 33 (tiga puluh tiga) UPT Ditjen Hubla.



Sumber : Dit. KPLP Ditjen Hubla 2011

Gambar II-51. Pengadaan Peralatan Pemadaman Kebakaran



c. Permasalahan

- 1) Keterlambatan dan kurang lengkapnya berkas laporan kecelakaan kapal yang dikirim oleh UPT Ditjen Hubla ke Kantor Pusat Cq. Direktorat KPLP, sehingga menghambat proses pemeriksaan.
- 2) Sistem pelaporan hasil pemeriksaan kapal asing masih dilakukan secara manual sehingga terjadi keterlambatan proses pelaporan yang dikirim ke DJPL untuk di input ke APCIS (*Asean Pacific Computerized Information System*).
- 3) Adanya penghematan anggaran program kegiatan pada Dit. KPLP, sehingga sebagian kegiatan teknis dan pelatihan tidak dapat dilaksanakan.
- 4) Belum ada SOP Pamtib (Pengamanan dan Ketertiban) di pelabuhan yang mengatur kegiatan Syahbandar Kelas Utama dan Otoritas Pelabuhan Kelas Utama.
- 5) Kurangnya SDM KPLP baik di pelabuhan maupun pengawakan kapal negara yang memiliki ijazah kompetensi.
- 6) Permasalahan ganti rugi akibat pencemaran tumpahan minyak MONTARA masih dalam proses.
- 7) Kurangnya SDM KPLP yang ahli dan professional untuk pengawasan dalam kegiatan pemasangan kabel optik, pipa gas, penanganan kerangka kapal dan pekerjaan bawah air.
- 8) Kurangnya SDM (PPNS) yang professional serta minimnya dana untuk melakukan bantuan hukum dalam menangani kasus yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 9) Banyak permasalahan akibat dari pencemaran laut yang terjadi di perairan Indonesia dan pencemaran laut yang masuk kewilayah perairan Indonesia.



- 10) Pengawasan keselamatan pelayaran tidak maksimal karena kurangnya jumlah armada kapal patrol.
- 11) Pengelolaan Senjata api dan amunisi belum tertata dengan baik.

d. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Menginstruksikan kepada para Ka. Adpel/ Ka. UPP untuk segera melaporkan dan memproses musibah kecelakaan kapal ke Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut secara lengkap dan mengoptimalkan koordinasi dengan Mahkamah Pelayaran agar hasil keputusan sidang Mahkamah Pelayaran dapat dikirim minimal per triwulan ke Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut.
- 2) Mengoptimalkan pengawasan kapal asing pada pelabuhan terbuka bagi perdagangan luar negeri dan penambahan jumlah petugas PSC (*Port State Control*).
- 3) Memprioritaskan kegiatan startegis dalam anggaran, agar tidak terkena dampak penghematan anggaran dan revisi tanda bintang harus diusahakan semaksimal mungkin pada awal Tahun Anggaran atau pada pertengahan Tahun Anggaran.
- 4) Perlu disusun SOP Pamtib (Pengamanan dan Ketertiban) di pelabuhan guna mengatur tugas-tugas operasional Syahbandar Kelas Utama dan Otoritas Pelabuhan Kelas Utama.
- 5) Perlunya pengadaan pelatihan khusus untuk SDM KPLP di pelabuhan dan pendidikan peningkatan ijazah kepelautan untuk Awak Kapal Negara dimana hal ini perlu diatur khusus dengan SK Dirjen.
- 6) Menindak lanjuti proses permasalahan ganti rugi akibat pencemaran tumpahan minyak MONTARA.



- 7) Perlunya pendidikan khusus untuk SDM KPLP yang menangani kegiatan pemasangan kabel optik, pipa gas, penanganan kerangka kapal dan pekerjaan bawah air.
- 8) Pengusulan anggaran untuk meningkatkan kompetensi SDM PPNS yang professional dan dana bantuan hukum dalam menangani kasus yang terjadi di Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 9) Perlunya pengaturan lebih lanjut tentang masalah pencemaran laut terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan darurat tumpahan minyak di laut, pada wilayah Barat dan Tengah.
- 10) Pengusulan anggaran pembangunan Kapal Patroli secara berkesinambungan untuk memenuhi percepatan penanganan keselamatan pelayaran.
- 11) Akan dilaksanakan monitoring senjata api dan amunisi pada Tahun 2012, guna melakukan pengelolaan senjata api.



BAB III KEGIATAN ADMINISTRATIF

A. BAGIAN PERENCANAAN

1. Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan

- 1) Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan (Rapim) Ditjen Hubla.
- 2) Penyusunan Bahan Rapat Staf Ditjen Perhubungan Laut.
- 3) Penyusunan Bahan Pimpinan Kementerian Perhubungan untuk Rapat Dengar Pendapat dan Jawaban atas Pertanyaan Anggota DPR RI.
- 4) Penyusunan Bahan Pimpinan Kementerian Perhubungan untuk Rapat/Sidang Kabinet dan Rapat Koordinasi dengan Instansi Lain.
- 5) Penyusunan Materi Raker Kementerian Perhubungan Tahun 2011.
- 6) Penyusunan Materi Raker Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2011.
- 7) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Perhubungan Laut dan LAKIP Sesditjen Perhubungan Laut Tahun 2010.
- 8) Penyusunan Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Laut dan Penetapan Kinerja Sesditjen Perhubungan Laut Tahun 2011.
- 9) Penyusunan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 10) Penyusunan Evaluasi Kinerja Operasional Penyelenggaraan Transportasi Laut Tahun 2010.
- 11) Melaksanakan Bimbingan dan evaluasi penyusunan LAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 12) Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Hubla.
- 13) Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-KL) Tahun 2012.
- 14) Pengumpulan data dan klarifikasi usulan kegiatan RKA/KL Tahun 2012.
- 15) Sosialisasi dan Peninjauan Lokasi Kegiatan RKA-KL.



- 16) Penataan Kelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran dan Pengukuhan Syahbandar sesuai KM 64 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar.
- 17) Evaluasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Operasional UPT Kantor Syahbandar dan Kantor Otoritas Pelabuhan.
- 18) Penyusunan Konsep Kriteria UPT Ditjen Hubla.
- 19) Kajian Bentuk Kelembagaan, Tupoksi Kantor Pusat dan UPT Ditjen Hubla Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008.
- 20) Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Laut tahun 2011.
- 21) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi pada UPT Ditjen Hubla.
- 22) Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2010.
- 23) Penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2010.
- 24) Kegiatan Pengarahan Teknis Para Pengelola Anggaran Tahun 2011 Ditjen Hubla.
- 25) Evaluasi Kesiapan Sarana dan Prasarana dan SDM UPT Dalam Rangka Pelaksanaan Aplikasi e-Monitoring.
- 26) Pemantauan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Lingkungan Ditjen Hubla.
- 27) Updating laporan kinerja berbasis aplikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan.

b. Kegiatan Operasional

- 1) Survey Hidrografi/Topografi, Penyelidikan Tanah dan Desain dalam rangka Pembangunan Pelabuhan Laut di 10 lokasi.
- 2) Pengembangan DataBase Infrastruktur Perhubungan Laut.
- 3) Kajian Standar Pelayanan Operasional di UPT Ditjen Hubla.
- 4) Kajian Keberhasilan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis.



- 5) Studi Kelayakan Dalam Rangka Pembangunan Pelabuhan Laut di 12 Lokasi.
- 6) Kajian Penilaian Standar Pegawai pada UPT Ditjen Hubla.
- 7) Kajian Penilaian Performance Penyelenggaraan Sistem Transportasi Laut.
- 8) Kajian Model Pengusahaan Pelabuhan Terkait UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 9) Kajian Tolok Ukur Pelayanan Satu Atap Ditjen Hubla.

2. Realisasi Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan

- 1) Telah disusun Bahan Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Perhubungan.
- 2) Telah disusun Bahan Rapat Staf Ditjen Perhubungan Laut.
- 3) Telah disusun Bahan Pimpinan Kementerian Perhubungan untuk Rapat Dengar Pendapat dan Jawaban atas Pertanyaan Anggota DPR RI.
- 4) Telah disusun Bahan Pimpinan Kementerian Perhubungan untuk Rapat/Sidang Kabinet dan Rapat Koordinasi dengan Instansi Lain.
- 5) Telah disusun Materi Raker Kementerian Perhubungan Tahun 2011.
- 6) Telah disusun Materi Raker Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2011.
- 7) Telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen Perhubungan Laut dan LAKIP Sesditjen Perhubungan Laut Tahun 2010.
- 8) Telah disusun Penetapan Kinerja Ditjen Perhubungan Laut dan Penetapan Kinerja Sesditjen Perhubungan Laut Tahun 2011.
- 9) Telah disusun Indikator Kinerja Penyelenggara Transportasi Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 10) Telah disusun Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Laut Tahun 2010.
- 11) Telah dilaksanakan Bimbingan dan evaluasi penyusunan LAKIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 12 (dua belas) lokasi yaitu:



- | | | |
|-----------------|---------------|----------------|
| (a) Belawan | (e) Batam | (i) Bena |
| (b) Teluk Bayur | (f) Palembang | (j) Balikpapan |
| (c) Dumai | (g) Semarang | (k) Samarinda |
| (d) Tg. Pinang | (h) Tg. Perak | (l) Makassar |

- 12) Telah dilaksanakan sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Hubla di 7 lokasi yaitu: Surabaya, Balikpapan, Makassar, Bitung, Ambon, Sorong dan Batam.
- 13) Telah disusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2012.
- 14) Telah dilaksanakan pengumpulan data dan klarifikasi usulan kegiatan RKA/KL Tahun 2012 pada 31 (tiga puluh satu) provinsi.
- 15) Telah dilaksanakan sosialisasi serta peninjauan lokasi kegiatan RKA K/L Ditjen Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2012.
- 16) Telah dilaksanakan penataan kelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayaran dan Pengukuhan Syahbandar sesuai KM 64 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar.
- 17) Telah dilaksanakan evaluasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Operasional UPT Kantor Syahbandar dan Kantor Otoritas Pelabuhan.
- 18) Telah disusun Konsep Kriteria Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla.
- 19) Telah dilaksanakan Kajian Bentuk Kelembagaan, Tupoksi Kantor Pusat dan UPT Ditjen Hubla Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2008.
- 20) Telah disusun Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Laut tahun 2011 yang terdiri dari 9 (Sembilan) program yaitu: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sert Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.



- 21) Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi pada kantor pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla pada tanggal 21 sd. 25 Nopember 2011 bertempat di Wisma Primkokarmar, Bogor-Jawa Barat.
- 22) Telah disusun Laporan Tahunan Ditjen Perhubungan Laut Tahun 2010.
- 23) Telah disusun Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2010.
- 24) Telah dilaksanakan kegiatan Pengarahan Teknis Para Pengelola Anggaran Tahun 2011 Ditjen Hubla diikuti oleh 300 orang peserta, bertempat di Ruang Mataram Gedung Karya Kementerian Perhubungan.



Sumber Humas Sesditjen Hubla 2011

Gambar III-1. Pengarahan Teknis Para KPA/PPK dan Satker Sementara

- 25) Telah dilaksanakan evaluasi Kesiapan Sarana dan Prasarana dan SDM UPT Dalam Rangka Pelaksanaan Aplikasi e-Monitoring di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Hubla ke 9 (Sembilan) provinsi, yaitu: Jawa



Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur dan Bali.

- 26) Telah dilaksanakan pemantauan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Belanja Barang maupun Belanja Modal serta kontrak-kontrak strategis di Lingkungan Ditjen Hubla ke 15 (lima belas) lokasi yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua Barat, Jawa Timur, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sulawesi Selatan.
- 27) Telah dilaksanakan Updating laporan kinerja berbasis aplikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan tanggal 5 s.d 7 Juli 2011 bertempat di Surabaya dan tanggal 19 s.d 21 Juli 2011 bertempat di Makassar yang diikuti oleh UPT Koordinator Ditjen Hubla.



Sumber : Bagian Perencanaan, Setditjen Hubla;

Gambar III-2. Updating Aplikasi PP.39 Tahun 2006



b. Kegiatan Operasional

- 1) Telah dilaksanakan Survey Hidrografi/Topografi, Penyelidikan Tanah dan Desain dalam rangka Pembangunan Pelabuhan Laut di 10 lokasi.

Tabel III.1 Survey Hidrografi/Topografi, Penyelidikan Tanah dan Desain

NO	LOKASI	PROVINSI
1.	Pulau Matsiri	Kalimantan Selatan
2.	Pulau Dama	Maluku Utara
3.	Lakara	Sulawesi Tenggara
4.	Erlan	Maluku
5.	Temajo	Kalimantan Barat
6.	Kepulauan Balabalakang	Sulawesi Barat
7.	Batu Atas	Sulawesi Tenggara
8.	Pulau Jinato	Sulawesi Selatan
9.	Pulau Debri/ Menara Suar	Sulawesi Selatan
10.	Pulau Batik	Nusa Tenggara Timur

Sumber Bagian Perencanaan, Setditjen Hubla

- 2) Telah dilakukan Pengembangan DataBase Infrastruktur Perhubungan Laut.
- 3) Telah disusun Kajian Standar Pelayanan Operasional di UPT Ditjen Hubla.
- 4) Telah disusun Kajian Keberhasilan Penyelenggaraan Angla Perintis.
- 5) Telah dilaksanakan Studi Kelayakan Dalam Rangka Pembangunan Pelabuhan Laut di 12 Lokasi.

Tabel III.2. Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Laut

NO	LOKASI	PROVINSI
1.	Merauke	Papua
2.	Pulau Darume	Maluku Utara
3.	Pulau Damao	Sulawesi Utara
4.	Pulau Talise	Sulawesi Utara
5.	Kempo	Nusa Tenggara Barat
6.	Pulau Moyo	Nusa Tenggara Barat
7.	Teluk Ilalang Kab. Mandailing Natal	Sumatera Utara
8.	Pulau Sebuku, Kab. Pulau Laut	Kalimantan Selatan
9.	Pulau Rinca	Nusa Tenggara Timur
10.	Pulau Pelapis, Kab. Kayun Utara	Kalimantan Barat
11.	Kuala Tanjung	Sumatera Utara
12.	Rangga Ilung	Kalimantan Tengah

Sumber : Bagian Perencanaan, Setditjen Hubla



- 6) Telah disusun Kajian Penilaian Standar Pegawai pada UPT Ditjen Hubla.
- 7) Telah disusun Kajian Penilaian Performance Penyelenggaraan Sistem Transportasi Laut.
- 8) Telah disusun Kajian Model Pengusahaan Pelabuhan Terkait UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 9) Telah disusun Kajian Tolok Ukur Pelayanan Satu Atap Ditjen Hubla.

3. Permasalahan

- a. Terdapat kendala dari segi teknis maupun administrasi dalam penyusunan dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen Hubla dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai konsep Reformasi Birokrasi itu sendiri maupun tata caranya.
- b. Belum dapat dipenuhinya pengukuhan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Hubla Kantor Syahbandar dikarenakan masih terdapat tugas dan fungsi lalu lintas dan angkutan Laut yang belum tertampung di organisasi yang baru.
- c. Laporan daya serap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja di daerah maupun pusat yang diwujudkan dengan pengisian aplikasi e-monitoring maupun aplikasi PP 39 tahun 2006 belum dapat dilaksanakan secara berkala oleh masing-masing UPT/ Satker dikarenakan kendala-kendala teknis maupun non-operasional.

4. Upaya Mengatasi Permasalahan

- a. Dengan diadakannya bimbingan teknis melalui konsinyering maupun melalui rapat internal, dan juga berkoordinasi langsung dengan Biro Kepegawaian dan Organisasi selaku sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan dan dengan bantuan pihak ketiga berupa kajian teknis terkait Reformasi Birokrasi.
- b. Dengan melakukan penataan organisasi dan tata laksana melalui penyesuaian kembali organisasi-organisasi yang ada dan juga rancangan Peraturan Menteri, yang disesuaikan dengan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan kondisi di lapangan.



- c. Melakukan monitoring secara berkala, himbauan-himbauan serta surat peringatan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut agar para Kepala UPT maupun Satuan Kerja segera menindaklanjuti hasil pekerjaan beserta pelaporan yang akuntabel.



B. BAGIAN KEUANGAN

1. Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan

- 1) Mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2010 Dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011 Pada Kantor/UPT Dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal.
- 2) Mengusulkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran Pada Kantor/UPT Dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

b. Kegiatan Operasional

- 1) Melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran.
- 2) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 3) Melaksanakan kegiatan Pendistribusian/ Penyampaian Dokumen Anggaran.
- 4) Melakukan Inventarisasi Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan Pelaksanaan Pencairan pada UPT Ditjen Hubla.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran.
- 6) Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Penerimaan.
- 7) Membuat usulan dan menyusun pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011.
- 8) Melaksanakan Implementasi SAI guna membuat laporan keuangan Triwulan I, Triwulan III, semester I dan Tahunan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 9) Membuat Laporan Realisasi Daya Serap DIPA di tingkat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



- 10) Melaksanakan kegiatan Penyegaran dan Pemantapan para Pengelola Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 11) Menyelesaikan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP dan Itjen Kementerian.
- 12) Melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan.
- 13) Melakukan Sosialisasi SDM Pengelola Keuangan dalam rangka menunjang kegiatan Operasional Perkantoran.
- 14) Melaksanakan kegiatan penyelesaian TP / TGR.
- 15) Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Piutang PNBP.
- 16) Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan PNBP.
- 17) Melaksanakan kegiatan Pembinaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 18) Melakukan Kegiatan Penyusunan Target Penerimaan PNBP.
- 19) Melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemuktahiran data PNBP.
- 20) Menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Bendahara Penerima.
- 21) Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara.
- 22) Melaksanakan kegiatan Evaluasi Penghapusan Barang Milik Negara.
- 23) Menyusun Laporan Barang Milik Negara tingkat Eselon I dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Management Akuntansi BMN (SIMAKBMN).
- 24) Melaksanakan kegiatan Penataan Rumah Negara di lingkungan Ditjen Hubla.
- 25) Melaksanakan kegiatan Penelitian Administrasi dan Teknis dalam rangka serah terima hasil.
- 26) Melaksanakan kegiatan Pembinaan Penghapusan Barang Milik Negara.
- 27) Melaksanakan Pendataan/ Perhitungan SPT Tahunan Pegawai Kantor Pusat.
- 28) Melaksanakan kegiatan Finalisasi Perhitungan Realisasi Anggaran DIPA Kantor Pusat Ditjen Hubla.
- 29) Mengadakan Konsinyering Perhitungan Penggajian Ditjen Hubla.
- 30) Melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi di Bidang Kesekretariatan.



2. Realisasi Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan

- 1) Telah terbit Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 2 Tahun 2011 Tanggal 3 Januari 2011 dan KP. 6 Tahun 2011 Tanggal 10 Januari 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2010 Dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2011 Pada Kantor/UPT Dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 2) Telah terbit Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penggantian/ Revisi Pengelola Anggaran Pada Kantor/ UPT Dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut TA. 2011 yaitu:
 - a) Telah terbit Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 96 Tahun 2011 Tanggal 21 Pebruari 2011 tentang Penggantian/ Revisi Pengelola Anggaran Pada Kantor/ UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2011 (Revisi Ke – 1);
 - b) Telah terbit Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 265 Tahun 2011 Tanggal 13 April 2011 tentang Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran Pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2011 (Revisi Ke – 2);
 - c) Telah terbit Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 450 Tahun 2011 Tanggal 19 Mei 2011 tentang Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran Pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2011 (Revisi Ke – 3);
 - d) Telah terbit Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 527 Tahun 2011 Tanggal 21 Juni 2011 tentang Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran Pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2011 (Revisi Ke – 4);



- e) Telah terbit Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 623 Tahun 2011 Tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran Pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2011 (Revisi Ke – 5);
- f) Telah terbit Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 777 Tahun 2011 Tanggal 26 September 2011 tentang Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran Pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun Anggaran 2011 (Revisi Ke – 6);
- g) Telah terbit Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 908 Tahun 2011 Tanggal 16 Nopember 2011 tentang Penggantian/Revisi Pengelola Anggaran Pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan (Revisi – 7).

b. Kegiatan Operasional

- 1) Telah disusun Dokumen Anggaran Dalam Rangka Pembahasan Penyusunan POK APBN-P Tahun 2011 pada tanggal 31 Oktober – 5 November 2011 di Cipayung.
- 2) Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan pada UPT Ditjen Hubla pada tanggal 2 s.d 12 Mei 2011 dan tanggal 30 Mei – 2 Juni 2011.
- 3) Telah diadakan pendistribusian Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) ke UPT Ditjen Hubla pada tanggal 28 s.d 30 November 2011 dan pada tanggal 1 s.d 3 Desember 2011.
- 4) Telah dilakukan Inventarisasi kesesuaian dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan pencairan pada UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada tanggal 13 s.d 31 Oktober 2011 dan 8 November s.d 11 November.
- 5) Telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran mulai tanggal 1 s.d 17 Desember 2011 di Wisma Priomkokarmar Cipayung Bogor.



- 6) Telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Penerimaan mulai tanggal 1 s.d 8 Desember 2011 di Wisma Priomkokarmar Cipayung Bogor.
- 7) Telah diterbitkan SK. Pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2011.
- 8) Telah disusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran dan neraca setiap Triwulan I, Semester I, Triwulan III dan Tahunan tingkat Eselon I dengan menggunakan aplikasi SAI.



Sumber : Bagian Keuangan, Seditjen Hubla 2011

Gambar III-3. Rekonsiliasi LK semester I di Bandung

- 9) Telah disusun Laporan Realisasi Daya Serap DIPA di tingkat Ditjen Perhubungan Laut :
 - a) Pagu DIPA Reguler TA. 2011 Rp. 7.768.182.346.000,-
realisasi Rp. 6.480.109.182.700,- (83.42 %)
 - b) Belanja Pegawai pagu Rp. 793.079.356.000,-
realisasi Rp. 741.293.729.336,- (93.47%)
 - c) Belanja Barang pagu Rp. 1.529.254.016.000,-
realisasi Rp. 1.313.526.829.461,- (85.89 %)
 - d) Belanja Modal pagu Rp. 5.445.848.974.000,-
realisasi Rp. 4.425.288.623.903,- (81.26 %)
- 10) Telah dilaksanakan kegiatan Penyegaran dan Pemantapan para Pengelola Anggaran Ditjen Hubla di Hotel Grand Cempaka pada Tanggal 4 – 5 Oktober 2011 yang dihadiri UPT Ditjen Hubla.



- 11) Telah diselesaikan tindak lanjut LHP BPK, BPKP dan Itjen Kementerian Perhubungan :

Tabel III-3. Tindak Lanjut LHP BPK-RI

Temuan	Saran	Tuntas	Sisa
12	29	11	18

Tabel III-4. Tindak Lanjut LHP Itjen

Temuan	Proses	Tuntas	Sisa
14.194	11.072	1.764	1.358

- 12) Telah dilaksanakan Rekonsiliasi dan Konsolidasi Laporan Keuangan TA. 2010 dengan mengundang seluruh UPT Ditjen Hubla pada tanggal 10 s.d 22 Januari 2011 di Wisma Bahtera Cipayung Bogor.
- 13) Telah dilaksanakan Sosialisasi SDM Pengelola Keuangan dalam rangka menunjang kegiatan Operasional Perkantoran.
- 14) Telah dilakukan kegiatan penyelesaian TP/TGR yang direvisi menjadi kegiatan penyusunan TP/TGR pada bulan Desember di Wisma Primkokarmar.
- 15) Telah dilakukan Pengelolaan Piutang PNBPN tanggal 14 November – 16 Desember 2011 pada Adpel Ambon, Adpel Manokwari, Adpel Biak, Adpel Pangkal Balam, Adpel Pangklana Susu, Adpel Mendao, Adpel Tanjung Uban, Adpel Kendari, Adpel Palembang, Adpel Samarinda, Adpel Lembar dan Adpel Banten.
- 16) Sudah dilaksanakan Evaluasi Pengelolaan PNBPN.
- 17) Telah dilaksanakan Pembinaan PNBPN pada tanggal 17 Oktober – 3 Desember 2011 pada Adpel Banjarmasin, Adpel Tanjung Wangi, Adpel Pulau Baai, Adpel Malahayati, Adpel Sabang, Adpel Cilacap, Adpel Dumai, Adpel Sei Pakning, Adpel Kuala Enok, Adpel Tembilahan, Adpel Pulau Sambu, Adpel Tanjung Pinang, Adpel Tanjung Balai Karimun, Adpel Sungai Guntung, Adpel Pantoloan, Adpel Tarakan, Adpel Nunukan, Adpel Panjang, Adpel Kuala Tungkal.



- 18) Telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Target di Wisma Abdi Cipayung pada bulan Februari 2011.
- 19) Telah dilakukan kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data PNPB pada tanggal 31 Januari – 5 Februari 2011 di Cipayung.
- 20) Telah dilaksanakan Pembekalan Bendahara Penerima di Surabaya pada Tanggal 21 – 22 Juli 2011 dan di Cirebon pada Tanggal 13 – 14 Juni 2011.



Sumber Bagian Keuangan, Sesditjen Hubla 2011

Gambar III-4. Pembekalan Bendahara Penerima di Surabaya

- 21) Telah dilaksanakan pengelolaan dan penatausahaan BMN di Lingkungan Ditjen Hubla tanggal 19 s.d 23 September 2011 di Cisarua.
- 22) Telah dilaksanakan kegiatan evaluasi penghapusan Barang Milik Negara pada UPT Ditjen Hubla di bulan Februari, Agustus, September dan Oktober tahun 2011.
- 23) Telah disusun Laporan Barang Milik Negara Tingkat Eselon I dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Management Akuntansi BMN (SIMAK BMN).
- 24) Telah dilakukan kegiatan Penataan Rumah Negara pada UPT Ditjen Hubla di bulan November dan Desember Tahun 2011.
- 25) Telah dilaksanakan kegiatan Penelitian Administrasi dan Teknis dalam rangka serah terima hasil pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut di bulan Februari, Juli, November dan Desember tahun 2011.



- 26) Telah dilakukan evaluasi usulan Penghapusan BMN. Data UPT yang telah diterbitkan SK Penghapusan oleh Menteri Perhubungan:
- a) Adpel Teluk Bayur, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.188 Tahun 2011 tanggal 16 Maret 2011;
 - b) Disnav Tanjung Pinang, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.620 Tahun 2011;
 - c) Pangkalan PLP Tg Uban, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.311 Tahun 2011 tanggal 02 Mei 2011;
 - d) Pangkalan PLP Tg. Priok, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.72 Tahun 2011 tanggal 10 Pebruari 2011;
 - e) Adpel Cirebon, Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor KN.46/1/2/DJPL-11 tanggal 24 April 2011;
 - f) Adpel Celukan Bawang, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.306 Tahun 2011 tanggal 29 April 2011;
 - g) Adpel Maumere, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.533 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011;
 - h) Adpel Samuda, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.303 Tahun 2011 tanggal 29 April 2011;
 - i) UPP Lirung, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.399 Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011;
 - j) UPP Mamuju, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.315 Tahun 2011 tanggal 05 Mei 2011;
 - k) UPP Tual, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.213 Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011;
 - l) UPP Geser, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 216 Tahun 2011 tanggal 23 Maret 2011.
- 27) Telah dilaksanakan Pendataan/ Perhitungan SPT Tahunan Pegawai Kantor Pusat di Cipayung pada tanggal 31 Oktober – 3 November tahun 2011.
- 28) Telah dilaksanakan kegiatan finalisasi perhitungan Realisasi Anggaran DIPA Kantor Pusat Ditjen Hubla pada Bulan Desember di Cipayung Bogor.



- 29) Telah dilaksanakan konsinyering perhitungan penggajian Ditjen Hubla.
- 30) Telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi (RAKORNIS) di Bidang Kesekretariatan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di ruang rapat Nanggala pada tanggal 15 s/d 16 Desember 2011.



Sumber Bagian Keuangan Seditjen Hubla

Gambar III-5. Rakornis Bidang Kesekretariatan Ditjen Hubla

3. Permasalahan

- a. Masih terdapat Adpel/UPP Koordinator yang belum maksimal menjalankan tugasnya sebagai UAPPA-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah).
- b. Terlambatnya penyampaian Laporan Realisasi Daya Serap berbasis Aplikasi e-Monitoring dikarenakan sebagian besar dari UPT yang ada belum memiliki SDM dan sarana prasarana yang memadai.
- c. Dalam Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan masih banyak Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menanggapi Laporan Hasil Audit tidak sesuai dengan rekomendasi.
- d. Temuan terkait TP / TGR belum ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- e. Pada UPT masih banyak nilai aset pada SIMAK BMN berbeda dengan nilai yang dihapuskan padahal jenis asetnya sama.
- f. Terdapat Rumah Dinas yang masih dihuni oleh Pensiunan dan Pihak ke 3 (tiga), sehingga tidak sesuai tupoksi.



- g. Kegiatan Serah Terima Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, antara lain :
 - 1) KPA/ PPK yang sudah meninggal atau pensiunan;
 - 2) KPA/ PPK berasal dari Dinas Perhubungan Propinsi yang tidak koordinasi dengan KPA/ PPK dari Ditjen Hubla yang melanjutkan pekerjaan pembangunan tersebut;
 - 3) KPA/ PPK yang sudah pindah tugas ke daerah lain;
 - 4) KPA/ PPK yang tidak mau/ lalai untuk melakukan serah terima pekerjaan;
 - 5) Adanya usulan Serah terima yang masih pending terkait dengan Anggaran Serah Terima.
- h. Kesulitan dalam memonitor DIPA khususnya DIPA hasil pembahasan daerah dan adanya pergeseran pagu (revisi) DIPA yang dilakukan di tingkat Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan daerah masing – masing, dimana koordinasi dari pihak UPT dengan pusat maupun koordinasi antar Ditjen Perbendaharaan Pusat dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan daerah belum maksimal, sehingga menyebabkan kesulitan dalam mengakumulasi data DIPA maupun DIPA revisi.
- i. Pengelolaan PNBPN belum dapat dilaksanakan secara optimal karena ada beberapa kendala di lapangan.
- j. Aplikasi Pelaporan PNBPN belum dapat seluruhnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

4. Upaya Mengatasi Permasalahan

- a. Melakukan Pembinaan Laporan Keuangan dan Neraca tingkat Wilayah yang intensif kepada Adpel/ Kanpel yang di tunjuk sebagai UAPPA-W agar menjalankan tugasnya sebagai UAPPA-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah).
- b. Melakukan Monitoring dan pembinaan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang belum melakukan input realisasi daya serap melalui e-Monitoring agar tertib dalam melakukan input data setiap bulannya.



- c. Melakukan Sosialisasi Tindak Lanjut LHA ITJEN KEMENHUB terhadap UPT – UPT yang belum menyampaikan tanggapan Laporan Hasil Audit serta data dukungannya.
- d. Membuat surat teguran dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait dengan temuan TP/ TGR.
- e. Mengevaluasi nilai aset yang di Simak BMN dengan yang diusulkan penghapusannya dan melakukan pembinaan.
- f. Melakukan Penertiban dan Penataan Rumah Negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- g. Adapun upaya dari kegiatan Serah Terima Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut antara lain :
 - 1) Memprioritaskan untuk dilakukan serah terima terhadap hasil Pengadaan Barang Jasa yang belum dilakukan serah terima kepada Ditjen Hubla yang terjadi sebelum Tahun Anggaran berjalan sampai dengan Tahun Anggaran Berjalan;
 - 2) Adanya tindakan tegas dari Dirjen Hubla berupa teguran kepada KPA/PPK yang belum melakukan serah terima hasil Kegiatan Barang/ Jasa.
- h. Membuat TELEK Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: 97/PHBL-11 Tanggal 6 Juli 2011 Tentang Updating POK DIPA TA. 2011 dan membuat Surat dengan Nomor KN. 37/2/15/DJPL-11 Tanggal 28 Maret 2011 Tentang Penyampaian Usulan Revisi POK TA 2011.
- i. Telah diterbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan PNBP pada peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KU. 007/13/3/DJPL-11 tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan PNBP yang berlaku pada Ditjen Hubla dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan PNBP.
- j. Sosialisasi aplikasi pelaporan PNBP masih terus dijalankan dalam rangka penerapan aplikasi pelaporan PNBP secara menyeluruh.



C. BAGIAN HUKUM

1. Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan

- 1) Penyusunan / Pembahasan 2 (dua) RPP, yaitu :
 - a) RPP tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
 - b) RPP tentang Kesejahteraan Awak Kapal dan Kesehatan Kapal Penumpang;
 - c) RPP tentang Angkutan Multimoda;
 - d) RPP tentang Angkutan di Perairan.
- 2) Penyusunan/ Pembahasan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM), yaitu :
 - a) RPM tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
 - b) RPM tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 - c) RPM tentang Tata Cara Audit dan Sertifikasi Manajemen Keselamatan Kapal;
 - d) RPM tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
 - e) RPM tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal.
- 3) Penyusunan/ penetapan Peraturan menteri Perhubungan terkait dengan kegiatan teknis di lingkungan Ditjen Hubla.
- 4) Penyusunan / Pembahasan 2 (dua) Rancangan Keputusan Dirjen (RKD), yaitu :
 - a) RKD tentang Tatacara Penyetoran, Pelaporan, Penggunaan & Pertanggungjawaban PNPB jasa transportasi laut di Lingkungan Ditjen Hubla;
 - b) RKD tentang Silabus Pelatihan dan Sertifikasi Pandu.

b. Kegiatan Operasional

- 1) Penyusunan pembahasan tanggapan UPT terhadap RPP, RPM dan RKD.
- 2) Inventarisasi pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.



- 3) Bimbingan Teknis Penyusunan Surat Keputusan yang Berlaku di Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 4) Penyusunan Buku Pedoman Pelayanan Publik Direktorat Jenderal perhubungan Laut.
- 5) Bantuan Hukum dan Penyelesaian Perkara.
- 6) Kegiatan perpustakaan/kearsipan/dokumentasi produk – produk hukum.
- 7) Sosialisasi UU Nomor. 17 Tahun 2008, PP dan RAN-PK.
- 8) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen Hubla.
- 9) Kegiatan Monitoring Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan Evaluasi Wilayah Bebas Korupsi.
- 10) Pembuatan dokumentasi foto dan Video Interaktif Ditjen Hubla.
- 11) Kelompok Kerja Monitoring dan Analisa Berita.
- 12) Penyelenggaraan Pameran / Visualisasi.
- 13) Penyelenggaraan Kampanye Keselamatan Pelayaran.
- 14) Penyelenggaraan Jumpa Pers/Siaran Pers.
- 15) Penyelenggaraan Liputan Pers.
- 16) Pemasangan Iklan Layanan Masyarakat.
- 17) Perjalanan Dinas pada Kegiatan dan Sidang Internasional, Regional dan Bilateral.
- 18) Penyelenggaraan Workshop terkait pelaksanaan kegiatan dan kebijakan di lingkungan Ditjen Hubla.
- 19) Berpartisipasi pada Puncak Peringatan Hari Nusantara ke-12 Tahun 2011.

2. Realisasi Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan

- 1) Telah dilaksanakan pembahasan RPP mengenai Pemeriksaan Kecelakaan kapal dan tentang kesejahteraan awak kapal dan kesehatan kapal penumpang, dan saat ini msh dalam tahap pembahsana di tingkat Setjen kemenhub, sedangkan untuk 2 (dua) RPP lainnya telah ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran:



- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.
- 2) Telah dilaksanakan penyusunan/ pembhsan RPM terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan Ditjen hubla, dan saat ini masih dalam proses pembahasan di tingkat Setjen Kemenhub.
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan yang ditetapkan :
 - a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran;
 - c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
 - d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi;
 - e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 53 Tahun 2011 tentang Pemanduan;
 - f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut;
 - g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
 - h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;
 - i) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar.



- 4) Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Silabus Pelatihan dan Sertifikasi Pandu sedangkan untuk RKD tentang Tatacara Penyetoran, Pelaporan, Penggunaan & Pertanggungjawaban PNBP jasa transportasi laut di Lingkungan Ditjen Hubla masih dalam proses lanjut pembahasan.

b. Kegiatan Operasional

- 1) Telah dilaksanakan penyusunan pembahsana terkait masukan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Ditjen Hubla terkait RPP, RPM dan RKD.
- 2) Telah dilaksanakan inventarisasi Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- 3) Telah dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan surat keputusan yang berlaku di lingkungan Ditjen Hubla.
- 4) Telah disusun Buku Pedoman Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 5) Telah dilaksanakan Kegiatan Bantuan Hukum Yang Telah dan Sedang Dalam Proses :
 - a) Penyelesaian perkara di pengadilan
 - (1) Perkara Perdata Nomor : 05/Pdt.G/2007/PN Dumai antara Hj. Bainon (Penggugat) lawan Ditjen Hubla cq Adpel Dumai (Tergugat), yang telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi MA RI Nomor 866.K/PDT/2009 tanggal 15 Oktober 2009;
 - (2) Perkara Perdata Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN Dumai antara H. Amat Piliang (Penggugat) lawan Ditjen Hubla cq Adpel Dumai (Tergugat), yang telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi MA RI Nomor 867.K/PDT/2009 tanggal 15 Oktober 2009;
 - (3) Perkara Perdata Nomor: 27/Pdt.G/2005/PN.PL antara Hi. Moh. Thahir Hi. Moh Thaha (Penggugat) lawan Menhub cq Ditjen Hubla (Tergugat II) ; (Kasasi) perihal permasalahan tanah yang terletak di



desa Ogoamas II milik Sdr. Hi. Moh. Thahir Hi. Moh. Thaha yang dikuasai dan dijadikan lokasi Pelabuhan Ogoamas;

- Telah diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas I Palu Nomor 27/PDT.G/ 2005/PN.PALU tanggal 11 Pebruari 2006 dimana Pihak Penggugat (Hi. Moh. Thaha Hi. Moh. Thahir) dinyatakan sebagai Pemenang.
 - Adanya putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 20/Pdt/2007/PT. PALU yang salah satu putusannya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 Pebruari 2006 dan menghukum Penggugat semula Tergugat II (Kementerian Perhubungan Cq. Ditjen Hubla).
 - Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/ PDT/ 2010 jo. Nomor 20/Pdt/2007/PT. PALU jo. Nomor 27/PDT.G/ 2005/PN.PALU yang menyatakan Menolak permohonan Kasasi dari Pemohonan Kasasi dalam Hal ini Ditjen Hubla.
- (4) Perkara Perdata Nomor : 98/Pdt.G/2004/PN.JPR antara Gerson Yulianus Hassor (Penggugat) lawan Menhub cq Disnav Kelas I Jayapura;(Peninjauan Kembali);
- (5) Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G/2010/PN-BNA antara Musliadi, dkk (Penggugat) lawan Adpel Malahayati (Tergugat I);
- Telah diputus dengan Putusan PN Banda Aceh Nomor 17/Pdt.G/2010/PN-BNA tanggal 4 Mei 2011 dengan amar :
 - a) mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b) menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c) menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian immateriil sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 - d) membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak ditetapkannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.



- Telah dilakukan Upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan masih dalam proses.
- (6) Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 42/G/2008/PTUN.SMD antara D. Syarief (Penggugat) lawan Adpel Tarakan (Turut Tergugat III);
 - Telah diputus dengan Putusan Kasasi Nomor 106 K/TUN/2010 tanggal 14 Juli 2010 dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat.
- (7) Perkara Tata Usaha Negara Nomor : 156/G/2009/PTUN-JKT antara Depalindo (Penggugat) lawan Dirjen Hubla (Tergugat);
 - Telah diputus dengan Putusan Kasasi Nomor 41 K/TUN/2011 tanggal 6 April 2011 dengan putusan menolak permohonan Kasasi Depalindo.
- (8) Perkara Perdata Nomor 06/Pdt.G/2010/PN-Nnk antara H. Mustamin (Penggugat) lawan UPP Sungai Nyamuk (Tergugat I);
 - Telah diputus dengan Putusan PN Nunukan Nomor 06/Pdt.G/2010/PN.Nnk tanggal 27 Mei 2011 dengan putusan :
 - a) mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - b) menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - c) menyatakan Para Tergugat atau siapapun yang menduduki dan menguasai sebagian tanah obyek sengketa dengan luas \pm 5.650 m² berdasarkan perubahan Sertifikat Hak Milik Nomor 288 tanggal 22 Nopember 1989 untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
 - d) menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;



- e) menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa tertanggal 31 Mei 2011;
- f) menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000 sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
 - Telah dilakukan Upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda, dan masih dalam proses.
- (9) Perkara Pidana Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan surat PPKA Angkutan Laut Dalam Negeri yang melibatkan pejabat/pegawai Dit. Lala Ditjen Hubla yang statusnya sebagai Saksi dalam pemeriksaan di Bareskrim Polri;
- (10) Telah diputuskan perkara nomor 74/PUU-VIII/2010 oleh Mahkamah Konstitusi perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimana Mahkamah Konstitusi RI menolak permohonan pengujian pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diajukan oleh Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI);
- (11) Sehubungan dengan adanya penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pelabuhan Khusus Harbour Bay Batam oleh PT. Citra Tritunas, maka Bagian Hukum telah melakukan pendampingan terhadap para mantan pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memberikan kesaksian di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
- b) Pelanggaran Disiplin PNS yang pemeriksaannya melibatkan Subbag Bantuan Hukum dan Dokumentasi.



- 6) Telah dilaksanakan kegiatan perpustakaan/kearsipan/dokumentasi produk – produk hukum melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a) Monitoring dokumentasi produk-produk hukum pada (empat) UPT Ditjen Hubla yaitu :
 - (1) Adpel Semarang;
 - (2) Adpel Benoa;
 - (3) Kanpel Batam; dan
 - (4) Adpel Cirebon.Pelaksanaan kegiatan monitoring tersebut disertai juga dengan penyerahan produk hukum himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
 - b) Telah menghadiri pertemuan berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional XX yang diselenggarakan oleh BPHN Kemenkumham di Palembang Mei 2011.
- 7) Kegiatan Sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Aksi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (AP-KKN) di lingkungan Ditjen Hubla, diselenggarakan di 6 (enam) UPT yaitu :
 - a) Syahbandar kelas Utama Surabaya;
 - b) Adpel kelas I Pontianak;
 - c) Adpel kelas III Lembar;
 - d) Adpel kelas II Kendari;
 - e) Adpel kelas IV Pangkal Balam;
 - f) Adpel kelas II Jayapura.Bersamaan dengan kegiatan Sosialisasi RAN-PK tersebut, telah dilakukan pembagian spanduk dan banner di lokasi kegiatan serta pembagian stiker kepada para peserta sosialisasi yang berisi himbauan anti korupsi sebanyak 300 lembar;
- 8) Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Ditjen Hubla Tahun 2011;
 - a) Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan TA. 2011 yang diselenggarakan pada bulan Juli 2011 di UPT Ditjen Hubla yaitu :



- (1) Kantor Syahbandar kelas Utama Makassar;
 - (2) Adpel kelas II Ternate;
 - (3) Adpel kelas I Balikpapan;
 - (4) Adpel kelas III Kupang;
 - (5) Adpel kelas I Banjarmasin;
 - (6) Kantor Syahbandar kelas Utama Belawan;
 - (7) Adpel Kelas I Bitung;
 - (8) Kantor Pelabuhan Batam;
 - (9) Adpel kelas II Palembang.
- b) Sosialisasi Peraturan Pemerintah yang diselenggarakan di 3 (tiga) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, yaitu :
- (1) Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta;
 - (2) Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;
 - (3) Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, Medan.
- 9) Telah dilaksanakan Kegiatan Monitoring Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan Evaluasi Wilayah Bebas Korupsi, di 6 (enam) UPT yaitu:
- a) Syahbandar kelas Utama Surabaya;
 - b) Adpel kelas I Pontianak;
 - c) Adpel kelas III Lembar;
 - d) Adpel Adpel kelas II Kendari;
 - e) Adpel kelas IV Pangkal Balam;
 - f) Adpel kelas II Jayapura.
- 10) Telah dibuat dokumentasi foto dan video kegiatan perhubungan laut.
- 11) Telah dilaksanakan monitoring dan penyusunan guntingan berita/kliping berita perhubungan laut pada setiap hari kerja, menggandakan sebanyak 17 exemplar dan mendistribusikan kepada para pejabat Eselon I – II di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.
- 12) Berpartisipasi dalam Pameran/ Visualisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan maupun instisuti lain yang terkait dengan penyelenggaraan perhubungan laut dalam rangka mempublikasikan hasil-



hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Laut serta menginformasikan peluang-peluang usaha di Sub Sektor Perhubungan Laut kepada masyarakat, dan salah satu realisasi dari kegiatan tersebut yaitu berperan aktif dalam:

- a. Pameran Industri Bahari Expo 2011 pada tanggal 21 s.d. 24 September 2011 di Surabaya;
 - b. Pameran Industri Pertahanan dan Maritim, yang diselenggarakan pada tanggal 11 s.d 14 Desember 2011 di Dumai, Riau.
- 13) Dengan banyak terjadinya kecelakaan di berbagai moda transportasi maka sangat penting dilakukan kampanye keselamatan pelayaran setiap tahunnya, dan hal ini direalisasikan dengan terselenggaranya Kampanye Keselamatan Pelayaran Tahun 2011 yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli tahun 2011 di Pelabuhan Sunda Kelapa-Jakarta bersamaan dengan perayaan Hari Pelaut Sedunia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan dihadiri oleh seluruh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan seluruh *stakeholders* di bidang pelayaran di wilayah Propinsi DKI Jakarta dan Propinsi Jawa Barat.



Sumber Humas Seditjen Hubla 2011

Gambar III-6. Kampanye Keselamatan Pelayaran



- 14) Telah diselenggarakan Jumpa Pers, Siaran Pers & Wawancara Pers:
- a) Jumpa Pers Apel Satuan dan Sertijab di lingkungan Ditjen Hubla Tahun 2011 pada tanggal 6 Januari 2011;
 - b) Jumpa Pers Pembekalan kepada Pengelola Anggaran Tahun 2011, tanggal 20 Januari 2011;
 - c) Jumpa Pers Penertiban Kapal Ojek di Pelabuhan Muara Angke, tanggal 14 Pebruari 2011;
 - d) Jumpa Pers Peresmian Pengoperasian Dua kapal Perintis, tanggal 7 Maret 2011;
 - e) Jumpa Pers rencana Operasi Penyelenggaraan Marpolex'2011, tanggal 5 April 2011;
 - f) Jumpa Pers Penyelenggaraan Seminar tentang Keselamatan Pelayaran;
 - g) Jumpa Pers tentang Pemeriksaan dan pengujian terhadap kelaiklautan kapal yang dioperasikan PT. Pelabuhan Indonesia II, tanggal 18 April 2011;
 - h) Jumpa Pers tentang Pemulangan TKI Bermasalah (Overstayer). dari Arab Saudi, tanggal 26 April 2011;
 - i) Jumpa Pers tentang Rakor Perintis 2011 tanggal 4 Mei 2011;
 - j) Jumpa Pers Peresmian Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar, tanggal 9 Mei 2011;
 - k) Jumpa Pers Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2011, tanggal 1 Agustus 2011;
 - l) Jumpa Penyelenggaraan Angkutan Natal tahun 2011 dan Tahun Baru 2012 pada Desember 2011.
- 15) Telah diselenggarakan Liputan Pers sebagai berikut:
- a) Liputan Pers dalam rangka angkutan Liburan Sekolah Tahun 2011;
 - b) Liputan Pers dalam Peresmian Kantor Otoritas Pelabuhan Makassar;
 - c) Liputan Pers dalam rangka angkutan lebaran tahun 2011.
- 16) Telah diselenggarakan pemasangan iklan layanan masyarakat, sebagai berikut:



- a) Iklan Layanan Masyarakat tentang Keselamatan Pelayaran di media cetak : Sinar Harapan , edisi 23 Juni 2011, 1 Juli 2011, 7 Desember 2011, 13 Desember 2011);
 - b) Iklan Layanan Masyarakat tentang Angkutan Laut Perintis, di Majalah Tempo edisi 15 Agustus 2011;
 - c) Iklan Layanan Masyarakat tentang penyelenggaraan angkutan lebaran 2011 pada Harian Sinar Harapan edisi 15 Agustus 2011.
- 17) Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Sidang internasional, regional dan bilateral TA. 2011:
- a) 10-14 Januari, Sub-Committee On Stability And Load Lines And IMO On Fishing Vessels Safety (SLF);
 - b) 24-28 Januari, Sub-Committee On Standards Of Training And IMO Watchkeeping (STW);
 - c) 7-11 Februari, Sub-Committee On Bulk Liquids And Gases IMO (BLG);
 - d) 21-25 Februari, Sub-Committee On Flag State Implementation IMO (FSI) – 19th session;
 - e) 7-11 Maret, Sub-Committee On Radio Communications And IMO Search And Rescue (COMSAR);
 - f) 21-25 Maret, Sub-Committee On Ship Design And Equipment IMO;
 - g) 28 Maret – 1 April, IOPC Funds;
 - h) 4-8 April, Legal Committee (LEG);
 - i) 11-20 Mei, Maritime Safety Committee (MSC);
 - j) 6-10 Juni, Sub-Committee On Safety Of Navigation IMO (NAV);
 - k) 21-23 Juni, Technical Co-Operation Committee (TC);
 - l) 27 Juni – 1 Juli, Council;
 - m) 4-8 Juli, IOPC Funds IMO;
 - n) 11-15 Juli, Marine Environment Protection Committee IMO (MEPC);
 - o) 25-29 Juli, Sub-Committee On Fire Protection (FP);
 - p) 5-9 September, Facilitation Committee (FAL);
 - q) 19-23 September, Sub-Committee On Dangerous Goods, Solid IMO Cargoes And Containers (DSC);



- r) 17-21 Oktober, 33rd Consultative Meeting Of Contracting IMO Parties (London Convention 1972);
 - s) 24-28 Oktober, IOPC Funds IMO;
 - t) 17-18 November, Council IMO;
 - u) 21-30 November, Assembly IMO;
 - v) 1 Desember, Council IMO.
- 18) Telah diselenggarakan Workshop- workshop sebagai berikut:
- a. Self Assessment on VIMSAS di Bali pada bulan Oktober dan November 2011;
 - b. Program kerjasama Teknis Bidang Maritim di 3 lokasi yaitu Jawa Barat, Surabaya dan Bali;
 - c. Workshop terkait Sidang Multilateral, Regional dan Bilateral di Batam;
 - d. Workshop International Conference On Liability and Compensation Regime Coverage Tranboundary Oil Prevention Damage Coered by Offshore Exploration and Exploitation Astivities sebanyak 2 kali di Bali pada September 2011.
- 19) Telah dilaksanakan Puncak Peringatan Hari Nusantara ke-12 Tahun 2011 diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2011 di Dumai, Provinsi Riau dengan Inspektur Upacara Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Acara tersebut dihadiri pula oleh Menteri Perhubungan dengan didampingi Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut.

Dan bentuk partisipasi Ditjen Hubla yaitu dengan melaksanakan Gerakan Bersih Laut, yang diselenggarakan secara serentak di pelabuhan di seluruh Indonesia pada tanggal 5 Desember 2011.





Sumber Humas Seditjen Hubla 2011

Gambar III-7. Upacara Puncak Hari Nusantara di Kota Dumai

Pada kesempatan ini pula telah diberikan penghargaan bidang perhubungan laut kepada insan perhubungan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Adapun para penerima penghargaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Sunari dan Sukirno sebagai Penjaga Menara Suar (PMS) Teladan Tingkat Nasional;
- b) Muchtarom sebagai Petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Tingkat Nasional;
- c) Fachrizal sebagai Petugas Pandu Teladan Tingkat Nasional;
- d) Sunarso sebagai Petugas Marine Inspector (MI) Teladan Tingkat Nasional;
- e) PT. Luas Line sebagai Perusahaan Pelayaran Perintis Teladan Tingkat Nasional;
- f) PT. Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) sebagai Perusahaan Pelayaran Niaga Teladan Tingkat Nasional;
- g) Capt. Adrianus Alwie sebagai Nakhoda Teladan Tingkat Nasional.



Sumber Humas Sesditjen Hubla 2011

Gambar III-8. Penerima Penghargaan Bidang Perhubungan Laut



D. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

1. Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan

- 1) Kegiatan Rapat Kerja Ditjen Perhubungan Laut Perhubungan Laut Tahun 2011.
- 2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pejabat Eselon II dan III Kantor Pusat dan Kepala UPT di lingkungan Ditjen Hubla.
- 3) Sosialisasi *database* kepegawaian.
- 4) Penerbitan Kartu Pegawai PNS Ditjen Hubla di tahun 2011.
- 5) Pelaksanaan Sumpah Pegawai Negeri Sipil tahun Anggaran 2011.
- 6) Penanganan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 7) Permohonan kartu istri (Karis) atau kartu suami (Karsu).
- 8) Evaluasi dan Penerbitan Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB).
- 9) Pemrosesan pengajuan cuti pegawai.
- 10) Pemberian penghargaan kepada pegawai Ditjen Perhubungan Laut.
- 11) Pelaksanaan Mutasi jabatan struktural.
- 12) Pemrosesan Kenaikan pangkat.
- 13) Pemrosesan Jabatan fungsional.
- 14) Pemrosesan Usulan pensiun, umum, dan kepangkatan.
- 15) Pembuatan DP3.
- 16) Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan.

b. Kegiatan Operasional

- 1) Diklat penjenjangan struktural (Diklat Kepemimpinan).
- 2) Diklat teknis fungsional Perhubungan Laut.
- 3) Diklat Penunjang.
- 4) Diklat Prajabatan Gol. I dan II.
- 5) Evaluasi Kebutuhan Diklat Tahun 2011-2015 Ditjen Hubla.
- 6) Penyelenggaraan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah.
- 7) Penanganan surat masuk dan surat keluar.
- 8) Penyuluhan/Pembinaan SAP.



- 9) Pengadaan Jamuan rapat.
- 10) Pengadaan ATK.

2. Realisasi Program Kerja

a. Kegiatan Pemerintahan

- 1) Telah dilaksanakan Rapat **Kerja Ditjen Perhubungan Laut Perhubungan Laut Tahun 2011 dengan tema** "Jajaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Siap Menjadi Mitra Terpercaya bagi Dunia Usaha Transportasi Laut guna Mendukung Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat", yang diselenggarakan pada tanggal 14 s/d 15 Januari 2011 di Hotel Golden Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan dengan peserta sebanyak 325 orang yang terdiri dari:
 - a) Pejabat eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - b) Para Kepala Kantor Adpel Kelas Utama;
 - c) Para Kepala Kantor Adpel Kelas I;
 - d) Kepala Kantor Pelabuhan Kelas I;
 - e) Para Kadisnav Kelas I;
 - f) Para Kepala Kantor Adpel Kelas II;
 - g) Para Kadisnav Kelas II;
 - h) Kepala Pangkalan PLP Kelas I;
 - i) Kepala BTKP;
 - j) Kepala BKPP;
 - k) Para Kepala Kantor Adpel Kelas III;
 - l) Para Kadisnav Kelas III;
 - m) Para Kepala Kantor Pelabuhan Kelas III;
 - n) Para Kepala Kantor Adpel Kelas IV;
 - o) Para Kepala Kantor Pelabuhan Kelas IV;
 - p) Kepala Pangkalan PLP Kelas II;
 - q) Para Kepala Kantor Adpel Kelas V;
 - r) Para Kepala Kantor Pelabuhan Kelas V.



- 2) Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 14 Tahun 2011 Tentang Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pejabat Eselon II ke bawah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah dilaksanakan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pejabat Eselon II dan III Kantor Pusat dan Kepala UPT di lingkungan Ditjen Hubla pada tanggal 23 Desember 2011 yang diikuti oleh 82 orang peserta.



Sumber : Bagian Kepegawaian dan Umum, Sesditjen Hubla 2011

Gambar : III-9. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Pejabat Eselon II

- 3) Kegiatan Sosialisasi *Database* Kepegawaian telah dilaksanakan di 10 (sepuluh) lokasi yaitu:
- a) Kantor Adpel Kelas III Lhokseumawe tanggal 11 s/d 13 April 2011 yang dihadiri oleh 17 peserta perwakilan dari UPT di sekitarnya;



- b) Kantor Adpel Kelas III Ternate tanggal 21 s/d 23 Maret 2011 yang dihadiri oleh 15 peserta perwakilan dari UPT di sekitarnya;
 - c) Kantor Otoritas Pelabuhan Tg. Perak tanggal 11 s/d 13 April 2011 yang dihadiri oleh 30 peserta perwakilan dari UPT di sekitarnya;
 - d) Kantor Pelabuhan Kelas I Batam tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 yang dihadiri oleh 63 peserta perwakilan dari UPT di sekitarnya;
 - e) Kantor Disnav Kelas II Banjarmasin tanggal 11 s/d 13 April 2011 yang dihadiri oleh 21 peserta perwakilan dari UPT di sekitarnya;
 - f) Kantor Disnav Kelas I Ambon tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 yang dihadiri oleh 38 peserta perwakilan dari UPT di sekitarnya;
 - g) Kantor Disnav Kelas I Belawan tanggal 21 s/d 23 Maret 2011 yang dihadiri oleh 39 peserta perwakilan dari UPT di sekitarnya;
 - h) Kantor Disnav Kelas III Cilacap tanggal 11 s/d 13 April 2011 yang dihadiri oleh 12 peserta perwakilan dari UPT di sekitarnya;
 - i) Kantor Disnav Kelas I Tg. Priok tanggal 21 s/d 23 Maret 2011 yang dihadiri oleh 26 peserta perwakilan dari UPT di sekitarnya;
 - j) Kantor Adpel Kelas III Pantoloan tanggal 14 s/d 16 Maret 2011 yang dihadiri oleh 16 peserta perwakilan dari UPT di sekitarnya.
- 4) Telah diterbitkan Kartu Pegawai PNS Ditjen Hubla di tahun 2011 sebanyak 757 kartu.
 - 5) Telah dilaksanakan Sumpah Pegawai Negeri Sipil tahun Anggaran 2011 yang diikuti sebanyak 943 PNS di 12 lokasi.
 - 6) Telah dilaksanakan penanganan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011.

Tabel III-5. Penanganan Disiplin PNS

NO	KASUS	KEPUTUSAN / SK	JUMLAH
1.	Permohonan ijin cerai	Menhub	-
		Dirjen Perhubungan Laut	7 kasus
2.	Pelanggaran disiplin	Menhub	18 kasus
		Dirjen Perhubungan Laut	16 kasus
		TOTAL	41 kasus

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011



a) Laporan kasus Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2011

Tabel III-6. Laporan Kasus Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

NO.	Permasalahan	Realisasi	Dalam Proses	Jumlah
1.	Pelanggaran Disiplin	26	31	57
2.	Permohonan ijin cerai	6	10	16
3.	Kinerja Adpel/Kanpel	3	3	6
4.	Tindak pidana korupsi	1	0	1
5.	Perselingkuhan/PP No. 10 Tahun 1980/nikah siri/poligami	3	6	9
6.	Mengundurkan diri	3	1	4
7.	Pemalsuan tanda tangan/surat	1	1	2
8.	Tindak pidana narkotika	2	1	3
9.	Penipuan	1	1	2
10.	Ijazah palsu	2	0	2
11.	Ijazah Pelaut Palsu	2	0	2
12.	Perbuatan tidak menyenangkan	0	2	2
13.	Tindak pidana penganiayaan	1	1	2
14.	Tindak pidana pencurian	1	0	1
15.	Penggelapan PNBP	1	0	1
16.	Dugaan pungli	0	2	2
17.	Penelantaran anak istri	0	1	1

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011

b) Laporan Pemeriksaan Ijazah Pelaut

Tabel III-7. Laporan Pemeriksaan Ijazah Pelaut

JUMLAH	TEMUAN	KETERANGAN
3 (tiga) lokasi : Batam, Pekanbaru dan Tanjung Uban	4 ijazah palsu	BAP dilaksanakan di UPT tersebut

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011



c) Laporan kegiatan Sosialisasi Disiplin PNS

Tabel III-8. Sosialisasi Disiplin PNS

NO	LOKASI	PESERTA
1.	Adpel Bitung	10 UPT
2.	Adpel Dumai	14 UPT
3.	Adpel Panjang	6 UPT
4.	Adpel Sorong	15 UPT
5.	Disnav Semarang	8 UPT
6.	Disnav Ambon	24 UPT
7.	Adpel Benoa	6 UPT
8.	Adpel Samarinda	14 UPT
9.	Adpel Jayapura	8 UPT
10.	UPP Manggar	4 UPT
11.	Adpel Sampit	8 UPT
12.	Adpel Kupang	14 UPT
13.	Adpel Gorontalo	3 UPT
14.	Disnav Tg Pinang	12 UPT
15.	Disnav Teluk Bayur	4 UPT
16.	Disnav Belawan	12 UPT
17.	Adpel Kendari	6 UPT
18.	Adpel Lhokseumawe	11 UPT
19.	Disnav Surabaya	8 UPT
20.	Adpel Bima	7 UPT

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011

- 7) Telah diterbitkan Kartu Istri (Karis) sebanyak 415 (empat ratus lima belas) kartu dan Kartu Suami (Karsu) sebanyak 61 (enam puluh satu) kartu.
- 8) Telah dievaluasi dan diterbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Tahun 2011 pada setiap unit kerja sebagai berikut:

Tabel III-9. Kenaikan Gaji Berkala

NO	UNIT ORGANISASI	JUMLAH
1	Golongan IV	13 orang
2	Golongan III	172 orang
3	Golonga II	55 orang
4	Golongan I	2 orang

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011



9) Pemrosesan Cuti pada tahun 2011

Tabel III-10. Pemrosesan Cuti

NO.	JENIS CUTI	JUMLAH
1.	Cuti Tahunan	150
2.	Cuti Bersalin	5
3.	Cuti Besar	4
4.	Cuti Alasan Penting	21
5.	Cuti Sakit	0
J U M L A H		180

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011

10) Telah dilaksanakan pemberian penghargaan kepada Pegawai Ditjen Perhubungan Laut

Tabel III-11. Pemberian Penghargaan kepada Pegawai

No	PENGHARGAAN	REALISASI
1.	Penghargaan 30 Tahun	279
2.	Penghargaan 20 Tahun	343
3.	Penghargaan 10 Tahun	205
4.	Satya Lencana Bahari	0
J U M L A H		827

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011

11) Telah dilaksanakan evaluasi dan proses Mutasi Jabatan Struktural

Tabel III-12. Mutasi Jabatan Struktural

NO.	MUTASI	JUMLAH
1.	Eselon II	13
2.	Eselon III	64
3.	Eselon IV	172
4.	Eselon V	18

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011



12) Kenaikan Pangkat

Tabel III-13. Kenaikan Pangkat

GOLONGAN	TMT		KETERANGAN
	1 APRIL 2011	1 OKT 2011	
Gol. I			Berkas yang batal / TMS (Tidak Memenuhi Syarat) – Kelas jarak jauh – Tidak ada PAK
I/c – I/d	104	0	
	203	0	
Gol. II	104		
I/d – II/a	104	2	
II/a – II/b		23	
II/b – II/c	46	82	
II/c – II/d	0	78	
PI Gol. II	0		
I/c – II/a	104	76	
I/d – II/a	203	7	
II/a – II/c	104	27	
JUMLAH	104	295	
Gol. III	46		
II/d – III/a	0	104	
III/a – III/b	0	203	
III/b – III/c	104	104	
III/c – III/d	203	104	
PI Gol. III	104		
II/b – III/a	104	46	
II/c – III/a		0	
II/d – III/a	46	0	
JUMLAH	0	561	
	0		
Gol. IV	104		
III/d – IV/a	203	21	
IV/a – IV/b	104	5	
IV/b – IV/c	104	1	
IV/c – IV/d		0	
IV/d – IV/e	46	0	
JUMLAH	0	27	
	0		
Jum. Usulan	591	908	
Batal / TMS	30	25	
Jum. Realisasi	561	883	

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011



13) Jabatan Fungsional

Tabel III-14. Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional PKP

NO	JABATAN	Periode 01-04-2011		Periode 01-10-2011		JUMLAH
		DAPAT	TIDAK DAPAT	DAPAT	TIDAK DAPAT	
1	PKP Muda	5	18	7	13	43
2	PKP Pertama	9	40	15	33	97
3	PKP Penyelia	21	89	19	57	186
4	PKP Pelaksana Lanjt	22	172	42	164	400
5	PKP Pelaksana	14	118	46	112	290
6	PKP Pelaksana Pemula	1	3	3	4	11
	TOTAL	72	440	132	383	1027

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Seditjen Hubla 2011

Tabel III-15. Pengangkatan Pertama Pejabat Fungsional PKP

NO	JABATAN	JUMLAH
1	PKP Pertama	1
2	PKP Pelaksana Lanjutan	1
3	PKP Pelaksana	18
4	PKP Pelaksana Pemula	7
	TOTAL	27

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Seditjen Hubla 2011



Tabel III-16. Pejabat Fungsional PKP yang Naik Jenjang

NO	JABATAN	01-04-011	01-04-2011	JUMLAH
1	PKP Madya	0	1	0
2	PKP Muda	13	9	22
3	PKP Penyelia	18	32	50
4	PKP Pelaksana Lanjutan	52	39	91
5	PKP Pelaksana	3	5	8
	TOTAL	86	86	172

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Seditjen Hubla 2011

14) Urusan Pensiun, Umum, dan Kepangkatan

Tabel III-17. Urusan Pensiun dan Umum

No.	Program	Realisasi
	Jenis Pensiun	
	a. Usia Lanjut	
1.	Golongan IV/e	-
2.	Golongan IV/d	-
3.	Golongan IV/c	2
4.	Golongan IV/b	1
5.	Golongan IV/a	15
6.	Golongan III/d	57
7.	Golongan III/c	60
8.	Golongan III/b	131
9.	Golongan III/a	31
10.	Golongan II/d	36
11.	Golongan II/c	31
12.	Golongan II/b	9
13.	Golongan II/a	31
14.	Golongan I/d	-



No.	Program	Realisasi
	b. Janda / Duda	
1.	Golongan IV/e	-
2.	Golongan IV/d	1
3.	Golongan IV/c	-
4.	Golongan IV/b	-
5.	Golongan IV/a	1
6.	Golongan III/d	1
7.	Golongan III/c	7
8.	Golongan III/b	17
9.	Golongan III/a	10
10.	Golongan II/d	5
11.	Golongan II/c	5
12.	Golongan II/b	3
13.	Golongan II/a	-
14.	Golongan I/d	1
15.	Golongan I/c	-
	c. APS (Atas Permintaan Sendiri)	7
	d. Pensiun Anumerta	1
	e. Pensiun Keuzuran Jasmani	1
	J U M L A H	463

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011

Tabel III-18. Usulan Pengangkatan PNS

NO	KEGIATAN	RENCANA	REALISASI	KET
1.	Memproses Usulan Pengangkatan			
	a. Pengangkatan CPNS TMT 01-12-2011	960	960	
	b. Pengangkatan PNS TMT 01-12-2011	772	772	
2.	Karpeg Tahun 2011	757	757	
3.	Sumpah PNS Tahun 2011	943	943	

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011



15) Pembuatan DP3 Pejabat Struktural

Tabel III-19. DP3 Pejabat Struktural

NO.	ESELON	REALISASI
1.	Eselon II	22
2.	Eselon III	153
3.	Eselon IV	347
4.	Eselon V	0
J U M L A H		552

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011

- 16) Telah dilaksanakan Ceramah Agama dan Bazar Busana Muslim yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 9 November 2011 di Ruang Mataram Kementerian Perhubungan dengan penceramah Ustad Jefri Al Boqhori Tema "Ikhlas Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat"



Sumber: Humas Ditjen Hubla 2011

Gambar III-10. Ceramah Keagamaan



b. Kegiatan Operasional

1) Diklat Penjenjangan Struktural (Diklat Kepemimpinan)

Tabel III-20. Diklat Kepemimpinan

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH	KET
1.	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	6 Orang	DIPA Pusbang SDM Perhubungan
2.	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	53 Orang	DIPA Ditjen Hubla (2 angkatan)
3.	Diklat Kepemimpinan Tk. III	16 Orang	DIPA Pusbang SDM Perhubungan (2 angkatan)
4.	Diklat Kepemimpinan Tk. III	39 Orang	DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
5.	Diklat Kepemimpinan Tk. II	5 Orang	DIPA Pusbang SDM Perhubungan (3 angkatan)

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011

2) Diklat Teknis Fungsional Perhubungan Laut

Tabel III-21. Diklat Teknis Fungsional

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH	PELAKSANAAN	KET
1.	TTPL Pratama Angk. I	29 Orang	Januari – Maret	DIPA BP2TL
2.	TTPL Pratama Angk. II	30 Orang	Maret – April	- sda -
3.	TTPL Pratama Angk. III	30 Orang	Maret – Mei	- sda -
4.	TTPL Pratama Angk. IV	30 Orang	April – Mei	- sda -
5.	Kepelabuhanan Angk. I	30 Orang	Januari – Pebruari	- sda -
6.	Kepelabuhanan Angk. II	30 Orang	Pebruari – Maret	- sda -
7.	Kepelabuhanan Angk. III	28 Orang	September – Oktober	- sda -
8.	Kepelabuhanan Angk. IV	28 Orang	Oktober – Nopember	- sda -
9.	Kepelabuhanan Angk. V	30 Orang	Oktober – Nopember	- sda -
10.	Ketatalaksanaan Angkutan Laut Angk. I	30 Orang	Januari – Pebruari	- sda -
11.	Ketatalaksanaan Angkutan Laut Angk. II	30 Orang	Januari – Pebruari	- sda -
12.	Ketatalaksanaan Angkutan Laut Angk. III	30 Orang	April – Mei	- sda -
13.	Ketatalaksanaan Angkutan Laut Angk. IV	30 Orang	Juli – Agustus	- sda -
14.	Ketatalaksanaan Angkutan Laut Angk. V	26 Orang	Oktober – Nopember	- sda -
15.	KPLP Tingkat Tamtama	30 Orang	Januari – Pebruari	- sda -
16.	TTPL Madya	29 Orang	Pebruari – Maret	- sda -
17.	KPLP Bintara	30 Orang	Pebruari – April	- sda -
18.	SBNP Tingkat Dasar	29 Orang	Pebruari – April	- sda -
19.	Marine Inspector Type "B"	30 Orang	Maret – Mei	- sda -



NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH	PELAKSANAAN	KET
20.	Pengukuran Kapal Angk. I	30 Orang	Mei – Agustus	- sda -
21.	Pengukuran Kapal Angk. II	30 Orang	Mei – Agustus	- sda -
22.	KPLP Perwira	28 Orang	Mei – Juli	- sda -
23.	Marine Inspector Type "A" Angk. I	29 Orang	Mei – Agustus	- sda -
24.	Marine Inspector Type "A" Angk. II	30 Orang	Mei – Agustus	- sda -
25.	Kesyahbandaran Kelas "B"	30 Orang	September – Oktober	- sda -
26.	Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran	30 Orang	April – Mei	- sda -
27.	Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	30 Orang	September – Nopember	- sda -
28.	Kesyahbandaran Kelas "A" Angk. I	30 Orang	September – Oktober	- sda -
29.	Kesyahbandaran Kelas "A" Angk. II	30 Orang	Oktober – Nopember	- sda -
30.	SBNP Tingkat Terampil	24 Orang	September – Nopember	- sda -
31.	Marine Inspector Radio	30 Orang	September – Oktober	- sda -

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011

3) Diklat Penunjang

Tabel III-22. Diklat Penunjang

NO.	NAMA DIKLAT	PESERTA
1.	Budaya Kerja	35 Orang
2.	<i>Legal drafting</i>	2 Orang
3.	<i>Job Analisis</i>	2 Orang
4.	Analisis Pemecahan Masalah	3 Orang
5.	<i>Master of Ceremony</i>	3 Orang
6.	Kepengacaraan	7 Orang
7.	Bahasa Indonesia	2 Orang
8.	Arsiparis Tk. Terampil	4 Orang
9.	TOEFL Preparation	1 Orang
10.	<i>General English Up-Grading</i>	7 Orang
11.	Analisis Kepegawaian Keterampilan	3 Orang
12.	Sistem Informasi Geografis Tk. Operator	2 Orang
13.	Perencana Tingkat Pertama	1 Orang

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 2011



- 4) Diklat Prajabatan Gol I dan II Formasi 2010 diikuti oleh 1082 peserta
- 5) Latihan Dasar CPNS Ditjen Hubla Gol I s/d III Formasi 2010 diikuti oleh 1.082 peserta
- 6) Evaluasi kebutuhan diklat tahun 2011-2015 Ditjen Hubla
- 7) Menyelenggarakan Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Tabel III-23. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN DAN JUMLAH PESERTA	REALISASI
1	2	3	5
I.	Pelaksanaan UD Tk. I dan PI Tk. Sarmud dibawah Tahap I TA. 2011 dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 April 2011 di 7 (tujuh) lokasi	<p>Ujian Dinas Tk. I Tahap I TA. 2011 UPT Koordinator</p> <p>Kantor PLP Tg. Priok = UPT = Orang Kantor Syahbandar Tg. Perak = UPT = Orang Kantor Adpel Banjarmasin = UPT = Orang Kantor Adpel Ternate = UPT = Orang Kantor Disnav Sorong = UPT = Orang Kantor Disnav Benoa = UPT = Orang Kantor Disnav Kendari = UPT = Orang</p> <p style="text-align: right;"><i>Jumlah</i> = UPT = 138 Orang</p>	138
		<p>PI Tk. D. III Tahap I TA. 2011 UPT Koordinator</p> <p>Kantor PLP Tg. Priok = UPT = Orang Kantor Syahbandar Tg. Perak = UPT = Orang Kantor Adpel Banjarmasin = UPT = Orang Kantor Adpel Ternate = UPT = Orang Kantor Disnav Sorong = UPT = Orang Kantor Disnav Benoa = UPT = Orang Kantor Disnav Kendari = UPT = Orang</p> <p style="text-align: right;"><i>Jumlah</i> = UPT = 32 Orang</p>	32
		<p>PI Tk. SLTA Tahap I TA. 2011 UPT Koordinator</p> <p>Kantor PLP Tg. Priok = UPT = Orang Kantor Syahbandar Tg. Perak = UPT = Orang Kantor Adpel Banjarmasin = UPT = Orang Kantor Adpel Ternate = UPT = Orang Kantor Disnav Sorong = UPT = Orang Kantor Disnav Benoa = UPT = Orang Kantor Disnav Kendari = UPT = Orang</p> <p style="text-align: right;"><i>Jumlah</i> = UPT = 193 Orang</p>	193



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN DAN JUMLAH PESERTA	REALISASI
1	2	3	5
II.	Pelaksanaan UD Tk. I dan PI Tk. Sarmud dibawah Tahap II TA. 2011 dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 22 Juli 2011 di 6 (enam) lokasi	<p>Ujian Dinas Tk. I Tahap II TA. 2011</p> <p>UPT Koordinator</p> <p>Kantor Syahbandar Belawan = UPT = Orang</p> <p>Kantor Adpel Samarinda = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Ambon = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Tg. Pinang = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Semarang = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Pontianak = UPT = Orang</p> <p style="text-align: right;"><i>Jumlah</i> = UPT = 121 Orang</p> <p>PI Tk. DIII Tahap II TA. 2011</p> <p>UPT Koordinator</p> <p>Kantor Syahbandar Belawan = UPT = Orang</p> <p>Kantor Adpel Samarinda = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Ambon = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Tg. Pinang = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Semarang = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Pontianak = UPT = Orang</p> <p style="text-align: right;"><i>Jumlah</i> = 21 UPT = 31 Orang</p> <p>PI Tk. SLTA Tahap II TA. 2011</p> <p>UPT Koordinator</p> <p>Kantor Syahbandar Belawan = UPT = Orang</p> <p>Kantor Adpel Samarinda = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Ambon = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Tg. Pinang = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Semarang = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Pontianak = UPT = Orang</p> <p style="text-align: right;"><i>Jumlah</i> = UPT = 105 Orang</p>	<p>121</p> <p>31</p> <p>105</p>
III.	Pelaksanaan UD Tk. I dan PI Tk. Sarmud dibawah Tahap III TA. 2011 dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 25 Juli 2011 di 6 (enam) lokasi	<p>Ujian Dinas Tk. I Tahap II TA. 2011</p> <p>UPT Koordinator</p> <p>Kantor Syahbandar Makassar = UPT = Orang</p> <p>Kantor Adpel Panjang = UPT = Orang</p> <p>Kantor Adpel Merauke = UPT = Orang</p> <p>Kantor Adpel Biak = UPT = Orang</p> <p>Kantor Adpel Kupang = UPT = Orang</p> <p>Kantor Disnav Teluk Bayur = UPT = Orang</p> <p style="text-align: right;"><i>Jumlah</i> = UPT = 98 Orang</p> <p>PI Tk. DIII Tahap II TA. 2011</p> <p>UPT Koordinator</p> <p>Kantor Syahbandar Makassar = UPT = Orang</p> <p>Kantor Adpel Panjang = UPT = Orang</p>	<p>98</p>



NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI PELAKSANAAN DAN JUMLAH PESERTA	REALISASI
1	2	3	5
		Kantor Adpel Merauke = UPT = Orang Kantor Adpel Biak = UPT = Orang Kantor Adpel Kupang = UPT = Orang Kantor Disnav Teluk Bayur = UPT = Orang Jumlah = UPT = 21 Orang	21
		PI Tk. SLTA Tahap II TA. 2011 UPT Koordinator Kantor Syahbandar Makassar = UPT = Orang Kantor Adpel Panjang = UPT = Orang Kantor Adpel Merauke = UPT = Orang Kantor Adpel Biak = UPT = Orang Kantor Adpel Kupang = UPT = Orang Kantor Disnav Teluk Bayur = UPT = Orang Jumlah = UPT = 61 Orang	61
		Total Jumlah Peserta UD Tk.I dan PI Tk. Sarmud ke Bawah Tahap I , II, dan III TA. 2011	800
IV.	Penyesuaian Ijazah Tk. Sarjana Tahap I TA. 2011 Dilaksanakan pada tanggal 4 s/d13 April 2011	Hotel Puncak Raya Cipayung Bogor	31
	Penyesuaian Ijazah Tk. Sarjana Tahap II TA. 2011 Dilaksanakan pada tanggal 23 Mei s/d 21 Juni 2011	Hotel Puncak Raya Cipayung Bogor	18
	Penyesuaian Ijazah Tk. Sarjana Tahap III TA. 2011 Dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober s/d Nopember 2011	Wisma Primkokarmar Cipayung Bogor	128
	Total Jumlah Peserta PI Tk. Sarjana		177

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Seditjen Hubla 2011

- 8) Penanganan surat masuk dan surat keluar.
Jumlah surat menurut jenis dan penanganannya.

Tabel III-24. Jumlah Surat Masuk

No.	Jenis Surat	Jumlah Surat
1	NON TAKAH	66.194
2	TAKAH	1.503
3	RAHASIA	168
4	TAKAH TAHASIA	30
5	TELEX	—

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Seditjen Hubla 2011



Tabel III-25. Jumlah Surat Keluar

No.	Jenis Surat	Jumlah Surat
1	NON TAKAH	10.759
2	TAKAH	703
3	RAHASIA	35
4	TAKAH RAHASIA	2
5	TELEX	217

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 201

Tabel III-26. Penyuluhan/Pembinaan SAP

NO.	LOKASI	WAKTU	PESERTA
1.	Padang	15 s/d 18 Juni 2010	8 UPT
2.	Banjarmasin	22 s/d 25 Juni 2010	11 UPT
3.	Manado	29 Juni s/d 2 Juli 2010	19 UPT
4.	Balikpapan	29 Juni s/d 2 Juli 2010	12 UPT
5.	Pontianak	6 s/d 9 Juli 2010	6 UPT
6.	Jayapura	6 s/d 9 Juli 2010	12 UPT
7.	Batam	13 s/d 16 Juli 2010	16 UPT
8.	Banten	14 s/d 17 Juli 2010	8 UPT
9.	Benoa	20 s/d 23 Juli 2010	12 UPT
10.	Palembang	3 s/d 6 Agustus 2010	18 UPT

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum Sesditjen Hubla 201

- 9) Telah dilaksanakan Jamuan rapat.
- 10) Pengadaan ATK untuk memenuhi kebutuhan ATK dilingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

3. Permasalahan

- a. Sistem *database* yang sedang berjalan sekarang ini, masing sering dijumpai kurang-lengkapan fitur-fitur *updating* data, seperti:
 - 1) Belum lengkapnya data pilihan nomenklatur jabatan-jabatan fungsional yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 2) Masih ada UPT yang belum dapat melakukan *updating* data secara *online* karena tidak tersedia jaringan internet guna mendukung kegiatan tersebut
- b. Pada penyelesaian kasus ataupun proses pemberhentian PNS terdapat beberapa kendala antara lain:



- 1) Ketidaklengkapan berkas kasus yang dikirimkan sehingga menghambat proses penanganan kasus;
 - 2) Adanya pelanggaran kasus di UPT yang tidak dilaporkan ke kantor pusat;
 - 3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin meninggalkan tugas, tidak pernah dilakukan absensi oleh UPT yang bersangkutan dan gaji tetap dibayarkan;
 - 4) Anggaran masih ada tanda bintang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Anggaran dan besarnya tidak mencukupi untuk seluruh UPT yang ada pengaduan.
- c. Untuk menghindari jumlah pelamar yang berlebihan maka ditentukan perbandingan antara formasi dan rasio jumlah pelamar yaitu 1:20.
 - d. Berkas usulan pensiun yang dikirim ke Bagian Kepegawaian dan Umum tidak lengkap.

4. Upaya Mengatasi Permasalahan

- a. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala *database* antara lain:
 - 1) Melaporkan kepada pimpinan mengenai kekurangan data nomenklatur jabatan fungsional agar ditindaklanjuti;
 - 2) Menyampaikan kepada pimpinan UPT agar menggunakan fasilitas modem portabel guna memudahkan proses *updating* data secara *online*.
- b. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyelesaian kasus atau proses pemberhentian PNS antara lain:
 - 1) Meminta agar dilaksanakan BAP oleh UPT setempat;
 - 2) Mengupayakan penambahan anggaran melalui ABT.
- c. Sebaiknya rasio antara formasi dan jumlah pelamar tidak dibatasi karena menimbulkan dampak negatif terutama untuk kualifikasi pendidikan dan daerah tertentu.
- d. Menghubungi UPT pengusul untuk mengirimkan berkas-berkas yang belum dilampirkan dalam usulan pensiun.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)												KETERANGAN
		TAHUN 2011												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	









































INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN HUBLA

NO	REVISI SASARAN	REVISI IKU	SATUAN	TARGET			
				2011	2012	2013	2014
1.	Meningkatnya Keselamatan Pelayaran dan Keamanan Transportasi Laut	1) Penurunan tingkat kejadian kecelakaan	%	5	5	5	5
2.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut.	2) a) Prosentase peningkatan pangsa muatan kapal nasional untuk angkutan laut - dalam negeri - luar negeri; b) Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional; c) Prosentase Peningkatan aksesibilitas angkutan laut perintis, pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan dan daerah belum berkembang.	% % % %	98,82 9,50 3,65 13,04	98,85 10,00 4,10 20,65	98,90 10,33 4,52 27,17	99,00 10,51 5,24 38,04
3.	Meningkatnya pelayanan kepelabuhan nasional melalui peningkatan kapasitas pelabuhan	3) a) Penurunan Waiting Time operasional di pelabuhan yang diusahakan; b) Jumlah kebutuhan pelabuhan yang tidak diusahakan pada wilayah terpencil, terluar, daerah perbatasan melalui: - Pembangunan pelabuhan baru dalam rangka membuka outlet yang belum terlayani;	Jam Lokasi	1,3 65	1,3 102	1,5 111	1,5 121

INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN HUBLA

NO	REVISI SASARAN	REVISI IKU	SATUAN	TARGET			
				2011	2012	2013	2014
		- Lanjutan Pembangunan Pelabuhan baru dalam rangka menuju keterbukaan outlet;	Lokasi	149	114	124	135
		- Pengembangan, rehabilitasi dan replace Fasilitas Pelabuhan dalam rangka pemulihan dan peningkatan Kapasitas Pelabuhan;	Lokasi	23	37	40	44
		- Penyelesaian Pelabuhan baru dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi wilayah	Lokasi	25	95	104	113
4.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia serta Administrasi Negara di sektor Transportasi Laut.	4) a) Jumlah kebutuhan awak kapal patroli;	%	37,9	37,9	43,19	48,5
		b) Jumlah kebutuhan tenaga <i>marine inspector A</i>	Orang	60	60	60	60
		c) Jumlah kebutuhan tenaga <i>marine inspector B</i>	Orang	60	120	120	120
		d) Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas A	Orang	60	60	60	60
		e) Jumlah kebutuhan tenaga Kesyahbandaran Kelas B	Orang	120	120	120	120
		f) Jumlah penyelesaian regulasi	Peraturan Pemerintah	1	1	1	-
			Peraturan Menteri	7	2	3	4
			RPP	3	2	3	4
			RPM	5	5	5	5

INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN HUBLA

NO	REVISI SASARAN	REVISI IKU	SATUAN	TARGET			
				2011	2012	2013	2014
			Keputusan Dirjen	1	1	1	1
5.	Meningkatnya pelayanan dalam rangka perlindungan lingkungan maritim dibidang transportasi laut	5) a) Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan pencemaran; b) Jumlah kebutuhan tenaga penanggulangan kebakaran c) Jumlah kebutuhan tenaga penyelam; d) Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat IOPP (International Oil polution Prevention); e) Jumlah kebutuhan pemilikan SNPP (Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran); f) Jumlah kebutuhan pemilikan sertifikat bahan cair beracun (Noxious Liquid Substance); g) Peningkatan pemahaman aparat UPT Ditjen Hubla terhadap pembangunan dan operasional pelabuhan yang berwawasan lingkungan	Orang Orang Orang Sertifikat Sertifikat Sertifikat UPT	1.764 1.232 1.232 981 1.389 104 5	1.764 1.232 1.232 1.021 1.527 134 5	1.764 1.232 1.232 1.123 1.679 152 5	1.764 1.232 1.232 1.347 1.846 165 5

PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI BADAN USAHA PELABUHAN

NO	NAMA BUP	PENETAPAN	TANGGAL	KET.
1	PT. Vita Benua Inti	Kepmenhub No. KP 13 Tahun 2011	17 Januari 2011	
2.	PT. Sarana Citranusa Kabil	Kepmenhub No. KP 15 Tahun 2011	17 Januari 2011	
3.	PT. Pelabuhan Barito Kuala Mandiri	Kepmenhub No. KP 14 Tahun 2011	17 Januari 2011	
4.	PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Kepmenhub No. KP 27 Tahun 2011	21 Januari 2011	
5.	PT. Gresik Jasatama	Kepmenhub No. KP 87 Tahun 2011	14 Februari 2011	
6.	PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Kepmenhub No. KP 88 Tahun 2011	14 Februari 2011	
7.	PT. Cipta Karya Maritim	Kepmenhub No. KP 97 Tahun 2011	21 Februari 2011	
8.	PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Kepmenhub No. KP 98 Tahun 2011	21 Februari 2011	
9.	PT. Indodharma Corpora	Kepmenhub No. KP 110 Tahun 2011	24 Februari 2011	
10.	PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Kepmenhub No KP 133 Tahun 2011	2 Maret 2011	
11.	PT.Terminal Petikemas Surabaya	Kepmenhub No KP 157 Tahun 2011	8 Maret 2011	
12.	PT. Karya Citra Nusantara	Kepmenhub No. KP 158 Tahun 2011	8 Maret 2011	
13.	PT. Berkat Borneo Coal	Kepmenhub No. KP 184 Tahun 2011	11 Maret 2011	
14.	PT. Hutchison Ports Indonesia	Kepmenhub No. KP 185 Tahun 2011	14 Maret 2011	
15.	PT. Gadingputra Printis Mandiri	Kepmenhub No. KP 189 Tahun 2011	17 Maret 2011	
16.	PT. Miang Besar Coal Terminal	Kepmenhub No. KP 211 Tahun 2011	21 Maret 2011	
17.	PT. Arta Karya Marina	Kepmenhub No. KP 245 Tahun 2011	6 April 2011	
18.	PT. Tanjung Teraban	Kepmenhub No. KP 248 Tahun 2011	6 April 2011	
19.	PT. Baramega Mekar Putih	Kepmenhub No. KP 251 Tahun 2011	6 April 2011	
20.	PT. Baramega Cahaya Makmur	Kepmenhub No. KP 252 Tahun 2011	6 April 2011	
21.	PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana	Kepmenhub No. KP 253 Tahun 2011	6 April 2011	
22.	PT. Peteka Karya Samudera	Kepmenhub No. KP 255 Tahun 2011	7 April 2011	

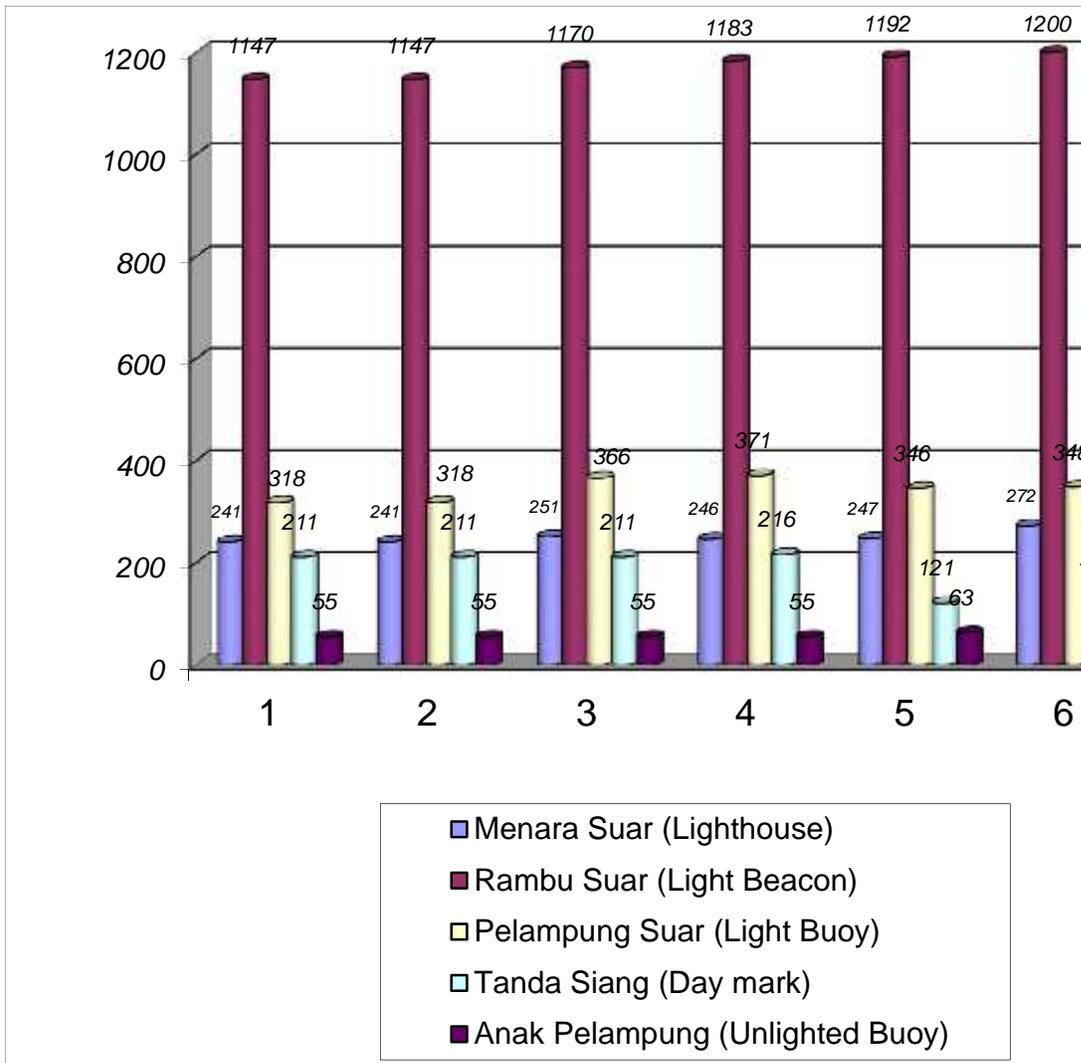
NO	NAMA BUP	PENETAPAN	TANGGAL	KET.
23.	PT. Pelabuhan Swangi Indah	Kepmenhub No. KP 280 Tahun 2011	20 April 2011	
24.	PT. Suryacitra Mahkota Mandiri	Kepmenhub No. KP 283 Tahun 2011	21 April 2011	
25	PT. Mandiri Citra Bersama	Kepmenhub No. KP 302 Tahun 2011	29 April 2011	
26.	PT. Sanent Power Network	Kepmenhub No. KP 312 Tahun 2011	3 Mei 2011	
27.	PT. Pelabuhan Sarana Bahari Prima	Kepmenhub No. KP 314 Tahun 2011	4 Mei 2011	
28.	PT. Walie Jaya Teladan	Kepmenhub No. KP 394 Tahun 2011	9 Mei 2011	
29.	PT. Sampoerna Karya Persada	Kepmenhub No. KP 395 Tahun 2011	9 Mei 2011	
30.	PT. Pama Erison Jaya	Kepmenhub No. KP 410 Tahun 2011	12 Mei 2011	
31.	PT. Elang Perkasa Elok	Kepmenhub No. KP 482 Tahun 2011	31 Mei 2011	
32.	PT. Anugerah Selat Karimun	Kepmenhub No. KP 484 Tahun 2011	31 Mei 2011	
33.	PT. Pelabuhan Tegar Indonesia	Kepmenhub No. KP 487 Tahun 2011	31 Mei 2011	
34.	PT. Karimun Pertamina STK	Kepmenhub No. KP 489 Tahun 2011	31 Mei 2011	
35.	PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo	Kepmenhub No. KP 491 Tahun 2011	31 Mei 2011	
36.	PT. Sarana Ultra Layanan Kargo	Kepmenhub No. KP 498 Tahun 2011	6 Juni 2011	
37.	PT. Merah Putih Mandiri	Kepmenhub No. KP 509 Tahun 2011	8 Juni 2011	
38.	PT. Ekanuri	Kepmenhub No. KP 513 Tahun 2011	8 Juni 2011	
39.	PT. Makassar Terminal Services	Kepmenhub No. KP 516 Tahun 2011	9 Juni 2011	
40.	PT. Prima Nur Panurjwan	Kepmenhub No. KP 520 Tahun 2011	15 Juni 2011	
41.	PT. Kartika Jaya Lestari	Kepmenhub No. KP 523 Tahun 2011	20 Juni 2011	
42.	PT. Arar Port	Kepmenhub No. KP 524 Tahun 2011	20 Juni 2011	
43.	PT. Wahyusamudra Indah	Kepmenhub No. KP 525 Tahun 2011	21 Juni 2011	
44.	PT. Transporindo Lima Perkasa	Kepmenhub No. KP 526 Tahun 2011	21 Juni 2011	
45.	PT. Global Perkasa Maritime	Kepmenhub No. KP 535 Tahun 2011	4 Juli 2011	

NO	NAMA BUP	PENETAPAN	TANGGAL	KET.
46.	PT. Artha Labora	Kepmenhub No. KP 536 Tahun 2011	4 Juli 2011	
47.	PT. Mustika Alam Lestari	Kepmenhub No. KP 542 Tahun 2011	8 Juli 2011	
48.	PT. Trisada Joyo Nusantara	Kepmenhub No. KP 543 Tahun 2011	8 Juli 2011	
49.	PT. Terminal Bumi Borneo	Kepmenhub No. KP 544 Tahun 2011	8 Juli 2011	
50.	PT. Asia Nipah Port	Kepmenhub No. KP 546 Tahun 2011	11 Juli 2011	
51.	PT. Kereta Samudera Lines	Kepmenhub No. KP 549 Tahun 2011	12 Juli 2011	
51.	PT. Jakarta Bandar Samudera Indonesia	Kepmenhub No. KP 559 Tahun 2011	18 Juli 2011	
52.	PT. Gonaya Internasional	Kepmenhub No. KP 561 Tahun 2011	18 Juli 2011	
53.	PT. Kereta Samudera Pratama Indonesia	Kepmenhub No. KP 562 Tahun 2011	18 Juli 2011	
54.	PT. Varia Usaha Bahari	Kepmenhub No. KP 581 Tahun 2011	19 Juli 2011	
55.	PT. Pelabuhan Buana Reja	Kepmenhub No. KP 592 Tahun 2011	25 Juli 2011	
56.	PT. Andhika Andalantama	Kepmenhub No. KP 595 Tahun 2011	25 Juli 2011	
57.	PT. Global Trans	Kepmenhub No. KP 637 Tahun 2011	10 Agustus 2011	
58.	PT. World Terminalindo	Kepmenhub No. KP 654 Tahun 2011	11 Agustus 2011	
59.	PT. Mitratama Usaha	Kepmenhub No. KP 689 Tahun 2011	22 Agustus 2011	
60.	PT. Cikarang Inland Port	Kepmenhub No. KP 690 Tahun 2011	22 Agustus 2011	
61.	PT. Bina Illustratama	Kepmenhub No. KP 694 Tahun 2011	22 Agustus 2011	
62.	PT. Bahtera Alam Tamiang	Kepmenhub No. KP 746 Tahun 2011	8 September 2011	
63.	PT. Andahanesa Abadi	Kepmenhub No. KP 760 Tahun 2011	22 September 2011	
64.	PT. Surya Tanjungbatu Mulia	Kepmenhub No. KP 761 Tahun 2011	22 September 2011	
65.	PT. Graha Segara	Kepmenhub No. KP 787 Tahun 2011	26 September 2011	
66.	PT. Sejahtera Wijaya Ocean	Kepmenhub No. KP 804 Tahun 2011	3 Oktober 2011	
67.	PT. Usaha Pelabuhan Indonesia	Kepmenhub No. KP 805 Tahun 2011	3 Oktober 2011	

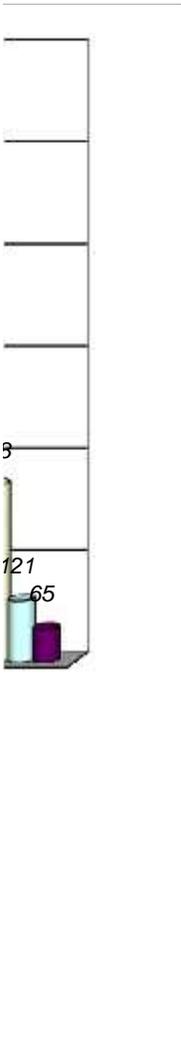
NO	NAMA BUP	PENETAPAN	TANGGAL	KET.
68.	PT. Agung Prima Nusantara	Kepmenhub No. KP 811 Tahun 2011	7 Oktober 2011	
69.	PT. Satria Baruna Ocean	Kepmenhub No. KP 818 Tahun 2011	11 Oktober 2011	
70.	PT. Portco Infranusantara	Kepmenhub No. KP 841 Tahun 2011	12 Oktober 2011	
71.	PT. Timur Nusantara	Kepmenhub No. KP 847 Tahun 2011	12 Oktober 2011	
72.	PT. Tata Bumi Khatulistiwa	Kepmenhub No. KP 1008 Tahun 2011	21 Desember 2011	
73.	PT. Delta Artha Bahari Nusantara	Kepmenhub No. KP 1009 Tahun 2011	21 Desember 2011	
74.	PT. Fatah 99	Kepmenhub No. KP 1010 Tahun 2011	21 Desember 2011	
75.	PT. Citra Bahana Raya	Kepmenhub No. KP 1011 Tahun 2011	21 Desember 2011	

PERTUMBUHAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN
MILIK DJEN HUBLA

JENIS SBNP	TAHUN				
	2001	2002	2003	2004	2005
Menara Suar (Lighthouse)	241	241	251	246	247
Rambu Suar (Light Beacon)	1147	1147	1170	1183	1192
Pelampung Suar (Light Buoy)	318	318	366	371	346
Tanda Siang (Day mark)	211	211	211	216	121
Anak Pelampung (Unlighted Buoy)	55	55	55	55	63



2006
272
1200
348
121
65

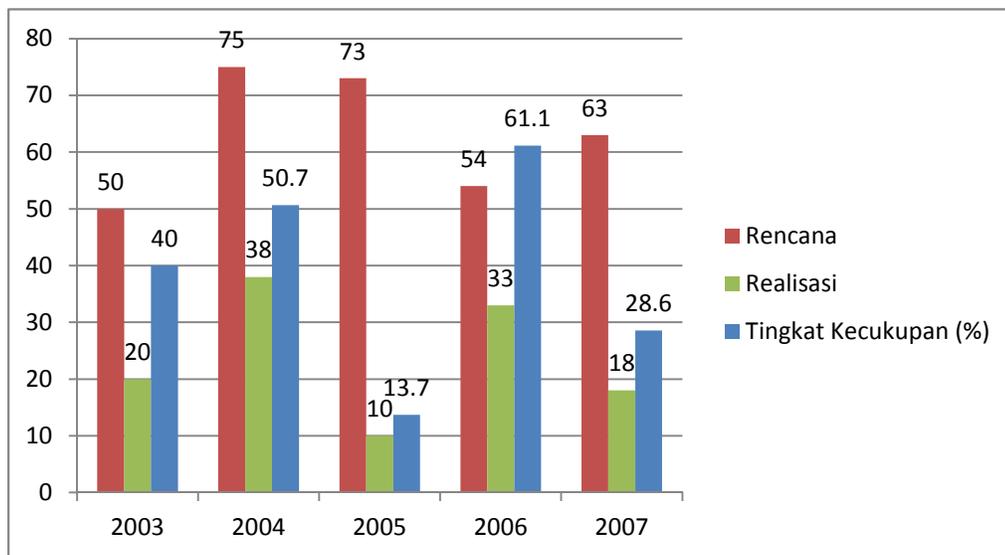


PERTUMBUHAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN
MILIK DITJEN HUBLA

Tahun	Jenis SBNP				
	Menara Suar (Lighthouse)	Rambu Suar (Light Beacon)	Pelampung Suar (Light Buoy)	Tanda Siang (Day mark)	Anak Pelampung (Unlighted buoy)
2004	246	1183	371	216	55
2005	247	1192	346	121	63
2006	272	1200	348	121	65
2007	274	1216	329	150	78
2008	275	1244	351	172	77
2009	277	1286	357	123	49
2010	277	1263	356	125	49
2011	278	1284	363	149	50

0800

Tahun	Rencana	Realisasi	Tingkat Kecukupan (%)
2003	50	20	40
2004	75	38	50.7
2005	73	10	13.7
2006	54	33	61.1
2007	63	18	28.6
	315	119	37.8



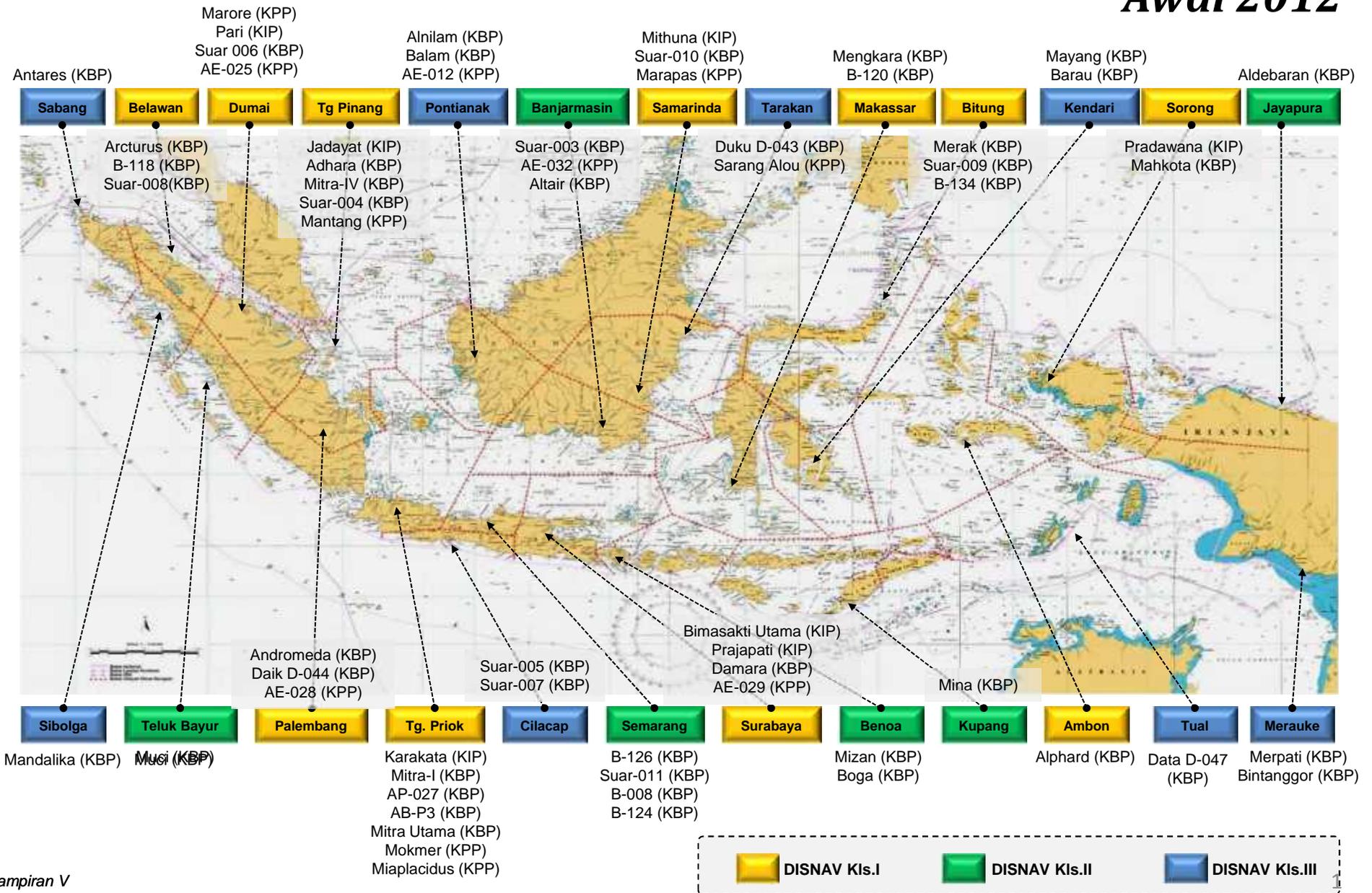
PERTUMBUHAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN MILIK DITJENHUBLA



DAFTAR SBNP MILIK DITJEN HUBLA

NO	DISTRIK NAVIGASI	MENSU	RAMSU							PELSU	ANPEL	JUMLAH RAYA
			30 M	20 M	15 M	10M D	10M L					
1	Sabang	10										
2	Belawan	5										
3	Sibolga	8										
4	Teluk Bayur	9										
5	Tg. Pinang	25										
6	Dumai	6										
7	Palembang	4										
8	Pontianak	6										
9	Tg. Priok	30										
10	Cilacap	6										
11	Semarang	7										
12	Surabaya	20										
13	Benoa	18										
14	Kupang	17										
15	Banjarmasin	10										
16	Tarakan	3										
17	Samarinda	5										
18	Makassar	17										
19	Kendari	6										
20	Bitung	24										
21	Ambon	15										
22	Sorong	6										
23	Jayapura	8										
24	Merauke	4										
25	T u a l	8										
	JUMLAH	277										

Wilayah Kerja & Pemangkalan Kapal Negara Kenavigasian Awal 2012



Kapal Negara Kenavigasian



Kapal Induk Perambuan (8 Unit)

Panjang Keseluruhan (Loa)		59,95 M
Panjang Antara Garis Tegak		55,19 M
Lebar Kapal	(B)	10,40 M
Tinggi Kapal	(D)	4,70 M
Sarat Kapal	(d)	3,50M
Jumlah Crew		37 Orang
Jarak Jelajah		4000 Mil



Kapal Pengamat Perambuan (12 Unit)

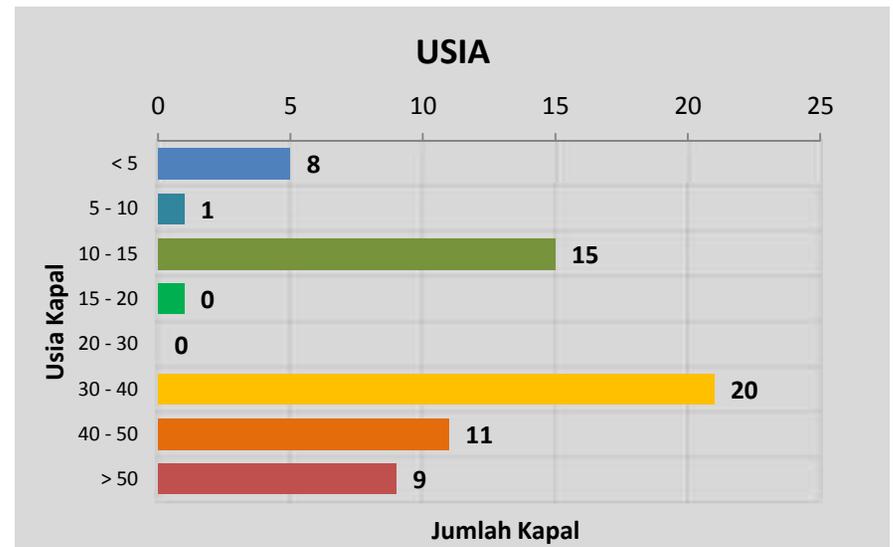
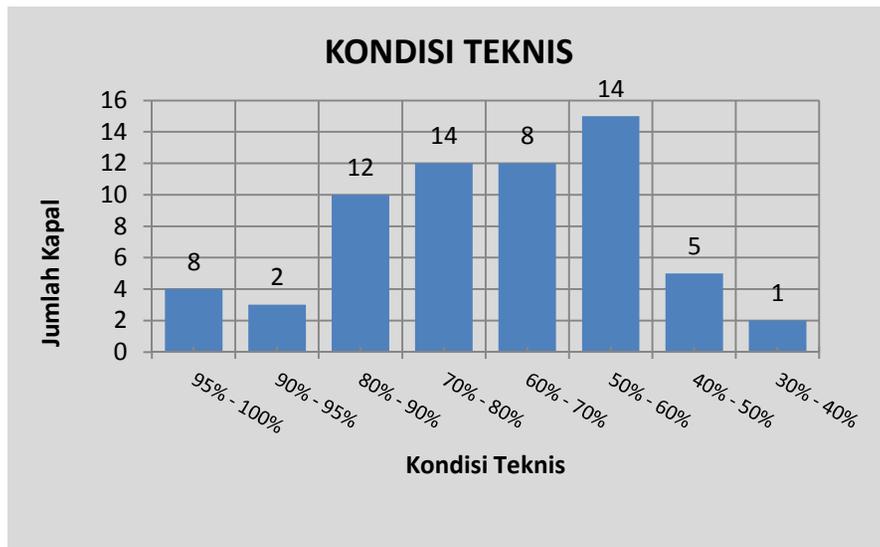
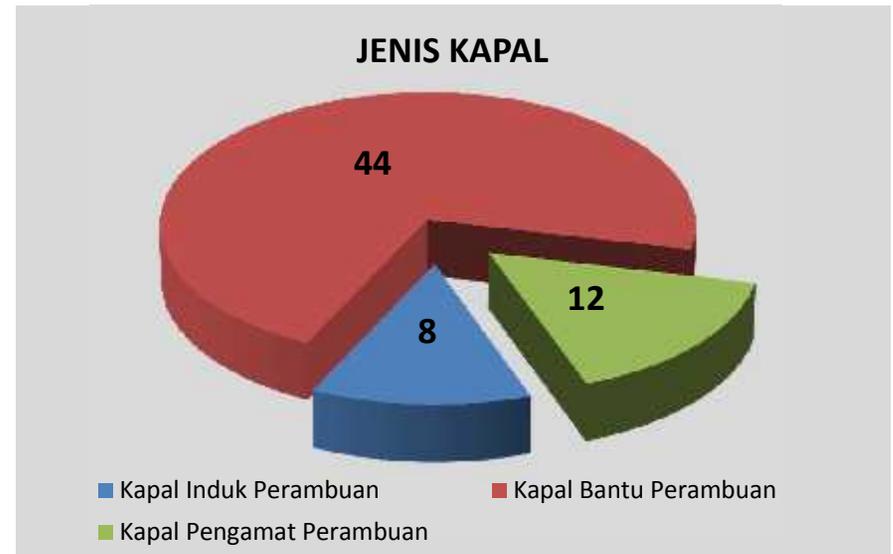
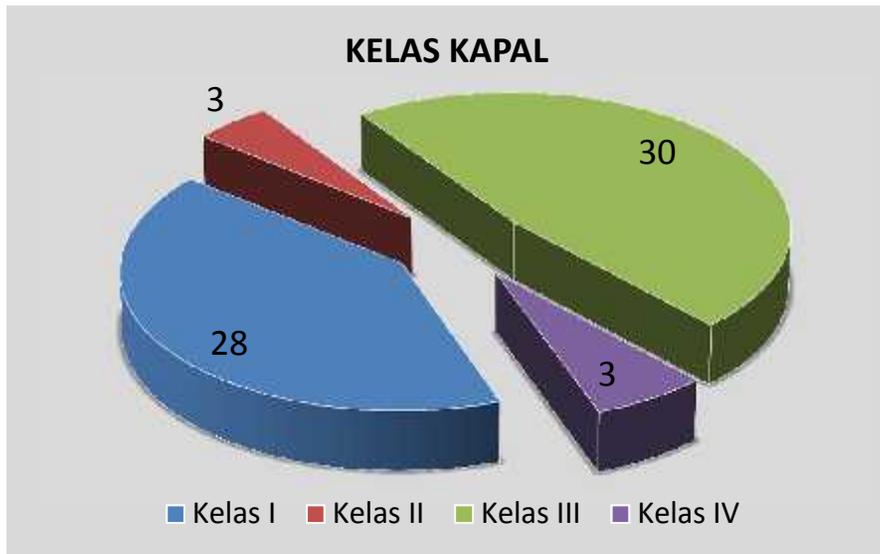
Panjang Keseluruhan (Loa)		30,00 M
Panjang Antara Garis Tegak		
Lebar Kapal	(B)	6,20 M
Tinggi Kapal	(D)	3,35 M
Sarat Kapal	(d)	1,20 -1,85 M
Jumlah Crew		12 Orang
Jarak Jelajah		1500 Mil



Kapal Bantu Perambuan (44 Unit)

Panjang Keseluruhan (Loa)		51,94 M
Panjang Antara Garis Tegak		47,07 M
Lebar Kapal	(B)	10,20 M
Tinggi Kapal	(D)	4,35 M
Sarat Kapal	(d)	3,00 M
Jumlah Crew		28 Orang
Jarak Jelajah		3000 Mil

Profil Kapal Negara Kenavigasian - Awal 2012



Proyeksi Kondisi Teknis & Usia Kapal Negara Kenavigasian

